# SETENGAH ABAD KIPRAH KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN INDONESIA 1947–1997

09

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

# SETENGAH ABAD
# KIPRAH KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
# INDONESIA
# 1947--1997

# SETENGAH ABAD
# KIPRAH KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN INDONESIA
# 1947--1997

**Penyunting**
Dendy Sugono
Nafron Hasjim
Hasjmi Dini
Jumariam

PERPUSTAKAAN
KEPALA
PUSAT BAHASA

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1998

ISBN 979-459-954-9
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun
Jakarta 13220

PERPUSTAKAAN KEPALA PUSAT BAHASA
Klasifikasi
PB
353.844 09
SET
No. Induk : 1457
Tgl. : 21/2-06
Ttd. :

Edisi pertama, 1998

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
499.2109
SET

Setengah abad kiprah kebahasaan dan kesastraan Indonesia/disunting oleh Dendy Sugono, Nafron Hasjim, Hasjmi Dini, Jumariam.--Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
x, 140 hlm.; 24 cm

ISBN 979-459-954-9

1. Bahasa Indonesia-Sejarah
2. Kesusastraan Indonesia-Sejarah

# KATA PENGANTAR

Lembaga yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia telah genap berusia setengah abad sejak dibentuk tahun 1947 yang bernama *Institut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO). Dalam perjalanan yang panjang itu banyak hal yang telah dilakukan oeh lembaga itu. Bahkan, kegiatan kebahasaan dan kesastraan telah dimulai jauh sebelum lembaga itu dibentuk, terutama setelah pernyataan sikap politik tentang bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 1928.

Perkembangan jumlah dan mutu kegiatan kebahasaan dan kesastraan itu berjalan seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia.

Buku *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia* ini disusun untuk menyongsong Kongres Bahasa Indonesia VII, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 26–30 Oktober 1998. Buku ini berupaya memberikan gambaran tentang kiprah dan gerak langkah lembaga yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan ini selama setengah abad, mulai ITCO (1947) hingga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa).

Data yang termuat dalam buku ini terbagi dalam tiga bagian. Setelah pendahuluan, Bagian Pertama memuat informasi tentang kelembagaan dari ITCO hingga Lembaga Bahasa nasionao (LBN). Bagian ini memanfaatkan buku *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* yang disusun oleh *Maman Sumantri* dkk. 1978). Bagian Kedua memuat kelembagaan dan gerak langkah Pusat Bahasa. Bagian Ketiga memuat pandangan tokoh

ilmuwan, budayawan, sastrawan, dan tokoh organisasi profesi bahasa dan sastra tentang upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra tentang upaya pembinaan dan pengembangan bahasa.

Pengemasan bahan informasi dalam bentuk ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan. Secara khusus, penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada para penyunting Sdr. Dendy Sugono, Sdr. Nafron Hasjim, Sdr. Hasjmi Dini, dan Sdr. Jumariam, serta Sdr. Dede Supriadi sebagai pembantu teknis.

Jakarta, Juli 1998
Kepala Pusat Bahasa,

**Hasan Alwi**

# PRAKATA

Penyebarluasan informasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya peningkatan sikap positif terhadap bahasa dan apresiasi satra. Untuk itulah, Kepala Pusat Bahasa menugasi Tim Penyunting untuk mengolah dan menyusun berbagai informasi kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang telah dilakukan oleh Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan sejak ITCO hingga Pusat Bahasa. Penguasaan informasi dalam bentuk buku seperti ini akan memudahkan pemanfaatannya baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan perencanaan bahasa di Indonesia karena bahan informasi ini dilengkapi dengan pandangan tokoh terhadap usaha pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia.

Penyunting menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran pembaca akan diterima dengan senang hati.

Jakarta, Juli 1998

Penyunting

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... v
DAFTAR ISI ..... ix
PENDAHULUAN ..... 1

**BAGIAN PERTAMA ITCO LBN** ..... 3
Bagian 1 Institut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) .. 5
Bagian 2 Panitia Pekerja ..... 8
Bagian 3 Balai Bahasa ..... 10
Bagian 4 Lembaga Bahasa dan Budaya ..... 12
Bagian 5 Lembaga Bahasa dan Kesusastraan ..... 16
Bagian 6 Direktorat Bahasa dan Kesusastraan ..... 20
Bagian 7 Lembaga Bahasa Nasional ..... 24

**BAGIAN KEDUA PUSAT BAHASA** ..... 30
1. Gerak dan Langkah Pusat Bahasa ..... 33
   a. Kebijakan Bahasa Nasional ..... 34
   b. Sarana dan Tenaga Kebahasaan ..... 39
   c. Kebijakan Sastra ..... 42
   d. Pemasyarakatan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar .. 48
2. Organisasi Pusat Bahasa ..... 52
   a. Kedudukan ..... 52
   b. Tugas dan Fungsi ..... 52
   c. Susunan Organisasi ..... 53

d. Pengembangan Organisasi ..... 62
e. Pengembangan Ketenagaan ..... 63
3. Kegiatan Kebahasaan dan Kesastraan ..... 68
a. Penelitian ..... 68
b. Penyusunan dan Pembakuan ..... 70
c. Penerjemahan ..... 71
d. Pertemuan ..... 72
e. Pemasyarakatan/Penyuluhan ..... 82
f. Penerbitan ..... 86
g. Bulan Bahasa dan Sastra ..... 87
h. Pemberian Penghargaan ..... 89
4. Kerja Sama ..... 92
a. Kerja Sama Dalam Negeri ..... 92
b. Kerja Sama Luar Negeri ..... 99

**BAGIAN KETIGA BAGIAN TOKOH** ..... 103
1. Pelestarian Bahasa Daerah ..... 105
2. Visi Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) terhadap Pembinaan Bahasa Indonesia ..... 110
3. Tuntutan Kesetaraan ..... 113
4. Pusat Bahasa di Mata Hiski ..... 117
5. Peran Pusat Bahasa dalam Pembinaan Peristilahan Ilmu dan Teknologi Indonesia ..... 120
6. Pusat Bahasa: Kenangan dan Harapan ..... 125
7. Pusat Bahasa: Penilaian dan Harapan ..... 131
8. Pusat Bahasa di Sela-Sela Belantara Masalah Sastra Indonesia ..... 135

# PENDAHULUAN

Bahasa dan sastra sebagai unsur kebudayaan nasional dan sarana budaya bangsa Indonesia perlu dibina dan dikembangkkan berdasarkan kebijakan nasional tentang bahasa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 dan penjelasannya, yaitu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, dan bahwa bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan dan dipelihara oleh masyarakat pemakainya dilindungi dan dibina juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup.

Pemakaian dan pengajaran bahasa asing yang lazim dipakai dalam hubungan antarbangsa pada umumnya, terutama dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam lingkungan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, serta dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi modern perlu diarahkan untuk kepentingan nasional dan dimanfaatkan sebagai satu sumber untuk pengembangan bahasa nasional.

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang bahasa tersebut, pada tahun 1947 Pemerintah telah membentuk lembaga resmi yang menangani permasalahan bahasa. Lembaga tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa yang akhirnya pada tahun 1975 menjadi "Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (sebutan singkatnya **Pusat Bahasa**)." Hal itu didorong oleh suatu kenyataan bahwa

seluruh permasalahan bahasa di Indonesia yang mencakup (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pengajaran bahasa asing merupakan masalah nasional yang perlu diolah dan digarap secara teliti, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Semua usaha penggarapan masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia luar pada umumnya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, disusunlah buku *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia* ini untuk memberikan gambaran tentang (1) lembaga resmi yang menangani permasalahan bahasa pada masa lampau, (2) Pusat Bahasa, serta (3) pandangan tokoh tentang upaya pembinaan dan pengembangan bahasa.

# BAGIAN PERTAMA
# ITCO HINGGA LBN

# 1

# INSTITUUT VOOR TAAL EN CULTUUR ONDERZOEK (ITCO)

Sumpah Pemuda, yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika bangsa Indonesia masih dalam cengkeraman penjajah Belanda, membuktikan bahwa masalah kebahasaan telah menjadi perhatian tokoh-tokoh jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Hal itu merupakan satu tanda bahwa bahasa Indonesia sebagai sarana persatuan sudah sejak lama mempunyai kedudukan penting di dalam masyarakat Indonesia.

Bagi bangsa asing, bahasa Indonesia merupakan sarana yang sangat penting untuk mengenal bangsa dan budaya Indonesia. Hal itu terlihat dari usaha penelitian dalam bidang bahasa dan budaya yang dilakukan oleh para sarjana Belanda, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta.

Sejarah telah mencatat bahwa di sekitar tahun 1930-an pihak pemerintah Belanda sudah mulai mengadakan penelitan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Penelitian itu disalurkan melalui Lembaga Pendidikan Universiter, *Kantoor voor Inlandsche Zaken, en Oudheidkundige Dienst.* Sementara itu, usaha swasta sejak tahun 1930 diwakili oleh Yayasan *Matthes*, yang pada tahun 1955 namanya berubah menjadi Yayasan Sulawesi Selatan Tenggara yang berkedudukan di Makasar (sekarang Ujung Pandang). Yayasan itu bertujuan

mengadakan penelitian bahasa dan kebudayaan daerah Makasar. Selain Yayasan *Matthes*, ada yayasan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu Yayasan Kirtya Liefrinck van der Tuuk yang berkedudukan di Singaraja, Bali, di bawah pimpinan Dr. R. Goris. Kedua yayasan itu akhirnya bekerja sama dengan cabang lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari masa ke masa, peristiwa bahasa dan kebudayaan Indonesia itu menarik perhatian para sarjana. Pada tahun 1947 Fakultas Sastra dan Filsafat--yang pada saat itu berada di bawah naungan *Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen* (Kementerian Pengajaran, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan)--meresmikan pembentukan suatu lembaga yang disebut *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO) yang bertujuan menampung kegiatan ilmiah universitas, terutama dalam bidang bahasa dan kebudayaan. Lembaga ini dipimpin oleh Prof. Dr. G.J. Held yang kemudian menjadi pemimpin umum.

*Prof. Dr. G.J. Held*

ITCO itu mempunyai tiga bagian, yaitu (1) Bagian Ilmu Kebudayaan, dipimpin oleh Prof. Dr. G.J. Held, (2) Bagian Ilmu Bahasa dan Kesusastraan, dipimpin oleh Prof. Dr. C. Hooykaas, dan (3) Bagian Leksikografi, dipimpin oleh W.J.S. Poerwadarminta.

Pada Bagian Ilmu Kebudayaan tercatat Mr. H. Th. Chabot yang bertugas menyelidiki adat dan Dr. F.A.E. van Wouden sebagai petugas bahasa. Pada Bagian Ilmu Bahasa dan Kesusastraan tercatat Dr. R. Goris yang terus menyumbangkan tenaganya sampai masa pensiun. Pada Bagian Leksikografi diperbantukan para ahli penyelidik, seperti Prof. Dr. P. Voorhoeve, Dr. R. Goris, Dr. F.A.E. van Wouden, Mr. H. Th. Chabot, Prof. Dr. H. Uhlenbeck, Prof. Dr. A. Teeuw, dan Prof. Dr. R. Roolvink.

Kegiatan yang dilakukan ITCO, selain penelitian bahasa dan kebudayaan, ialah penyalinan kembali naskah yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari Yayasan Kirtya Liefrinck van der Tuuk, naskah yang berasal dari Sono Budoyo, Yogyakarta, dan naskah-naskah dari Yayasan Matthes, Makasar. Di samping itu, ITCO mem-

buat film tentang tulisan-tulisan sastra daerah, seperti Aceh, Batak Simalungun, Melayu, Makasar, dan Bugis. ITCO juga melakukan tukar-menukar film dengan beberapa lembaga ilmiah di luar negeri, seperti Leiden, Pretoria, Kairo, dan New York. Kegiatan lain yang dilakukan ITCO ialah berusaha menarik perhatian para sarjana luar negeri untuk mengadakan penelitian ilmiah dan penerbitan tentang bahasa dan kebudayaan. Kegiatan-kegiatan itulah sebenarnya yang menjadi pemula kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bahasa yang tumbuh kemudian.

Pada tahun 1952 ITCO digabung dengan Bagian Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa Yogyakarta, menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya.

# 2

# PANITIA PEKERJA

Pada tahun 1947 Mr. Suwandi selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan suatu lembaga negara yang menangani masalah pemeliharaan dan pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Namun, pembentukan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pada saat itu para ahli dan sarjana bahasa banyak yang mengungsi ke luar kota Jakarta. Persiapan yang telah dilakukan baru sampai pada pembentukan Panitia Pekerja berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 18 Juni 1947 No. 700/Bhg.A. Panitia Pekerja itu merupakan satu unit yang dikepalai oleh Mr. St. Takdir Alisjahbana dengan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo sebagai sekretaris, dan dibantu oleh lima orang anggota, yaitu Adinegoro, W.J.S. Poerwadarminta, Ks. St. Pamuntjak, R. Satjadibrata, dan R.T. Amin Singgih Tjitrosomo.

*Mr. St. T. Alisjahbana*

Panitia Pekerja itu telah menyusun rencana kerja, yaitu (1) menetapkan istilah ilmu pengetahuan dan istilah bahasa yang digunakan masyarakat umum; (2) menetapkan tata bahasa, terutama untuk pelajaran sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat

pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas; (3) menyusun kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada untuk keperluan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Akan tetapi, Panitia Pekerja itu belum dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut karena pada tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda menduduki dan merampas gedung-gedung Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Pada saat itu Panitia Pekerja itu baru dapat melaksanakan rapat satu kali.

PERPUSTAKAAN
KEPALA
PUSAT BAHASA

# 3

# BALAI BAHASA

Ketika terjadi pendudukan tentara Belanda, Panitia Pekerja di Jakarta belum berhasil membentuk suatu lembaga penelitian bahasa seperti yang diharapkan. Baru beberapa bulan setelah Pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Santoso, menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan lembaga bahasa secara lengkap. Beberapa bulan setelah itu, dibentuklah suatu lembaga otonom yang berada langsung di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

*Amin Dahlan*

Lembaga tersebut bernama Balai Bahasa, yang diresmikan pada bulan Maret 1948 di Yogyakarta atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Ali Sastroamidjojo, tanggal 26 Februari 1948 No. 1532/A. Pemimpin umum Balai Bahasa ini mula-mula adalah P.F. Dahler alias Amin Dahlan kemudian R.T. Amin Singgih Tjitrosomo sebagai pejabat sementara.

Karena P.F. Dahler meninggal dunia, selanjutnya pemimpin umum dipegang oleh Prof. Dr. Prijana. Adapun sekretaris Balai

*R.T. Amin Singgih T.*

Bahasa tersebut adalah I.P. Simandjuntak. Balai Bahasa ini mempunyai empat seksi, yaitu (1) Seksi Bahasa Indonesia, dipimpin oleh St. Moh. Zain, (2) Seksi Bahasa Jawa, dipimpin oleh Tardjan Hadidjaja, (3) Seksi Bahasa Sunda, dipimpin oleh R. Iskak Adiwidjaja, dan (4) Seksi Bahasa Madura, dipimpin oleh Suro Widjojo. Pada saat itu Balai Bahasa sudah mempunyai kantor cabang yang berkedudukan di Bukittinggi.

Tugas dan kegiatan Balai Bahasa ialah (1) meneliti bahasa Indonesia dan bahasa daerah, baik lisan maupun tulis, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak digunakan lagi, (2) memberi petunjuk dan pertimbangan tentang bahasa kepada masyarakat, dan (3) membina bahasa. Kegiatan lain yang perlu dicatat ialah penerbitan majalah yang berjudul *Medan Bahasa* yang memuat hal-hal tentang bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia Kedua tanggal 28 Oktober 1954 di Medan, Prof. Dr. Prijana selaku pemimpin umum Balai Bahasa memberikan prasaran tentang rencana pengubahan ejaan bahasa Indonesia, yang menghasilkan kesimpulan bahwa "perlu dibentuk oleh Pemerintah suatu panitia ejaan yang akan menyusun ejaan bahasa Indonesia.

# 4

# LEMBAGA BAHASA DAN BUDAYA

Seperti telah disebutkan di muka, Balai Bahasa adalah salah satu bagian Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Namun, atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Agustus 1952, Balai Bahasa itu dijadikan bagian Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Tugas Balai Bahasa yang sudah menjadi bagian Fakultas Sastra Universitas Indonesia itu dilaksanakan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya, yang merupakan gabungan dari Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan (ITCO) dan Bagian Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa, dan Jawatan Kebudayaan.

*Prof. Dr. Prijana*

Pimpinan Lembaga Bahasa dan Budaya ialah Prof. Dr. Prijana yang merangkap sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sejak tanggal 1 Mei 1957--karena beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan--jabatan pimpinan Lembaga dipegang oleh Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat yang juga merangkap sebagai guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jabatan sekretaris umum dipegang oleh Darsan Martadarsana dan pada

tahun 1956 digantikan oleh Sjair. Pada tahun 1958 Sjair karena pensiun diganti oleh Dra. Lukijati Gandasubrata.

*Prof. Dr. Hoesein D.*

Lembaga Bahasa dan Budaya mempunyai struktur organisasi yang lebih baik daripada Balai Bahasa. Lembaga Bahasa dan Budaya mempunyai tujuh bagian dengan tiga cabang. Bagian-bagian tersebut ialah (1) Bagian Penyelidikan Bahasa dan Penyusunan Tata Bahasa, dipimpin oleh Prof. Dr. Prijana, (2) Bagian Leksikografi, dipimpin oleh W.J.S. Poerwadarminta, (3) Bagian Penyelidikan Kebudayaan, dipimpin oleh Prof. Dr. G.J. Held, (4) Bagian Komisi Istilah, dipimpin oleh Prof. Dr. Prijana dengan wakil Nur Sutan Iskandar, (5) Bagian Penyelidikan Kesusastraan, dipimpin oleh Drs. H.B. Jassin, (6) Bagian Perpustakaan, dipimpin oleh Dr. E.M.A.A.J.A Allard, dan (7) Bagian Terjemahan, dipimpin oleh M. Rasjad St. Suleman, S.H. yang bertindak sebagai koordinator. Cabang Lembaga Bahasa dan Budaya berkedudukan di tiga kota, yaitu (1) Cabang Yogyakarta, yang dipimpin oleh Tardjan Hadidjaja, (2) Cabang Singaraja, dipimpin oleh Dr. R. Goris (yang sudah menjadi pemimpin penelitian bahasa dan kebudayaan di Bali sejak tahun 1947, ketika instansi itu masih merupakan cabang (ITCO), dan (3) Cabang Makasar (sekarang Ujung Pandang) dipimpin oleh Abdurrachim yang bertindak sebagai koordinator.

Tugas Lembaga Bahasa dan Budaya meliputi (1) penyelidikan dan penelitian bahasa persatuan, bahasa daerah, dan kebudayaan di Indonesia, (2) penyusunan tata bahasa, (3) penyusunan kamus bahasa Indonesia dan daerah, (4) pengumpulan dan penetapan istilah berbagai ilmu pengetahuan; (5) penyelenggaraan terjemahan buku untuk perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan umum, serta (6) penyebaran hasil penelitian.

Di samping kegiatan penelitian dan pengembangan, Lembaga Bahasa dan Budaya juga menerbitkan majalah dua bulanan yang berjudul *Bahasa dan Budaya*. Dewan redaksinya terdiri atas sebelas orang yang dipimpin oleh Prof. Dr. Prijana. Majalah itu terbit atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebu-

dayaan tanggal 27 Desember 1952, No. 49032/Kab. Isinya bersifat ilmiah populer tentang hasil penelitian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta kebudayaan Indonesia, baik yang dihasilkan oleh pusat maupun oleh cabang. Di samping itu, majalah itu juga memuat istilah-istilah yang telah disahkan oleh Komisi Istilah. Adapun tujuan lembaga menerbitkan majalah itu ialah (1) mewujudkan hubungan nyata antara Universitas Indonesia dan masyarakat, (2) menanamkan rasa cinta dan minat terhadap bahasa persatuan dan kebudayaan Indonesia, (3) membantu para peminat bahasa dan kebudayaan mendapatkan bacaan ilmiah populer tentang bahasa dan kebudayaan, (4) merangsang masyarakat peminat bahasa dan kebudayaan untuk menulis dan mengisi majalah tersebut, baik tulisan asli, saduran maupun terjemahan, (5) memberi kesempatan tanya jawab mengenai masalah kebudayaan dan kebahasaan, serta (6) menyebarkan hasil penelitian.

Penerbitan hasil kegiatan kebahasaan meliputi: *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W.J.S. Poerwadarminta (cetakan I 1952 dan cetakan II 1954), majalah dua bulanan *Bahasa dan Budaya* (1952); *Prasasti Bali I dan II* oleh Dr. R. Goris (1954), *Kamus Istilah Kedokteran* oleh Komisi Istilah (1954), *Kamus Istilah Kehewanan* oleh Komisi Istilah (1956), *Kamus Istilah Teknik* oleh Komisi Istilah (1956), *Kamus Istilah Pelayaran* oleh Komisi Istilah (1956), *Intisari Tatanama Kimia Anorganik dan Kimia Organik beserta Kamus Istilah Kimia* oleh Komisi Istilah (1956), *Kamus Istilah Kerajinan Wanita* oleh Komisi Istilah (1957), *Kamus Istilah Hukum* oleh Komisi Istilah (1958), *Kamus Istilah Pendidikan, Pengajaran, dan Ilmu Jiwa* oleh Komisi Istilah (1958), dan *Pedoman Pembentukan Istilah Kimia* oleh Komisi Istilah (1958).

Jika penerbitan di atas diperhatikan, tampak bahwa hasil kerja Komisi Istilah cukup banyak. Pada saat itu memang Komisi Istilah bekerja sangat aktif, sejak tanggal 1 Juni 1951 sudah digabungkan dengan Balai Bahasa, Jawatan Kebudayaan, dan tahun 1952 dimasukkan ke dalam Lembaga Bahasa dan Budaya.

Komisi Istilah mempunyai 16 seksi yang masing-masing seksi terdiri atas 3 sampai 12 orang ahli. Komisi ini langsung diketuai oleh Prof. Dr. Prijana (1950--1957) yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat (1957---1960). Pada tahun 1960--1962 jabatan pimpinan dipegang oleh Dra. Lukijati Gandasubrata. Jabatan wakil ketua Komisi Istilah dipegang oleh Nur Sutan Iskandar yang aktif bekerja sejak tahun 1950 sampai tahun 1960. Jabatan sekretaris umum berturut-turut dipegang oleh St. Muh. Said, A.W. Djumena, R.A. Datuk Besar, dan Dra. Moliar Achmad.

# 5

# LEMBAGA BAHASA DAN KESUSASTRAAN

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 1 Juni 1959 No. 69626/B/S/, Lembaga Bahasa dan Budaya diganti namanya menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Sejak itu lembaga tersebut beserta cabang-cabangnya terlepas dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan langsung di bawah Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Bagian Bahasa, Jawatan Kebudayaan dilebur dan pegawainya masuk ke dalam Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Demikian pula sejak bulan Juni 1964, Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah, Jawatan Pendidikan Umum juga dimasukkan ke dalam lembaga itu. Dengan demikian, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan merupakan gabungan dari Lembaga Bahasa dan Budaya yang berada di bawah Fakultas Sastra, Bagian Bahasa dan Jawatan Kebudayaan, dan Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah dari Jawatan Pendidikan Umum.

*Prof. Dr. Hoesein D.*

Pimpinan pertama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan ini adalah Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat, dengan sekretaris Umum Dra. Lukijati Gandasubrata. Pada tahun 1960 jabatan pimpinan umum dipegang oleh sekretaris umum karena pim-

*Dra. Lukijati G.*

pinan umum meninggal dunia. Pada tahun 1962 Dra. Moliar Achmad menjabat kepala lembaga karena Dra. Lukijati Gandasubrata pindah ke Semarang. Pada tahun 1966, pimpinan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan itu diganti oleh Dra. S.W. Rujiati Mulyadi.

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan terdiri atas delapan urusan, yakni (a) Urusan Tata Bahasa, dipimpin berturut-turut oleh Drs. Slamet Muljana, T.W. Kamil, M.A., Drs. Nurdin Achmad, dan Drs. Basuki Suhardi; (b) Urusan Peristilahan, dipimpin oleh Dra. Moliar Achmad, dan kemudian oleh Dra. Sri Timur Suratman; (c) Urusan Kesusastraan Indonesia Modern, dipimpin oleh Drs. H.B. Jassin, kemudian oleh Drs. Lukman Ali; (d) Urusan Kesusastraan Indonesia Lama, berturut-turut dipimpin oleh Dra. S.W. Rujiati Mulyadi, Drs. Sardanto Tjokrowinoto, dan Soelastri Soerjoatmojo; (e) Urusan Bahasa Daerah, dipimpin berturut-turut oleh Dra. S.W. Rujiati Mulyadi, Drs. Hoesein Widjajakusumah, Dra. Sri Sukesi Adiwimarta, Drs. Djajuli, dan Drs. Ramli Harun; (f) Urusan Perkamusan, dipimpin oleh Drs. A.M. Moeliono, M.A. kemudian oleh Drs. Koentamadi; (g) Urusan dokumentasi dan penerbitan, dipimpin oleh Drs. Hoesein Widjajakusumah, kemudian oleh Soelastri Soerjoatmodjo, dan terakhir oleh Drs. Munawar; dan (h) Urusan terjemahan, dipimpin berturut-turut oleh Dra. Lukijati Gandasubrata, Hoedi, B.A., dan Suntari Suntoro.

*Dra. Moliar Achmad*

Cabang-cabang Lembaga Bahasa dan Kesusastraan tetap berjumlah tiga buah, yaitu (1) Cabang Yogyakarta, dipimpin oleh Drs. Mudjanattistomo, (2) Cabang Singaraja, dipimpin oleh Drs. Suwito Santoso, kemudian diganti oleh Drs. I Gusti Ngurah Bagus, dan (3) Cabang Makasar, dipimpin berturut-turut oleh A. Tenriadji, Moh. Nur, dan Ahmad Rahman.

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan mempunyai tugas yang hampir tidak berbeda dengan tugas Lembaga Bahasa dan Budaya. Lembaga itu bertugas (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek, terjemahan, dan kepustakaan, (2) mengadakan penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dan sastra daerah, (3) mengadakan kerja sama dengan instansi lain di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, (4) mengadakan simposium, seminar, dan diskusi tentang bahasa dan sastra Indonesia dan sastra daerah, (5) memberi penerangan, pertimbangan, dan saran kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, dan (6) menyelenggarakan penerbitan.

Setelah berubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, kegiatan lembaga itu tampak lebih maju daripada sebelumnya. Pada tanggal 7 Mei 1966 dibentuklah sebuah Panitia *Crash Program* Ejaan Bahasa Indonesia, yang anggotanya adalah ahli bahasa di Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Drs. Anton M. Moeliono, M.A. bertindak sebagai ketua dan Dra. S.W. Rujiati Mulyadi sebagai wakil ketua. Jabatan sekretaris dipegang oleh Dra. Sri Timur Suratman, sedangkan jabatan sekretaris II dipegang oleh Drs. Basuki Suhardi. Anggota-anggotanya adalah Djoko Kentjono, M.A., Drs. Harimurti Kridalaksana, Drs. Lukman Ali, Drs. S. Effendi (menggantikan Drs. Sardanto Tjokrowinoto). Panitia itu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan tanggal 19 September 1967, No. 062/1967. Panitia itu telah menyusun konsep ejaan yang kemudian diterbitkan oleh Dian Rakyat dengan judul *Ejaan Baru Bahasa Indonesia* (1967).

Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-36 (1964), Lembaga Bahasa dan Kesusastraan bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta menyelenggarakan simposium bahasa dan kesusastraan dengan tema "Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru." Topik yang dibahas dalam simposium itu meliputi bidang kebahasaan dan pengajaran bahasa serta sastra. Pada kesempatan simposium itu diadakan pula kegiatan pameran dokumentasi

bahasa dan sastra. Hasil simposium itu berupa buku yang terbit pada tahun 1967 oleh Gunung Agung dengan judul *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru* dengan editor Drs. Lukman Ali. Sebelum itu, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan telah menerbitkan dua buku, yaitu (1) *Syair Putri Akal* (1965) yang disusun oleh Urusan Penelitian dan Penyusunan Kesusastraan Lama, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan (2) *Studi Bidang Kehidupan Desa di Pinggiran Jakarta* (1965) yang disusun oleh Tim Kerja Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Penerbitan hasil kegiatan kebahasaan dan kesastraan meliputi *Kamus Istilah Pertanian, dan Perikanan* oleh Komisi Istilah (1960), *Kamus Istilah Ekonomi/Keuangan* oleh Komisi Istilah (1960), *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (cetakan II) oleh W.J.S. Poerwadarminta (1961), *Kamus Istilah Kimia/Farmasi Inggris-Indonesia-Jerman-Belanda* oleh Komisi Istilah (1965), *Syair Putri Akal* oleh Urusan Kesusastraan Lama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (1965), *Studi Bidang Kehidupan Desa di Pinggiran Jakarta* oleh Tim Kerja Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1966), *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru* oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan bersama Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, dan KASI Jaya (1966), *Ejaan Baru Bahasa Indonesia* oleh Panitia Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (1966), *Kamus Istilah Bahasa dan Kesusastraan* oleh Komisi Istilah (1966).

# 6

# DIREKTORAT BAHASA DAN KESUSASTRAAN

Setelah tiga tahun Lembaga Bahasa dan Kesusastraan diresmikan, atas dasar Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 November 1966 No. 75/V/kep/i/1966, lembaga tersebut diubah namanya menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan di bawah pimpinan Dra. S.W. Rudjiati Mulyadi. Direktorat Bahasa dan Kesusastraan itu berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Struktur organisasi yang ada pada direktorat itu lebih ramping daripada yang ada pada Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Direktorat Bahasa dan Kesusastraan mempunyai bagian-bagian: (a) Dinas Bahasa Indonesia, dikepalai oleh Drs. S. Effendi; (b) Dinas Kesusastraan Indonesia, dikepalai oleh Drs. Lukman Ali; (c) Dinas Bahasa dan Kesusastraan Daerah, dikepalai oleh Drs. Koentamadi; (d) Dinas Bahasa dan Kesusastraan Asing, dikepalai oleh Chusaeri; (e) Dinas Peristilahan dan Perkamusan, berturut-turut, dikepalai oleh Dra. Sri Timur Suratman (November 1966--Mei 1976), oleh Dra. Sri Sukesi Adiwimarta (Juni 1967--Mei 1969); dan (f)

*Dra. S.W. Rujiati M.*

Sekretariat, berturut-turut, dikepalai oleh Hermanu Maulana (November 1966--Mei 1967), dan Dra. S.W. Rujiati Mulyadi (Mei--Juli 1967) ketika jabatan pimpinan Direktorat Bahasa dan Kesusastraan dipegang oleh Chusaeri dan Hermanu Maulana.

Tiap-tiap dinas tersebut terdiri atas lima seksi yang melaksanakan tugas-tugas dinas itu.

Direktorat Bahasa dan Kesusastraan mempunyai tugas (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek, terjemahan, dan kepustakaan; (2) mengadakan penyelidikan dan penelitian setempat, seminar, simposium, dan musyawarah sebagai bahan untuk memperlancar tugas, yang dapat diselenggarakan bersama-sama dengan instansi-instansi di dalam lingkungan departemen dan badan organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (3) membantu mempertinggi mutu pengetahuan dan penguasaan bahasa asing, menerjemahkan hasil sastra dan unsur-unsur kebudayaan lainnya, baik dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa daerah ke dalam bahasa asing atau sebaliknya; (4) memberikan bantuan, keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang masalah yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah serta asing kepada instansi di dalam lingkungan departemen dan badan-badan, atau organisasi-organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (5) menyelenggarakan penerbitan dan mengabadikan hasil penyelidikan dan penelitian untuk kepentingan usaha pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada khususnya untuk kepentingan bangsa dan negara umumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, terutama, ialah penyebaran informasi tentang ejaan. Pada bulan Juni 1967 Panitia Ejaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berkunjung ke Malaysia atas undangan Pemerintah Malaysia dalam rangka penyebaran dan pengembangan ejaan baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 27 September 1967 Panitia juga turut serta dalam diskusi tentang ejaan yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pada tanggal 29 Oktober 1967 diselenggarakan ceramah mengenai ejaan yang dihadiri guru-guru SMP dan

SMA di Yogyakarta. Pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1969, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan ikut dalam diskusi ejaan baru bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Peningkatan informasi mengenai ejaan bahasa Indonesia ini tidak hanya berlangsung di pusat. Di daerah pun dilaksanakan penerangan tentang ejaan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan Cabang Ujung Pandang atas prakarsa Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Pameran dokumentasi bahasa dan sastra diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 5 November 1967. Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-40, pada tanggal 11 sampai dengan 18 November 1968--bersamaan dengan pembukaan Taman Ismail Marzuki--Direktorat Bahasa dan Kesusastraan menyelenggarakan pameran dokumentasi sastra Indonesia modern.

Bersama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Ikatan Linguistik Indonesia, dan IKIP Jakarta, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan menyelenggarakan Seminar Bahasa Indonesia pada tanggal 26--28 Oktober 1968 di Jakarta. Seminar ini membicarakan masalah standardisasi, tata bahasa, dan penggunaan bahasa. Pemakalah seminar itu ialah Prof. S. Takdir Alisjahbana, S.H., Drs. Anton M. Moeliono, M.A., A. Latief, M.A., Dr. Samsuri, Drs. M. Ramlan, Djoko Kentjono, M.A., Drs. Umar Junus, Drs. A.M. Affandi, Hassan Ahmad (Malaysia), Drs. M.S. Hutagalung, dan Drs. Harimurti Kridalaksana. Hasil seminar itu telah diterbitkan oleh Nusa Indah, Ende, 1971, dengan judul *Seminar Bahasa Indonesia 1968.*

Beriringan dengan diselenggarakan seminar itu, diadakan diskusi tentang kritik sastra pada tanggal 31 Okktober 1968 di Balai Budaya Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan atas dasar kerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Dewan Kesenian Jakarta. Makalah yang berjudul "Tentang Kritik Sastra: Sebuah Pendirian Lagi" dari Direktorat Bahasa dan Kesusastraan dibawakan oleh Drs. S. Effendi. Makalah dari Dewan Kesenian Jakarta dibawakan oleh Arief Budiman dan Goenawan Mohamad dengan judul "Tentang Kritik Sastra." Makalah dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang berjudul "Pendirian

atas Pendirian tentang Kritik Sastra" dibawakan oleh Drs. J.U. Nasution.

Dalam usaha peningkatan mutu pengetahuan para pegawainya, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan menyelenggarakan kursus-kursus bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Arab dengan memanfaatkan tenaga Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, yaitu A.M. Almatsier, A. Latief, M.A., Dra. Saodah Nasution, Dra. S.W. Rujiati Mulyadi, Hermanu Maulana, dan Drs. Muhadjir. Majalah *Bahasa dan Budaya* yang terhenti terbit sejak tahun 1963, mulai diterbitkan lagi tahun 1967 dalam bentuk stensilan dengan nama baru *Bahasa dan Kesusastraan.*

Penerbitan hasil kegiatan kebahasaan dan kesastraan meliputi *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cetakan IV oleh W.J.S. Poerwadarminta (1966) majalah dua bulanan *Bahasa dan Kesusastraan* (1967), *Bahasa dan Kesusastraan Seri Khusus* No. I, *Pagar Kawat Berduri* oleh Drs. M. Saleh Saad (1968), "Drama Usmar Ismail Api" oleh Drs. S. Effendi (1968), No. II *Memahami dan Menikmati Puisi* oleh Drs. E. Hutagalung (1968), No. III *Hikayat Bulan Berbelah* oleh Dra. S.W. Rujiati Mulyadi (1968), *Kritik Sastra* oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan bersama Dewan Kesenian Jakarta (1968), *Pameran Dokumentasi Indonesia Modern* oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan dan Dewan Kesenian Jakarta dengan bantuan IKAPI (1968), *Prasasti Baru Radja Ragadjaja* oleh Ketut Ginarsa (1968), *Arti Dongeng Bali dalam Pendidikan terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia* oleh Tim Riset Cabang Direktorat Bahasa dan Kesusastraan Makassar (1968), *Tembang Macapat, Timbulnya, Daerah Pemakaian serta Penyebarannya* oleh Drs. Sardjono H.A. (1968).

# 7

# LEMBAGA BAHASA NASIONAL

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mashuri, S.H. tahun 1969 No. 034/1969, mulai tanggal 24 Mei 1969 nama Direktorat Bahasa dan Kesusastraan diganti menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Secara struktural, lembaga ini berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dra. S.W. Rujiati Mulyadi diangkat sebagai Kepala Lembaga Bahasa Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 035/1969. Namun, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1970, Kepala Lembaga Bahasa Nasional dijabat oleh Drs. Lukman Ali karena Dra. S.W. Rujiati Mulyadi bertugas di luar negeri (Leiden).

*Dra. S.W. Rujiati M.*

Lembaga Bahasa Nasional mempunyai tugas (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek, terjemahan, dan kepustakaan; (2) mengadakan penelitian setempat, seminar, simposium, dan musyawarah bersama-sama instansi lain dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan badan dan organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (3) memberikan bantuan,

keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai masalah bahasa dan sastra Indonesia serta daerah kepada instansi di lingkungan departemen dan badan atau organisasi masyarakat atas perorangan, baik di dalam maupun di luar negeri; (4) menyelenggarakan penerbitan dan penyebaran hasil penelitian untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada khususnya serta bangsa dan negara Indonesia pada umumnya; (5) menyelenggarakan ketatausahaan selengkapnya; serta (6) memberi saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan demi kesempurnaan tugas pokok.

Tugas tersebut dilaksanakan oleh bidang sesuai dengan ruang lingkup masalahnya. Bidang itu ialah (a) Bidang Bahasa Indonesia, dikepalai oleh Drs. S. Effendi; (b) Bidang Sastra Indonesia, dikepalai oleh Drs. Lukman Ali; (c) Bidang Bahasa dan Sastra Daerah, dikepalai oleh Drs. Koentamadi; (d) Bidang Perkamusan dan Peristilahan, dikepalai oleh Dra. Sri Sukesi Adiwimarta; (e) Bidang Penerjemahan, dikepalai oleh A.M. Almatsier; dan (f) Sekretariat, dikepalai oleh Dra. Sri Sukesi Adiwimarta.

Kelima bidang dan sekretariat tersebut masing-masing mempunyai lima seksi yang dikepalai oleh seorang kepala seksi.

Karena tugas pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra nasional makin luas, dengan surat keputusan tanggal 1 Mei 1970, No. 038/1970, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan pembentukan kembali cabang Lembaga Bahasa Nasional. Cabang tersebut ialah Cabang I di Singaraja, Cabang II di Yogyakarta, dan Cabang III di Makasar. Cabang I Singaraja dikepalai oleh Drs. I Gusti Ngurah Bagus, Cabang II Yogyakarta dikepalai oleh Drs. Mudjanattistomo, dan Cabang III Makasar dikepalai oleh Ahmad Rahman.

Kegiatan Lembaga Bahasa Nasional di antaranya ialah sebagai berikut.

### a. Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan Lembaga Bahasa Nasional, antara lain, ialah sebagai berikut. (1) Penelitian tentang pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMP dan SMA Jakarta pada bulan Februari--

Mei 1970 merupakan tindak lanjut penandatanganan naskah kerja sama antara Lembaga Bahasa Nasional (diwakili oleh Drs. Lukman Ali) dan Direktorat Pendidikan Menengah Umum (diwakili oleh Drs. Waskito T.S.) pada tanggal 29 Januari 1970. Penelitian itu dilakukan oleh sebuah tim, Drs. Lukman Ali sebagai Ketua Umum. (2) Penelitian tentang soal ujian bahasa Indonesia SMP dan SMA tahun 1950--1967 untuk mengetahui isi, organisasi, dan ragam bentuk ujian. Penelitian itu dilakukan oleh Drs. S. Effendi dan Drs. Farid Hadi pada tahun 1972. Hasilnya diterbitkan sebagai nomor khusus majalah *Bahasa dan Kesusastraan.* (3) Penelitian tentang imbuhan dalam bahasa Indonesia tertulis mendeskripsikan bentuk, distribusi, fungsi, dan maknanya melalui telaah data dari sumber buku cerita sastra, kumpulan puisi, pepatah, majalah ilmu sastra, dan surat kabar. Penelitian itu dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas Drs. S. Effendi (ketua), Drs. Zulkarnain (sekretaris/anggota), Djoko Kentjono, M.A., Drs. Sjahrul Sjarif, Drs. Farid Hadi, dan Dra. Ria Djuhariah (para anggota) dalam rangka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, tahun 1973/1974.

**b. Penyusunan**

Penyusunan yang telah dilakukan oleh Lembaga Bahasa Nasional ialah sebagai berikut. (1) Penyusunan antologi yang berisi sejumlah sajak perjuangan dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas Dr. H.B. Jassin, Dra. S.W. Rujiati Mulyadi, Drs. Lukman Ali, Dra. Anita K. Rustapa, Drs. Djajanto Supraba, dan Lukman Hakim. Antologi itu diberi judul "Aku" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Trisno Sumardjo, Bibsy Sunharjo, dan Moh. H. Salleh, M.A. (2) Penyusunan naskah "Daftar Pustaka" memuat informasi tentang buku dan artikel yang membicarakan atau bertalian dengan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Penyusunan itu dilakukan oleh sebuah tim pada tahun 1972/1973 dalam rangka memperlengkapi daftar pustaka yang telah ada. (3) Penyusunan naskah "Pedoman Pengajaran Bahasa Indonesia" menjelaskan, antara lain, perspektif pengajaran bahasa, cara mengorganisasi komponen pengajaran kemampuan bahasa, pengalaman belajar yang diperlukan anak didik, dan cara

mengevaluasi hasil belajar anak didik. Penyusunan itu dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Drs. S. Effendi, dengan anggota Dr. Mulyanto Sumardi, Djoko Kentjono, M.A., Drs. Muhadjir, Drs. Basuki Suhardi, Abdul Latief, M.A., Drs. Djajanto Supraba, dan Dra. Yayah B. Lumintaintang pada tahun 1973/1974.

**c. Pertemuan**

Dalam upaya pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra nasional, Lembaga Bahasa Nasional menyelenggarakan pertemuan kebahasaan dan kesastraan. Pertemuan itu antara lain sebagai berikut.

*Ceramah*

Ada dua ceramah, yaitu yang berjudul (1) "Penelitian Kesusastraan Daerah" oleh Ajip Rosidi diselenggarakan atas kerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-42, 28 Oktober 1970; dan (2) "Bahasa Indonesia dalam Pendidikan dan Pengajaran," disampaikan oleh Drs. S. Effendi pada tanggal 29 Oktober 1970.

*Diskusi*

Dua diskusi diselenggarakan, yaitu (1) Bahasa untuk Guru-Guru SMP dan SMA di Jakarta pada bulan Oktober 1971 bekerja sama dengan Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama Jakarta Raya dan Institut Agama Islam Negeri Jakarta. Dalam diskusi itu dibahas kertas kerja "Tentang Mengarang dan Apresiasi Puisi di SMP dan SMA" oleh Drs. S. Effendi dari Lembaga Bahasa Nasional, "Kata-kata Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Arab," oleh Drs. Sudarno dari Institut Agama Islam Negeri Jakarta, dan dua kertas kerja tanggapan masing-masing oleh Drs. Bakran Jacob dan Drs. Ramli Harun. (2) Diskusi Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Guru-Guru SMP pada bulan Mei 1972, bekerja sama dengan Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama Jakarta. Diskusi itu membahas kertas kerja "Identifikasi Tujuan Kurikuler Pengajaran Bahasa Indonesia di SMP" oleh Drs. S. Effendi.

*Seminar/Simposium*

Pada masa Lembaga Bahasa Nasional telah diselenggarakan seminar, simposium, dan sarasehan. (1) Seminar Bahasa Indonesia di Puncak Pass pada tanggal 2--3 Maret 1972 yang menghasilkan kesimpulan bahwa pembakuan bahasa perlu dilaksanakan guna mengatasi kekurangan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa kebudayaan, ilmu, dan teknologi modern. Atas dasar seminar itu Pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1972 menetapkan bahwa mulai tanggal 17 Agustus 1972 berlaku tata cara penulisan bahasa Indonesia menurut Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972. (2) Seminar Bahasa Daerah (Bali, Sunda, Jawa) di Yogyakarta, pada tanggal 1--5 November 1973. (3) Seminar Tata Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia di Pacet, Cipanas pada tanggal 18--22 Februari 1974. (4) Praseminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta, pada tanggal 29--31 Oktober 1974. (5) Seminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta, pada tanggal 25--28 Februari 1975. (6) Simposium Peristilahan pada tanggal 2--3 Desember 1972 di Jakarta. Simposium itu diselenggarakan bersama antara Lembaga Bahasa Nasional, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, IKIP Jakarta, LIPI, dan Dewan Kesenian Jakarta dengan bantuan Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (7) Sarasehan Ejaan Bahasa Jawa di Yogyakarta, Bahasa Sunda di Bandung, dan Bahasa Bali di Singaraja.

*Sidang Majelis Bahasa*

Kerja sama kebahasaan bersama Malaysia dilakukan dalam wadah Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Sidang MBIM diselenggarakan pertama di Kuala Lumnpur pada tanggal 26--30 Desember 1972. Sidang MBIM itu selanjutnya diselenggarakan setahun dua kali dengan tempat persidangan berganti-ganti di Indonesia dan di Malaysia.

Selain menyelenggarakan pertemuan kebahasaan dan kesastraan, Lembaga Bahasa Nasional aktif mengikuti pertemuan kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh pihak lain, antara lain sebagai berikut. (1) Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar

yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Dasar, Prasekolah, dan Pendidikan Luar Biasa di Jakarta pada bulan Maret 1970, Lembaga Bahasa Nasional menyampaikan kertas kerja "Apresiasi Sastra Indonesia di Sekolah Dasar" oleh Drs. S. Effendi. (2) Lokakarya Penyusunan Kurikulum yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (sekarang Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan) pada tahun 1971--1973 dalam rangka pelaksanaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan di delapan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam kegiatan itu Drs. S. Effendi mewakili Lembaga Bahasa Nasional.

### d. Penerbitan

Dalam rangka penyebarluasan informasi tentang bahasa dan sastra, Lembaga Bahasa Nasional menerbitkan majalah dalam bentuk stensil berjudul *Lembaga* yang disebarkan kepada guru. Majalah tersebut khusus berisi tulisan-tulisan mengenai pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pimpinan umum majalah ini ialah Drs. Lukman Ali, dengan Drs. S. Effendi sebagai ketua redaksinya.

### e. Peningkatan Ketenagaan

Dalam rangka peningkatan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan, Lembaga Bahasa Nasional menyelenggarakan penataran dan pemberian kesempatan karyawan belajar. (1) Penataran Leksikografi di Tugu, Bogor pada tanggal 9 Juni--4 Agustus 1974; lima orang peserta penataran terbaik dipilih untuk melanjutkan belajar linguistik leksikografi di Universitas Leiden, Negeri Belanda selama 8 bulan. (2) Pemberian kesempatan kepada para karyawan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang profesinya masing-masing, dengan memberikan kesempatan belajar/mengajar, baik di dalam maupun di luar negeri, ikut secara aktif dalam kegiatan-kegiatan seminar, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Nasional maupun oleh instansi lain.

Lembaga Bahasa Nasional itu kemudian berubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam rangka pelaksanaan reorganisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 tahun 1974, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 tahun 1975.

# BAGIAN KEDUA
# PUSAT BAHASA

# 1

# GERAK DAN LANGKAH PUSAT BAHASA

Kegiatan kebahasaan dan kesastraan lebih mendasar dan menyeluruh dengan melibatkan tokoh dari berbagai kalangan. Pada tanggal 28--31 Oktober 1974, misalnya, telah diselenggarakan Praseminar Politik Bahasa Nasional yang merumuskan kerangka dasar kebijakan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan. Pada saat itu telah disepakati bahwa kerangka dasar kebijakan bahasa nasional ialah satu kesatuan kebijakan yang dijalin oleh pengolahan tiga kelompok masalah, yaitu (1) masalah pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa Indonesia, (2) masalah pembinaan, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa daerah (terutama bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakat pemakainya), (3) masalah pemakaian dan pengajaran bahasa asing.

Keputusan Praseminar Politik Bahasa Nasional tersebut segera ditindaklanjuti, yaitu mengisi kerangka dasar kebijakan bahasa nasional itu dengan menyelenggarakan Seminar Politik Bahasa Nasional pada tanggal 25--28 Februari 1975. Seminar itu (1) merencanakan dan merumuskan isi kerangka dasar kebijakan bahasa nasional, (2) merumuskan dan menyusun ketentuan dan garis kebijakan umum mengenai penelitian, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa dan sastra, serta (3) menyusun rencana umum pengembangan kebijakan bahasa nasional.

Dari dua kegiatan seminar yang melibatkan tokoh bahasa dan sastra serta budayawan dan tokoh lain tersebut, makin jelas tampak betapa luas dan besar tugas lembaga yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Maka, sejak 17 April 1975 lembaga yang bertugas menangani masalah kebahasaan dan kesastraan itu bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 tahun 1975.

**a. Kebijakan Bahasa Nasional**

Pada tahun kelahirannya itu juga, Pusat Bahasa telah mengeluarkan dua pedoman yang amat populer sebagai upaya pembakuan bahasa Indonesia. Pertama, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* sebagai pegangan masyarakat dalam pembakuan sistem tulis bahasa Indonesia. Kedua, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* merupakan panduan dalam pengembangan peristilahan bahasa Indonesia. Gerak dan gema Pusat Bahasa makin memasyarakat ke berbagai lapisan masyarakat sejak Pusat Bahasa melakukan kampanye penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama sejak dicanangkannya bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa tahun 1980. Semua itu berada di bawah pimpinan Prof. Dr. Amran Halim. Apa kata Kepala Pusat Bahasa yang pertama itu? Berikut pandangan yang melandasi pemikirannya dalam memimpin Pusat Bahasa.

## PUSAT NASIONAL PENGEMBANGAN BAHASA

**Amran Halim**
Kepala Pusat Bahasa 1975--1984

Pusat Bahasa merupakan lembaga lanjutan Lembaga Bahasa Nasional, Pusat Bahasa lahir dan bergerak atas dasar tiga pokok pikiran yang utama. Pokok pikiran pertama adalah bahwa masalah kebahasaan di Indonesia merupakan satu jaringan yang menyeluruh yang dijalin oleh unsur-unsur kebahasaan yang ada di Indonesia, yaitu (1) bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa

persatuan (bahasa nasional) maupun sebagai bahasa negara, (2) bahasa daerah, dan (3) bahasa asing yang digunakan atau diajarkan di sekolah serta bahasa asing yang digunakan tetapi tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Semua bahasa itu tumbuh dan digunakan di dalam masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan kebahasaan yang pada tahun 1970-an disebut Politik Bahasa Nasional. Ini merupakan inti fungsi Pusat Bahasa yang mula-mula direncanakan lahir dengan nama Pusat Nasional Pengembangan Bahasa.

Pokok pikiran yang kedua adalah bahwa yang diperlukan dalam masyarakat Indonesia adalah pembinaan sikap yang positif, sikap yang dapat diandalkan terhadap bahasa Indonesia, sikap yang dapat diandalkan terhadap bahasa daerah, dan sikap terhadap penggunaan bahasa asing di Indonesia. Sikap yang perlu dibina itu adalah sikap yang sejalan dengan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, yaitu sikap yang menempatkan bahasa Indonesia pada kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Indonesia, yang digunakan dengan rasa kebanggaan, rasa keyakinan bahwa bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu. Pada waktu yang sama ia dapat dijadikan alat komunikasi, alat pemerintahan, alat pengembangan perencanaan dan pembangunan, dan alat pengembangan serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap terhadap bahasa daerah juga perlu dibina sesuai dengan amanat penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bahasa daerah perlu dihargai oleh masyarakat pemakainya dengan (sekurang-kurangnya) dua cara, yaitu (1) digunakannya dengan rasa bangga dan (2) digunakannya dengan keyakinan bahwa bahasa daerah mempunyai hak hidup karena bahasa daerah adalah penyandang budaya daerah yang terkait erat dengan pengembangan dan kehidupan kebudayaan nasional.

Sikap terhadap penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan Belanda, yang diperlukan adalah sikap yang menentukan bahwa bahasa asing tertentu, seperti bahasa Inggris adalah bahasa asing yang diperlukan untuk komunikasi internasional, untuk kepentingan hubungan pemerintahan dengan bangsa-bangsa lain, untuk kepentingan ekonomi, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai sikap terhadap penggunaan bahasa asing itu melebihi kadar kebanggaan

dalam sikap penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ini adalah pokok pikiran yang pertama yang melandasi lahirnya dan gerak Pusat Bahasa. Dengan kata lain, di samping pokok pikiran, bahwa keseluruhan masalah kebahasaan di Indonesia merupakan satu jaringan, pokok pikiran yang kedua adalah diperlukan pembinaan sikap terhadap bahasa-bahasa itu. Untuk mencapai sasarannya, bahasa Indonesia, bahasa daerah tertentu, perlu dikembangkan supaya bahasa Indonesia terutama dapat berfungsi sebagai bahasa pemerintahan, bahasa nasional, dan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi di samping bahasa pendukung sastra sebagai unsur budaya nasional.

Pokok pikiran yang ketiga adalah bahwa jaringan kebahasaan di Indonesia serta pembinaan sikap terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan terhadap penggunaan bahasa asing, serta pengembangan bahasa Indonesia dari sudut kosakata/istilah misalnya, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, Pusat Bahasa sejak berdiri mengembangkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia kebahasaan dengan menyelenggarakan penataran yang bertahap dan berkelanjutan. Bertahap berarti bahwa penataran itu dilakukan dengan membagi-bagi bidang kebahasaan menjadi, misalnya, bidang sintaksis, morfologi, sosiolinguistik, historis komparatif, dan dialektologi. Berkelanjutan mempunyai pengertian bahwa penataran dilakukan di Indonesia, diprogramkan untuk jangka pendek tiga bulan sampai satu tahun, lalu berkelanjutan dengan pendidikan di luar negeri, yaitu di negeri Belanda.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dimungkinkan karena pada waktu itu diadakan program kerja sama dengan Belanda melalui Universitas Leiden dengan lahirnya *Indonesian Linguistics Development Project (ILDEP)*. Karena masalah bahasa di Indonesia adalah masalah nasional tentu tidaklah mungkin bagi Pusat Bahasa menyediakan semua sumber daya manusia yang diperlukan itu. Oleh karena itu, penataran yang dilaksanakan dialamatkan kepada bukan hanya tenaga teknis Pusat Bahasa melainkan juga tenaga pengajar pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan cara ini Pusat Bahasa memperoleh dua manfaat dari sudut sumber daya manusia. Manfaat yang pertama adalah kualitas tenaga teknis intern Pusat Bahasa sendiri

meningkat. Yang kedua Pusat Bahasa memiliki tenaga yang dapat diharapkan membantu di dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan tugas Pusat Bahasa di seluruh Indonesia. Dengan jalan melibatkan tenaga pengajar pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan dengan memberikan penataran khusus yang intensif untuk tenaga teknis Pusat Bahasa sendiri.

Dalam kaitan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya serta pengembangan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya Pusat Bahasa juga bekerja sama dengan memperoleh bantuan dari Pemerintah Belanda dalam bentuk tenaga ahli dan konsultan dari Amerika Serikat, dan dari Inggris melalui British Council. Tenaga-tenaga dari British Council membantu Pusat Bahasa di dalam pengembangan pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Luasnya bidang garapan yang dipercayakan kepada Pusat Bahasa menuntut adanya kelengkapan adanya Pusat Bahasa yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, Pusat Bahasa disusun dengan struktur yang mencakup bidang-bidang pengembangan bahasa Indonesia, pembinaan sastra Indonesia, bahasa daerah, pengembangan pengajaran bahasa asing, dan perkamusan. Selain itu, Pusat Bahasa juga dibangun dengan kelengkapan utama, yaitu perpustanaan kebahasaan yang lengkap. Kelengkapan buku dan bahan kepustakaan Pusat Bahasa dimungkinkan dengan adanya bantuan dari Yayasan Ford, Amerika Serikat. Selain itu, Pusat Bahasa juga dibangun dengan kelengkapan Laboratorium Fonetik. Laboratorium Fonetik ini dibutuhkan untuk meneliti dan mengembangkan ragam lisan bahasa Indonesia.

Sesuai dengan fungsinya yang menyeluruh itu, Pusat Bahasa mendapat kepercayaan dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk juga bertugas mewakili Indonesia *Governing Board SEAMEO-RELC* di Singapura dari tahun 1972--1984/1985. Kedudukan ini sangat menguntungkan bagi Pusat Bahasa karena dengan berfungsi sebagai anggota *Governing Board SEAMEO-RELC* di Singapura, Pusat Bahasa mendapat kehormatan dan kepercayaan pula untuk memilih, menyeleksi tenaga kebahasaan, untuk dikirimkan mengikuti program latihan SEAMEO-RELC di Singapura. Yang diseleksi adalah calon-calon dari seluruh Indonesia dari lingkungan

Pusat Bahasa sendiri termasuk balai-balainya yang ada di Yogyakarta, Denpasar, dan Ujung Pandang, serta dari lingkungan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Malah SEAMEO-RELC akhirnya juga berkembang dari RELC yang mula-mula merupakan singkatan dari *Regional English Language Centre* berkembang menjadi *Regional Language Centre* dengan mempertahankan singkatannya, yaitu RELC.

Dengan kedudukan seperti itu, Pusat Bahasa memiliki pandangan yang menyeluruh mengenai kebahasaan di seluruh Indonesia. Selain itu, Pusat Bahasa juga memiliki keleluasan mengembangkan gerak dan usahanya sehingga dengan dukungan berbagai-bagai pihak, terutama Menteri Pemuda dan Olahraga, ditetapkan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa sejak tahun 1980. Dengan demikian, kegiatan kebahasaan menjadi terpusat dalam bulan Oktober itu di seluruh Indonesia dengan melibatkan bukan hanya Pusat Bahasa beserta perguruan tinggi, melainkan juga lembaga-lembaga daerah mulai dari Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Tingkat II, instansi-instansi terkait, seperti sekolah menengah, SLTP dan SMU, baik siswanya maupun para gurunya.

Hal-hal ini sangat menentukan dalam usaha kita memasyarakatkan (1) perlunya sikap terhadap bahasa Indonesia, terhadap bahasa daerah, dan terhadap pemakai bahasa asing itu dibina secara terus-menerus, menyeluruh, dan terpadu. Selain itu, Pusat Bahasa juga memperoleh peluang meyakinkan berbagai-bagai pihak bahwa pembentukan istilah perlu dikembangkan secara nasional. Oleh karena itu, pada tahun 1972 sebelum Pusat Bahasa lahirnya yaitu pada tahun 1975 dibentuklah Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia yang merupakan lembaga mitra Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia untuk menjalankan kegiatan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Kegiatan ini melibatkan tenaga dari berbagai perguruan tinggi bidang keilmuan. Dengan demikian, tata istilah berbagai ilmu pengetahuan di Indonesia ini telah dikembangkan bukan oleh tenaga Pusat Bahasa sendiri, melainkan juga dengan kerja sama dengan berbagai-bagai pihak yang melibatkan berbagai-bagai pakar dan mewakili berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan.

b. Sarana dan Tenaga Kebahasaan

Upaya ke arah pengembangan dan pembakuan bahasa Indonesia tersebut dilanjutkan pada bidang tata bahasa dan kosakata. Maka, lahirlah dua sarana pembakuan yang amat penting dalam sejarah ketatabahasaan dan perkamusan Indonesia setelah karya Sutan Takdir Alisjahbana dan W.J.W.Poerwadarminta, yaitu *Tata Bahasa Baku Indonesia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pada tahun 1998. Upaya pengembangan, pembakuan, dan pemasyarakatan bahasa Indonesia serta pelestarian bahasa daerah memerlukan tenaga kebahasaan dan kesastraan yang andal. Untuk itulah, Pusat Bahasa meningkatkan mutu tenaga kerja melalui pendidikan formal pada jenjang magister dan doktor.

Kelahiran dua karya tata bahasa dan kamus serta peningkatan mutu akademik tenaga kebahasaan dan kesastraan baik di Pusat Bahasa maupun di luar Pusat Bahasa berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Anton M. Moeliono. Apa penuturan Kepala Pusat Bahasa yang kedua mengenai itu? Ikutilah pandangan dan pemikirannya dalam uraian berikut.

## PERANAN PUSAT BAHASA YANG BERWIBAWA DI MASA MENDATANG

**Anton M. Moeliono**
Kepala Pusat Bahasa 1984--1989

Setelah Lembaga Bahasa Nasional berhasil meluncurkan pembakuan ejaan bahasa Indonesia (EYD) pada tahun 1972, lembaga itu sejak 1985 berusaha melanjutkan kegiatan pembakuannya demi kemantapan bahasa Indonesia yang dinamis. Maka, pada tahun 1988, diterbitkan edisi pertama *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Buku tata bahasa itu, edisi keduanya diedarkan pada tahun 1993, sedangkan edisi ketiganya terbit pada tahun 1998 berkenaan dengan

Kongres Bahasa Indonesia VII. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* juga dilengkapi dan edisi keduanya diterbitkan pada tahun 1991.

Di dalam periode 1984--1989 di kalangan Pusat Bahasa muncul kesadaran bahwa suatu pusat nasional tidak dapat berwibawa jika sumber daya manusianya tidak ditingkatkan tarafnya. Oleh karena itu, Proyek Indonesian Linguistics Development Project (ILDEP) II sebagai lanjutan Proyek ILDEP I (1979--1985) dipersiapkan dan dimatangkan.

Sasaran umum program ILDEP II ialah perbaikan infrastruktur di bidang studi bahasa dan susastra yang mencakupi pengembangan sumber daya manusia pada tingkat pascasarjana lewat beasiswa, bimbingan, dan pertemuan ilmiah, serta pengadaan fasilitas penelitian dalam bentuk buku, majalah, dan penerbitan naskah.

Jika diperinci dapat disebutkan ilmu bidang kegiatan yang berikut.

1) Penyeliaan dan pembimbingan peserta program pascasarjana di Indonesia dan Nederland.
2) Penyelenggaraan penataran dan kursus penyegar tentang berbagai bidang linguistik dan ilmu susastra, serta pengiriman peserta ke berbagai konferensi ilmiah.
3) Pengembangan perpustakaan Pusat Bahasa dan ketiga cabangnya lewat pengadaan buku dan majalah, dan pendidikan perpustakaan.
4) Penyebaran sumber informasi ilmiah dalam berbagai bentuk seperti penerjemahan telaah bahasa asing, penerbitan disertasi pakar Indonesia.
5) Perancangan dan pengembangan program otomasi untuk kosakata kamus, buku pedoman, dan bahan ajar, serta katalog perpustakaan yang berotomasi.

Peningkatan tenaga kader telah menghasilkan 44 orang doktor yang terdiri atas (1) 8 orang doktor di lingkungan Pusat Bahasa, (2) 12 orang doktor yang berasal dari 7 IKIP, (3) 24 doktor yang berasal dari 10 universitas. Pada tingkat strata$_2$ telah dihasilkan 29 orang magister yang terdiri atas (1) 20 orang magister di lingkup Pusat Bahasa, (2) 8 orang magister yang berasal dari dua universitas, dan (3) 1 orang magister yang berasal dari Pemerintah Derah Irian Jaya.

Pada tingkat strata$_1$ telah dihasilkan 11 orang sarjana dari bagian tata usaha dan perpustakaan di Pusat Bahasa.

Di bidang publikasi telah diterbitkan 65 jilid buku, yang masing-masing bertiras antara 1.000--3.000 eksemplar. Selanjutnya, dirintis penerbitan Seri Pustaka Pengajaran Bahasa atas kerja sama dengan Regional Language Center SEAMEO di Singapura. Hingga akhir proyek ILDEP II dihasilkan lima jilid. Kerja sama dengan Australian National University, di Canbera, membuahkan seri *Materials in Language in Indonesia* yang berjumlah kira-kira 50 jilid buku.

Untuk perpustakaan tersedia dana NF 60.000,00 untuk pengadaan buku dan majalah. Kira-kira tiga ribu buku dapat ditambahkan pada khazanah perpustakaan pusat dan cabang. Untuk tujuan otomasi dibeli 3 komputer, 2 printer, beserta aksesorinya; untuk katalogisasi dibeli peranti lunak yang diadaptasi kepada kebutuhan perpustakaan sebagaimana dirumuskan oleh Perpustakaan Nasional dan Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia.

Bahasa Indonesia yang menjadi medium pendidikan dan ilmu pengetahuan perlu dimasyarakatkan dan dikembangkan daya ungkapnya. Pemasyarakatan itu bertalian dengan penghapusan keniraksaraan yang masih mendekati 20 persen dari penduduk. Di daerah tertentu dan di antara golongan tertentu keniraksaraan mengendalai dengan jelas pemerataan kesempatan untuk maju. Karena terdapat korelasi antara keniraksaraan dan kemampuan bahasa Indonesia, pembangunan dan pemodernan masyarakat sangat bergantung kepada berhasil tidaknya pemasyarakatan bahasa Indonesia, baik dalam ragam tulis maupun ragam lisan.

Peningkatan keefisienan dan keefektifan bahasa Indonesia sebagai wahana pengetahuan dan sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa bertalian dengan pengembangan kosakata teknis dan peristilahan. Jumlah istilah yang beratus ribu yang telah direkacipta harus disalurkan masuk ke sistem pendidikan lewat penerbitan glosarium dan kamus bidang ilmu. Selama istilah hanya terdapat di dalam bank

data, kesimpangsiuran pemakaian istilah oleh pakar Indonesia akan berlanjut. Akibatnya, orang akan merasa lebih aman memakai istilah asing.

Di bidang leksikografi makin terasa perlunya penerbitan tesaurus yang dengan cermat dapat memerikan nuansa makna berbagai sinonim dan akronim sehingga lambat-laun dapat dihilangkan prasangka bahwa bahasa Indonesia bahasa yang miskin yang takkan mampu bersaing dengan bahasa modern lain di dunia. Di samping itu, sejumlah bahasa daerah yang jumlah penuturnya di atas satu juta orang menuntut penyusunan buku tata bahasanya yang lengkap dan kamus dwibahasa Indonesia-Daerah dan sebaliknya yang memadai demi tujuan kohesi nasional.

Perkembangan kebudayaan dan peradaban modern di dalam berbagai bidangnya, seperti ilmu, teknologi, dan seni akan dapat diikuti dengan lebih baik jika didukung oleh tersedianya kepustakaan yang terjangkau. Di samping berangan para ahli Indonesia, masih banyak lagi informasi khusus yang tersimpan dalam bahasa asing yang hanya terbuka bagi orang yang memahami bahasa asing itu. Oleh karena itu, di dalam garis haluan kebijakan kebahasaan untuk masa mendatang usaha penerjemahan harus menempati skala prioritas yang tinggi.

### c. Kebijakan Sastra

Gerak dan langkah serta gaung pembinaan dan pengembangan bahasa memang telah menyusuri wilayah republik ini. Berbeda halnya dengan sastra, upaya pemasyarakatan dan apresiasi sastra di kalangan masyarakat luas seolah-olah belum seperti upaya yang telah dilakukan terhadap bahasa. Maka, gerakan pemasyarakatan sastra makin digencarkan pada tahun 1989. Bulan Bahasa yang diselenggarakan setiap bulan Oktober sejak 1980 diubah namanya menjadi Bulan Bahasa dan Sastra. Gerak langkah Pusat Bahasa pada pemasyarakatan sastra itu dilakukan oleh Kepala Pusat Bahasa Drs. Lukman Ali. Apa kata

Kepala Pusat Bahasa yang ketiga tentang kebijakan pengembangan sastra di Indonesia? Berikut penuturan Drs. Lukman Ali.

## BERAMAH-RAMAHAN DENGAN SASTRA

**Lukman Ali**
Kepala Pusat Bahasa 1989--1991

Sejak saya masuk ke Pusat Bahasa pada tahun 1959--yang pada waktu itu masih bernama Lembaga Bahasa dan Budaya yang tak lama kemudian menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK), saya mulai berkenalan dengan apa yang disebut penelitian sastra.

Jangan dianggap studi sastra waktu itu sudah seperti studi sastra sekarang. Kegiatan penelitian terbatas pada pencatatan karya sastra dalam berbagai "genre": roman (novel), sajak, cerpen, dan drama. Bahan-bahan inilah yang dibicarakan, yang hasilnya dapat disebut *analisis, resensi* dalam rangka pengenalan karya yang dibicarakan kepada pembaca atau peminat sastra. Yang jelas pada waktu itu masyarakat pembaca atau peminat sastra tersebut belum seluas sekarang. Ada kesan seakan-akan publik peminat atau peneliti sastra terbatas pada sedikit orang yang kadang-kadang orangnya itu ke itu saja.

Sebagaimana diketahui, LBK mempunyai satu bagian yang disebut Bagian Kesusastraan. Tokoh yang pertama bertugas di situ ialah H.B. Jassin, di samping W.J.S. Poerwadarminta di Bagian Perkamusan. Jassin, sebelum masuk ke LBK, sebenarnya sudah banyak menulis dan berbicara tentang sastra. Ia sudah dikenal sebagai kritikus sastra. Begitu masuk ke LBK pada tahun 1950-an, ia langsung mengembangkan secara resmi profesinya sebagai kritikus itu. Hal tersebut dilakukannya sejalan dengan tugasnya sebagai dosen Kesusastraan Indonesia Modern di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Mulailah ia menanamkan benih kritik sastra dalam sejumlah kecil mahasiswanya, seperti Bahrum Rangkuti, J.N.

Nasution, M. Saleh Saad, Boen S. Oemarjati, M.S. Hutagalung, Lukman Ali, Faizah Rivai, dan sempat pula membimbing beberapa orang dosen FKIP/IKIP Jakarta seperti Fachrudin Ambo Enre, Mbiyo Saleh, dan Brahim. Selanjutnya, jumlah ini berkembang lagi.

Hasil bimbingan Jassin tampak dalam skripsi-skripsi yang dibuat untuk melengkapi tugas dalam rangka ujian Sarjana Muda Sastra dan Sarjana Sastra (sekarang S1). Dengan melalui seleksi, beberapa skripsi itu sempat diterbitkan. Penerbit yang berminat kepada penelitian sastra itu terutama ialah PT Gunung Agung. Pada saat itu tampak hubungan kerja sama penelitian sastra antara Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan LBK erat sekali. Di LBK tersimpan dokumentasi sastra, baik milik LBK maupun milik pribadi Jassin yang sengaja dibawanya dari rumahnya untuk memudahkan tugasnya sehari-hari, sebagai peneliti dan sebagai dosen. Pada waktu itu dokumentasi sastra Jassin tersebut dapat dikatakan sangat lengkap: buku-buku tentang studi sastra, karya sastra, pembicaraan tentang sastra yang banyak termuat dalam surat-surat kabar, majalah ataupun tulisan-tulisan yang sudah atau belum dipublikasikan.

Kemudian, dokumentasi itu (khususnya milik Jassin dipindahkan ke salah satu bangunan di kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini Raya, Jakarta. Ke Bagian Kesusastraan Modern LBK dan kemudian juga ke Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin (nama ruangan tempat dokumentasi di Cikini itu) banyak berkunjung sastrawan, budayawan, kritikus, guru, mahasiswa, serta peminat lainnya. Semua ingin melihat dan membaca hal-hal yang diperlukan mereka. Ada pula yang datang, terutama pengarang kesusastraan, untuk berbincang-bincang tentang berbagai masalah sastra. Perbincangan dilakukan secara santai disertai senyum, tertawa, merengut, mengepulkan asap dari mulut atau lubang hidung. Duduk pun bebas seperti bersila di atas kursi, lutut naik satu atau keduanya sambil seolah-olah berada di ruangan dapur. Apa yang disebut orang *gossip* atau *rumor* (sebagaimana banyak dipakai sekarang) merupakan hidangan lezat, walaupun di ruang itu tidak disediakan kopi atau minuman lainnya. Pokoknya perbualan berlangsung hangat.

Saya masih ingat Bakri Siregar, Sitor Situmorang, Pramoedya Ananta Toer, Trisno Sumardjo, Wiratmo Sukito, Mh. Rustandi Kartakusuma, Iwan Simatupang, Bahrum Rangkuti, Subagio Sastrowardojo, Asrul Sani, Ajip Rosidi, Ramadhan K.H., Aoh K. Hadimadja, Nur Sutan Iskandar, S. Takdir Alisjahbana (dari angkatan yang lebih tua), dan banyak lagi yang lain, di samping juga dari golongan angkatan yang lebih muda, seperti Taufik Ismail, Arief Budiman, Goenawan Mohamad, Mansur Samin, Bur Rasuanto, A. Bastrani Amin, Arifin C. Nur, D.A. Peransi, dan Bokor Hutasuhut. Semuanya terlibat dalam perdebatan hangat sampai bermerah muka dan telinga. Umpamanya, ada beberapa pengarang yang menuding golongan kritikus yang dianggap hanya sebagai *tukang cencang* yang tidak menemukan hakikat yang sebenarnya setelah sang peneliti membedah karya sastra. Diumpamakan oleh mereka (pengarang), seperti yang dikatakan Goenawan Mohamad bahwa *kritik sastra* seakan menjadi sinonim dari *pisau bedah* dari *anatomi ciptaan* yang mengingatkan kita pada ruangan tempat para profesor berhadapan dengan calon-calon dokter yang berbicara tentang urat-urat, tentang letak tulang-belulang dari sesosok mayat. Para pengarang selama ini menggusari anggapan seakan-akan hasil sastra itu adalah si mayat yang dibawa ke kamar mayat hanya untuk diperiksa-periksa dan dibedah. Hasil sastra yang digotong ke ruang bedah itu seperti barang yang tak punya napas. Lalu bertanya, "*Lho*, di mana nafasku, di mana napasku? (lihat Lukman Ali [ed.], *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*, Gunung Agung, Jakarta, 1967, hal. 176). Golongan pengarang yang juga peneliti, seperti H.B. Jassin, tidak menyetujui pandangan itu. Begitulah anggapan pengarang tentang kritikus.

Masalah sejenis timbul lagi dalam *Diskusi Kritik Sastra* 1968, yang juga masih menimbulkan "perang pendapat" antara pengarang kritikus, terutama tentang ukuran-ukuran atau metode penilaian karya sastra dengan memanfaatkan teori *Ganzheit*, yaitu "keseluruhan kesan yang hidup tentang suatu karya sastra yang hidup bergerak dalam hati kita berguruh atau bergumam, menari-nari atau tinggal diam sepi", seperti dikatakan oleh Arief Budiman dan Goenawan Mohamad (lihat

Lukman Ali [ed.], *Tentang Kritik Sastra, Sebuah Diskusi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1978:4--5).

Masalah kritik sastra ini pun berlanjut terus di kalangan kritikus dan ahli serta peneliti sastra yang akhirnya empat orang dari mereka merumuskan kesamaan pendapat tentang kritik sastra, yaitu M. Saleh Saad, M. S. Hutagalung, Lukman Ali, dan S. Effendi, yang menyatakan bahwa sepatutnya telaah dan kritik sastra berorientasi pada karya sastra sebagai suatu totalitas yang dibangun oleh sejumlah unsur intrinsik yang saling berhubungan secara fungsional dalam mengucapkan amanat tertentu. Pendapat ini sebenarnya mulai diungkapkan dalam *Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia* tahun 1966 dan *Diskusi Kritik Sastra* 1968. Sayang pendapat tersebut belum sempat berkembang. Sementara itu, di luar kelompok itu timbul apa yang disebut sebagai *Aliran Rawamangun*. Penamaan itu sebenarnya bukan berasal dari kelompok empat orang tadi (lihat Abdul Rozak Zaidan, dkk., *Kamus Istilah Sastra*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994:25).

Di kalangan luar Pusat Bahasa berkembang pula pembicaraan tentang pendekatan-pendekatan (aliran) kritik sastra formalisme, strukturalisme, *new-criticism*, *post modernisme*, semiotik, dan lain-lain, yang belum tentu relevan dengan kebutuhan studi sastra Indonesia. Aliran-aliran belum dicerna dengan matang, lalu sebagai eksperimen langsung diaplikasi ke dalam penelitian sastra kita. Demikianlah, kegiatan perbincangan kritik sastra ini tidak lepas dari perhatian Pusat Bahasa, bahkan orang-orang Pusat Bahasalah yang memprakarsai sebagian perbincangan kritik itu bekerja sama dengan badan atau perseorangan di luar Pusat Bahasa.

Pusat Bahasa telah tergugah secara lebih *intens* untuk meneruskan kegiatan pengisian pengembangan sastra Indonesia, baik dalam bidang teori, kritik, maupun sejarah sastra yang dalam kehidupannya selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Setiap kesempatan yang tepat, acara sastra terus ikut serta.

Seperti sudah kita ketahui pula, sebagian di antara pengarang mengeluarkan suatu sikap budaya yang terumus dalam *Manifes Kebudayaan* yang merupakan antipode terhadap sikap budaya *Lekra*

(Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berafiliasi dengan PKI. Manifes kebudayaan menyarankan, antara lain, *kebebasan mencipta*. Dalam hubungan itu, tidak dapat saya lupakan pula bahwa di *Bagian Kesusastraan LBK* naskah *Manifes Kebudayaan* sebelum selesai ditandatangani pernah diperlihatkan H.B. Jassin kepada saya di samping pengarang lainnya. Bagian Kesusastraan yang bertempat di salah satu ruang atas gedung di Jalan Dipenogoro No. 82, Jakarta (bekas sekolah Kristen sebelumnya) kemudian pindah ke Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, menjadi tempat pertemuan tokoh dalam bidang sastra: teoritikus dan kritikus.

Saya menarik kesimpulan bahwa di sini tampak sastra dimesrai dengan kasih sayang sebagai barang berharga yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai hasil keisengan yang bernada "sok" atau "gengsi-gengsian" agar tidak dilihat sebagai "terbelakang". Bukan pula sebagai *mode* yang bertolak dari kepura-puraan. Akan tetapi, sastra adalah kebutuhan untuk pengayaan batin agar dapat lebih bijaksana menghadapi hidup walaupun hal itu belum pernah terpenuhi secara memuaskan, bahkan boleh dikatakan cenderung hanya berupa *utopia*.

Imbas kecintaan kepada sastra itu, sebagaimana yang diperlihatkan secara implisit oleh para pengarang dan peneliti sastra, dapat memberikan dorongan kepada usaha penanaman apresiasi walaupun belum meluas. Ciptaan yang tidak diiringi dengan apresiasi menjadi terpencil seperti pernah lama kita alami, khususnya di kalangan pelajar. Kekurangan dalam kemampuan mengapresiasi itulah yang amat dirasakan oleh Pusat Bahasa. Oleh karena itu, dalam kegiatan *Bulan Bahasa* yang diadakan sekali setahun, sejak tahun 1980, acara sastra diisi, antara lain, dengan kegiatan sayembara mengarang cerpen dan esai, sayembara pementasan drama, dialog pelajar dengan pengarang, dan cerdas-cermat sastra dalam hubungannya dengan penumbuhan apresiasi sastra. Acara ini mendapat perhatian penuh, baik oleh pihak pengarang sebagai ciptawan maupun oleh pelajar, pecinta, pemerhati, dan peneliti.

Dari tahun ke tahun acara tersebut tetap berlangsung dan berkembang sehingga nama *Bulan Bahasa,* sebagai salah satu kegiatan

sastra dalam rangka peringatan *Sumpah Pemuda*, dilengkapi dengan kata *Sastra*. Terjadilah nama kegiatan baru atau kegiatan lama yang diperbaharui: *Bulan Bahasa dan Sastra* mulai tahun 1989 sehingga kegiatan sastra terwadahi secara jelas, tidak hanya *embel-embel* saja di samping kegiatan bahasa.

Dalam bidang penelitian sastra kegiatan berlangsung lancar khususnya yang disalurkan melalui kegiatan proyek, yaitu Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah (Pusat). Hasil-hasil proyek tersebut telah banyak yang diterbitkan. Hal itu menunjukkan bahwa Pusat Bahasa secara berkelanjutan terus melakukan penelitian serta pengembangan sastra.

Demikianlah sekitar catatan tentang kegiatan sastra di Pusat Bahasa mulai dari Lembaga Bahasa dan Budaya sampai Pusat Bahasa sekarang ini. Banyak lagi yang perlu dimasukkan dalam catatan ringkas ini, tetapi untuk buku ini tentu perlu ada pembatasan-pembatasan.

### d. Pemasyarakatan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Pusat Bahasa menyadari sepenuhnya bahwa tugas pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan penertiban penggunaan bahasa asing tidak dapat dilakukan oleh Pusat Bahasa sendiri. Maka, Pusat Bahasa melanjutkan, meningkatkan, dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam rangka pemasyarakatan bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah daerah Pusat Bahasa mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia. Kebijakan penertiban bahasa di tempat-tempat umum dan pencanangan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar oleh Presiden Republik Indonesia 20 Mei 1995 merupakan langkah strategis pemasyarakatan bahasa Indonesia ke segala lapisan masyarakat. Gerakan kesadaran disiplin dalam berbahasa Indonesia itu merupakan kebijakan Dr. Hasan Alwi sebagai Kepala Pusat Bahasa yang keempat. Apa kata Dr. Hasan Alwi mengenai kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa? Inilah penuturannya.

# KERJA SAMA KEBAHASAAN DENGAN PEMDA

**Hasan Alwi**
Kepala Pusat Bahasa 1991--sekarang

Rumusan tentang pembinaan bahasa Indonesia dari GBHN yang satu ke GBHN berikutnya memperlihatkan adanya peningkatan; mulai dari pentingnya pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sampai pada perlu ditingkatkannya upaya pemasyarakatannya sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat. Pada satu sisi, rumusan tersebut amat melegakan hati karena menggambarkan tekad dan kemauan politik yang kuat untuk menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (menurut butir ketiga Sumpah Pemuda 1928) dan bahasa negara (sejalan dengan Pasal 36 UUD 1945) dalam kedudukannya yang kukuh dan mantap. Akan tetapi, pada sisi yang lain rumusan itu juga membersitkan rasa khawatir: apakah Pusat Bahasa siap dan mampu melaksanakan amanat yang terkandung di dalam rumusan tersebut?

Pusat Bahasa memang merupakan instansi pemerintah yang ditugasi merencanakan dan melakukan kegiatan yang secara khusus berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Namun, kekhawatiran yang dimaksudkan di atas tetap mencemaskan, terutama karena amat terbatasnya jumlah tenaga kebahasaan di Pusat Bahasa dan di ketiga balai bahasa yang ada (di Yogyakarta, Ujung Pandang, dan Denpasar) untuk melaksanakan kegiatan pembinaan yang sasarannya diharapkan mencapai seluruh lapisan masyarakat itu.

Berkat adanya instruksi dari dua orang menteri, kekhawatiran dan kecemasan itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Yang pertama adalah instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; ditujukan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II, dan Camat Kepala Wilayah di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1992 tentang Peningkatan Usaha Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa; ditujukan kepada Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Kedua instruksi tersebut dijadikan bahan pertimbangan utama dalam menyampaikan ajakan kepada para gubernur untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan pembinaan bahasa di provinsi masing-masing. Hasilnya benar-benar sangat membesarkan hati. Pusat Bahasa berhasil menandatangani piagam kerja sama dengan 26 gubernur kepala daerah tingkat I di seluruh Indonesia. (Kerja sama dengan Pemda DKI Jakarta telah disepakati pada tanggal 18 Februari 1989, sebelum ada kedua instruksi menteri tersebut.)

Ada tiga butir kegiatan yang dicantumkan di dalam piagam kerja sama itu. Pertama, pelaksanaan penyuluhan sebagai bentuk pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, penertiban pemakaian bahasa asing di tempat umum. Ketiga, bantuan atau dukungan pihak pemda kepada Pusat Bahasa dalam rangka mendirikan balai penelitian bahasa di provinsi yang bersangkutan. Kegiatan yang disebutkan pertama boleh dikatakan cukup intensif dilaksanakan, sekali dalam setahun. Untuk itu, setiap tahun Pusat Bahasa menyelenggarakan penataran penyuluhan untuk menambah jumlah tenaga penyuluh di setiap provinsi. Peserta penataran itu adalah para dosen perguruan tinggi yang mewakili provinsinya. Kegiatan kedua, yaitu penertiban pemakaian bahasa asing di tempat umum, di dalam pelaksanaannya bahkan melibatkan wakil-wakil dari departemen yang lain (di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri), yaitu Departemen Penerangan, Departemen Kehakiman, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, dan Kantor Menteri Perumahan Rakyat. Demikian pula halnya dengan kegiatan ketiga yang pada saat ini tengah diupayakan pengusulan pendirian balai penelitian bahasa di enam provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimatan Selatan, Irian Jaya, Jawa Barat, dan Jawa Timur).

Dalam rangka kerja sama dengan Pemda Tingkat I itu, di setiap provinsi Pusat Bahasa memiliki semacam "perwakilan" yang disebut Koordinator Pemasyarakatan Bahasa Indonesia. Perencanaan dan evaluasi terhadap kegiatan kerja sama dengan pemerintah daerah itu dilakukan dalam suatu rapat koordinasi yang diadakan setahun sekali. Selain dihadiri oleh peserta dari Pusat Bahasa, rapat koordinasi itu dihadiri pula oleh wakil Pemda Tingkat I dan koordinator pemasyarakatan bahasa Indonesia dari setiap provinsi. Dengan demikian, dapatlah diharapkan bahwa kerja sama antara Pusat Bahasa dan seluruh Pemda Tingkat I di seluruh Indonesia itu akan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berencana sehingga pada suatu saat nanti, entah kapan, pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat.

# 2

# ORGANISASI PUSAT BAHASA

a. **Kedudukan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/0 Tahun 1975, yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222g/O/1980, Pusat Bahasa ditetapkan sebagai pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Sejak 1975 hingga kini Kepala Pusat Bahasa, secara berturut-turut, ialah Prof. Dr. Amran Halim (1975--1984), Prof. Dr. Anton M. Moeliono (1984--1989), Drs. Lukman Ali (1989--1991), dan Dr. Hasan Alwi (1991--sekarang).

*b. Tugas dan Fungsi*

Pusat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Pusat Bahasa mempunyai fungsi sebagai (1) perumus kebijakan Menteri dan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bahasa; (2) pelaksana penelitian dan

pengembangan bahasa, serta membina unit pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah; dan (3) pelaksana urusan tata usaha pusat.

*c. Susunan Organisasi*

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0218/O/1990, tanggal 3 April 1990, telah ditetapkan Perincian Tugas Bagian, Subbagian, dan Bidang di lingkungan Pusat Bahasa.

Pusat Bahasa terdiri atas (a) Bagian Tata Usaha, (b) Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, (c) Bidang Sastra Indonesia dan Daerah, (d) Bidang Perkamusan dan Peristilahan, dan (e) Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra.

*Bagian Tata Usaha*

Bagian ini mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi di lingkungan Pusat. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai (a) pelaksana dalam urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga; dan (b) pelaksana dalam urusan kepegawaian; (c) pelaksana dalam urusan keuangan.

Kepala Bagian Tata Usaha, secara berturut-turut ialah Maman Sumantri (1975--1984), Drs. Koentamadi (1984--1986), Drs. Hasjmi Dini (1985--sekarang).

*Drs. Hasjmi Dini*

Bagian Tata Usaha bertugas (1) menyusun program kerja tahunan dan mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Pusat; (2) mempersiapkan rancangan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bahasa; (3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data; (4) melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan di lingkungan Pusat; (5) melaksanakan urusan penyelenggaraan rapat dinas; (6) melaksanakan urusan perlengkapan; (7) melaksanakan urusan kerumahtanggaan; (8) melaksanakan urusan kepegawaian; (9) melak-sanakan urusan keuangan; (10) melaksanakan urusan pengembangan ketatausahaan; (11) melaksanakan pemantauan

pelaksanaan rencana dan program kerja; (12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian Tata Usaha dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Pusat.

Bagian ini terdiri atas (1) Subbagian Urusan Dalam, (2) Subbagian Kepegawaian, dan (3) Subbagian Keuangan, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

*Subbagian Urusan Dalam* bertugas (1) menyusun rencana dan program kerja tahunan, mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Bagian, dan mempersiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan Pusat; (2) melakukan urusan surat-menyurat; (3) melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi; (4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; (5) melakukan urusan barang perlengkapan; (6) melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor; (7) melakukan urusan keprotokolan, penerimaan tamu, dan upacara; (8) melakukan urusan kerumahtanggaan dan perawatan kantor; (9) mengatur penggunaan, perawatan, dan perbaikan kendaraan dinas; (10) melakukan urusan penyusunan risalah rapat dinas Pusat; dan (11) melakukan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; (12) menyusun laporan pelaksanaan program kerja dan mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bagian serta mempersiapkan bahan penyusunan laporan Pusat.

*Subbagian Kepegawaian* bertugas (1) menyusun program kerja tahunan; (2) menyusun formasi pegawai; (3) mempersiapkan pengusulan mutasi pegawai; (4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian; (5) mempersiapkan usaha pengembangan pegawai; (6) mempersiapkan ujian dinas pegawai golongan I, II, dan III di lingkungan Pusat; (7) mempersiapkan usaha peningkatan disiplin pegawai; (8) melakukan urusan registrasi kepegawaian; (9) melakukan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai; (10) mengurus cuti pegawai; 11) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan kepegawaian; (12) melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja.

*Subbagian Keuangan* bertugas (1) menyusun rencana dan program kerja tahunan; (2) menyusun usul rencana anggaran rutin dan pembangunan; (3) menyusun rencana penggunaan anggaran; (4) menyusun pengumpulan dan pengolahan data; (5) mempersiapkan usul permintaan UUDP dan mengurus penyelesaiannya; (6) melakukan tata usaha pengurusan keuangan; (7) mempersiapkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; (8) melakukan tata usaha perjalanan dinas; (9) melakukan pengurusan gaji, uang lembur, dan honorarium pegawai; (10) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan keuangan; (11) melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (12) menyusun laporan.

*Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah*

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah serta pengajaran bahasa. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah mempunyai fungsi (a) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa; serta (b) mempersiapkan pembakuan bahasa Indonesia dan daerah.

Kepala Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, secara berturu-turut dipegang oleh Drs. S. Effendi (1975--1990), Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil. (1990--1992), Dr. Yayah B. Lumintaintang (1992--sekarang). Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah bertugas (1) menyusun rencana kegiatan tahunan; (2) menyusun rencana kegiatan mengenai pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah; (3) meneliti berbagai aspek bahasa di Indonesia untuk pembakuan; (4) melakukan pengumpulan dan pengolahan data; (5) menyusun bahan pemasyarakatan bahasa Indonesia baku; (6) memantapkan sarana pengembangan bahasa Indonesia; (7) memantapkan sarana pengembangan bahasa daerah; (8) memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia; (9)

*Dr. Yayah B.L.*

memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan bahasa daerah; dan (10) menyusun laporan tahunan.

*Bidang Sastra Indonesia dan Daerah*

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra Indonesia dan daerah serta pengajaran sastra. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Sastra Indonesia dan Daerah mempunyai fungsi (a) mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra; serta (b) melakukan pembinaan, penelitian, dan pengembangan sastra.

Kepala Bidang Sastra Indonesia dan Daerah, berturut-turut dijabat Drs. Lukman Ali (1975--1980), Dra. Sri Timur Suratman (1980--1985), Dra. Anita K. Rustapa (1985--1991), Dr. Edwar Djamaris (1991--1997), Drs. Abdul Rozak Zaidan, M.Hum. (1997--sekarang).

*Drs. A. Rozak Z., M.Hum.*

Bidang Sastra Indonesia dan Daerah bertugas (1) menyusun rencana dan program kerja tahunan; (2) menelaah sastra lama; (3)menyusun karya tulis sastra lama; (4) mengumpulkan dan mengolah data; (5) menelaah sastra modern; (6) menyusun karya tulis sastra modern; (7) menilai karya sastra; (8) menerjemahkan karya sastra; (9) menyediakan sarana pembinaan tenaga; (10) menyediakan informasi; (11) menyediakan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan Indonesia dan daerah; (12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (13) menyusun laporan pelaksanaan program kerja.

*Bidang Perkamusan dan Peristilahan*

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan kosakata dan istilah untuk kepentingan penyusunan perkamusan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Perkamusan dan Peristilahan mempunyai fungsi (a) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis perkamusan dan peristilahan; serta (b)

melakukan pembinaan, penelitian, dan pengembangan perkamusan dan peristilahan, antara lain untuk penyusunan kamus dan ensiklopedi.

Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan, berturut-turut adalah Dra. Sri Sukesi Adiwimarta (1975--1987), Drs. Adi Sunaryo (1987--1990), Dr. Hasan Alwi (1990--1992), Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil. (1992--1994), Dr. Dendy Sugono (1994--sekarang).

*Dr. Dendy Sugono*

Bidang Perkamusan dan Peristilahan bertugas (1) menyusun rencana dan program kerja tahunan; (2) meneliti dan mengkodifikasi khazanah kebahasaan dalam usaha menyusun kamus ekabahasa, baik untuk keperluan kamus umum maupun kamus khusus, kamus dwibahasa, ensiklopedi, dan tesaurus; (3) menyediakan layanan dan informasi bagi masyarakat dalam bidang leksikografi; (4) mengumpulkan dan mengolah data; (5) menyediakan sarana pengembangan kosakata (termasuk istilah) bahasa Indonesia dan bahasa daerah; (6) menyediakan sarana pengembangan peristilahan yang mencakup berbagai bidang ilmu; (7) mengelola dan melaksanakan kerja sama kebahasaan dalam peristilahan dalam usaha penyelarasan dan pembakuan; (8) memantau dan mengevaluasi pengembangan kosakata (termasuk istilah) bahasa Indonesia dan bahasa daerah; (9) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan perkamusan dan peristilahan; (10) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (11) menyu-sun laporan pelaksanaan program kerja.

*Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra*

Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing, serta pengadaan perpustakaan sebagai sarana pengembangan kebahasaan. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai fungsi (a) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis dan bahan informasi pengembangan bahasa dan sastra; (b) melakukan pengembangan bahasa dan sastra;

(c) memilih karya sastra untuk diterjemahkan; serta (d) menerbitkan hasil penelitian.

Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra berturut-turut adalah Dra. S.W. Rujiati Mulyadi (1975--1978), A.Latief, M.A. (1978--1987), Drs. Zulkarnain (1987--1990), Dr. Nafron Hasjim (1990--1996), Drs. Adi Sunaryo, M.Hum. (1996--sekarang).

*Drs. Adi Sunaryo, M.Hum.*

Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai uraian tugas (1) menyusun program kerja; (2) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung; (3) mengembangkan bahan penyuluhan bahasa dan sastra; (4) mengumpulkan dan mengolah data; (5) membina hubungan kerja sama kebahasaan dan kesastraan dengan instansi lain, organisasi profesi, dan jaringan komunikasi dan jaringan komunikasi/informasi kebahasaan dan kesastraan di dalam dan di luar negeri; (6) mengurus dan membina perpustakaan sebagai pusat pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan; (7) menyimpan dan memelihara dokumen dan surat yang berkaitan dengan bahasa dan sastra; (8) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan; dan (9) menyusun laporan pelaksanaan program kerja.

Satuan Kerja Perpustakaan atau Perpustakaan Pusat Bahasa adalah salah satu satuan kerja yang terdapat dalam Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra. Tugas pokok perpustakaan meliputi (1) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan pustaka kebahasaan dan kesastraan untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra; (2) penyediaan fasilitas layanan informasi pustaka kebahasaan dan kesastraan dalam bentuk penyediaan pangkalan data kebahasaan, penerbitan guntingan surat kabar, dan penyusunan indeks dan bibliografi; (3) pengupayaan kerja sama dengan lembaga kebahasaan dan keperpustakaan, dalam dan luar negeri, untuk peningkatan mutu pengelolaan perpustakaan.

Jumlah koleksi secara keseluruhan hingga April 1998 adalah 100.437 jilid, yang terdiri atas 70.316 judul. Koleksi kebahasaan dan kesastraan merupakan koleksi terbesar, yaitu 70% dari keseluruhan koleksi. Bentuk koleksi meliputi bahan tercetak (buku, majalah, atlas, dan surat kabar) dan bahan tak tercetak (mikrofilm, mikrofis, kaset suara, kaset video, pita suara, dan foto).

*Unit Pelaksana Teknis*

Pusat Bahasa mempunyai tiga buah unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, yaitu (1) Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta, (2) Balai Penelitian Bahasa di Denpasar, dan (3) Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang. Balai-balai penelitian bahasa itu mempunyai tugas melaksanakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di daerahnya masing-masing. Untuk menyelenggarakan tugas itu, Balai Penelitian Bahasa mempunyai fungsi (a) melaksanakan penelitian bahasa, terutama bahasa-bahasa daerah; (b) melaksanakan penelitian sastra, terutama sastra daerah; (c) melaksanakan urusan tata usaha dan dan urusan rumah tangga balai. Organisasi Balai Penelitian Bahasa terdiri atas (1) Kepala Balai, (2) Subbagian Tata Usaha, (3) Tenaga Peneliti, serta (4) Perpustakaan dan Doku-mentasi.

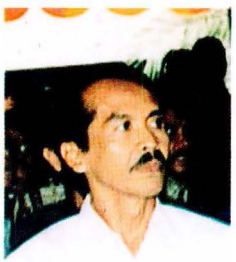

*Drs. Suwadji*

Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta dipimpin, secara berturut-turut, Tardjan Hadidjaja (1952--1960), Tardjosusastra (1960--1969), Drs. Mudjanatistomo (1969--1976), Dr. Soepomo Poedjosoedarmo (1976--1977), Drs. Mudjanatistomo (1977--1978), Dra. Wedhawati (1978--1983), Prof. Drs. M. Ramlan (1983--1987), Dr. Sudaryanto (1987--1991), Drs. Suwadji (1991--sekarang).

*Drs. I Nyoman S., M.Hum.*

Balai Penelitian Bahasa Denpasar, secara berturut-turut, dipimpin Dr. G. Goris (1947--1958), Drs. Soewito Santoso (1958--1963), Drs. Made Djendra (1963--1973), Drs. I Gusti Ngurah

*Drs. Zainuddin H., M.Hum.*

Bagus (1973--1992), dan Drs. I Nyoman Sulaga (1992--1998).

Kepala Balai Penelitian Ujung Pandang, secara berturut-turut, ialah Drs. G.S. Wolhoff (1953--1956), Dr. H. Goris (1957), Abdurahim (1958--1960), A. Yenriadji (1961--1963), Muhammad Noer (1964--1965), Ahmad Rahman (1966--1976), Drs. J.F. Pattiasina, M.Sc. 1977--1989), Drs. Abdul Muthalib (1989--1996), dan Drs. Zainuddin Hakim, M.Hum. (1996--sekarang).

*Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta*

*Balai Penelitian Bahasa Denpasar*

*Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang*

## STRUKTUR ORGANISASI

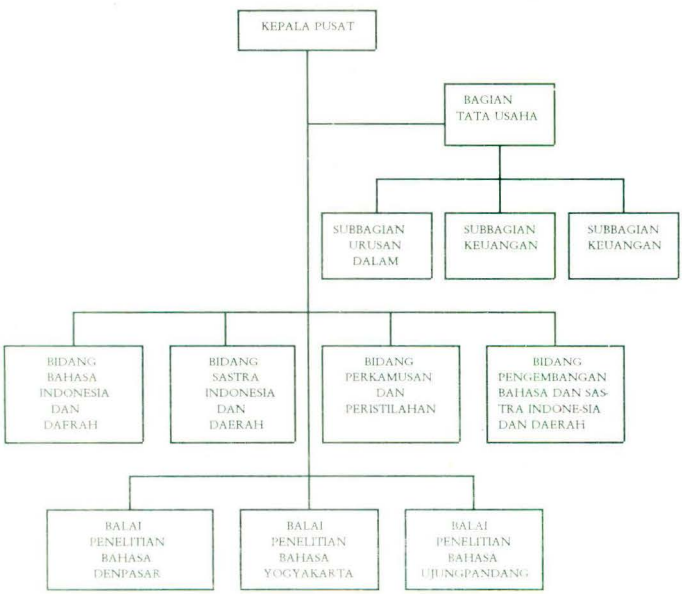

## d. Pengembangan Organisasi

Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Oktober 1984 No. 14/U/1984, yang menyatakan bahwa Kepala Pusat Bahasa dapat mengusulkan penyempurnaan struktur organisasi yang memadai, langkah awal dalam hubungan itu adalah pembentukan sejumlah satuan kerja yang disesuaikan dengan ruang lingkup kerja serta tenaga yang ada di Pusat Bahasa. Pada saat ini jumlah satuan kerja yang ada adalah (1) Satuan Kerja Bahasa Indonesia, (2) Satuan Kerja Bahasa Daerah, (3) Satuan Kerja Bina Sastra, (4) Satuan Kerja Sastra Lama, (5) Satuan Kerja Sastra Modern, (6) Satuan Kerja Perkamusan, (7) Satuan Kerja Peristilahan, (8) Satuan Kerja Pembinaan Bahasa, (9) Satuan Kerja Pembinaan Sastra, dan (10) Satuan Kerja Perpustakaan

Setiap satuan kerja itu dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala bidangnya masing-masing.

Nama Balai Penelitian Bahasa diusulkan agar diubah menjadi Balai Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sehingga pembinaan dan pengembangan bahasa di daerah berada di bawah koordinasi Balai Bahasa. Mulai tahun 1989/1990, ditetapkan wilayah kerja Balai Bahasa agar seluruh kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan dapat terkoordinasi dengan lebih baik dan berencana. Wilayah kerja itu tergambar pada tabel berikut.

WILAYAH KERJA BALAI BAHASA

| No. | Balai Bahasa | Wilayah Kerja |
|---|---|---|
| 1. | Yogyakarta | 1. DI Yogyakarta<br>2. Jawa Tengah<br>3. Jawa Timur |
| 2. | Denpasar | 1. Bali<br>2. Nusa Tenggara Barat |

WILAYAH KERJA BALAI BAHASA (LANJUTAN)

| No. | Balai Bahasa | Wilayah Kerja |
|---|---|---|
| 3. | Ujung Pandang | 1. Sulawesi Selatan<br>2. Sulawesi Utara<br>3. Sulawesi Tengah<br>4. Sulawesi Tenggara |
| 4. | Padang<br>(dalam proses pendirian) | 1. DI Aceh<br>2. Sumatera Utara<br>3. Sumatera Selatan<br>4. Sumatera Barat<br>5. Bengkulu<br>6. Riau<br>7. Lampung |
| 5. | Bandung<br>(dalam proses pendirian) | Jawa Barat |
| 6. | Banjarmasin<br>(dalam proses pendirian) | 1. Kalimantan Selatan<br>2. Kalimantan Tengah<br>3. Kalimantan Barat<br>4. Kalimantan Timur |
| 7. | Kupang<br>(dalam proses pendirian) | 1. Nusa Tenggara Timur<br>2. Timor Timur |
| 8. | Irian Jaya<br>(dalam proses pendirian) | 1. Irian Jaya<br>2. Maluku |

**e. Pengembangan Ketenagaan**

Salah satu faktor penunjang kelancaran dan keberhasilan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah adalah tersedianya tenaga ahli yang profesional. Dalam kaitan itu, kebijakan yang dilakukan dalam bidang ketenagaan selama ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kebahasaan dan kesastraan.

*Peningkatan Kuantitas*

Dalam upaya peningkatan jumlah tenaga kebahasaan dan kesastraan, baik di pusat maupun di daerah, Pusat Bahasa secara bertahap meningkatkan jumlah pegawainya. Jumlah tenaga Pusat Bahasa berdasarkan pendidikan formalnya dapat dilihat pada tabel berikut.

JUMLAH TENAGA

| No. | Organisasi | Pendidikan | | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD | SLP | SLA | SM | S1 | S2 | S3 | |
| 1 | Pusat Bahasa | 10 | 8 | 60 | 10 | 130 | 22 | 7 | 247 |
| 2 | Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta | 4 | 1 | 27 | 2 | 27 | 3 | 1 | 62 |
| 3 | Balai Penelitian Bahasa Denpasar | 1 | - | 15 | 1 | 28 | 6 | - | 51 |
| 4 | Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang | 1 | 2 | 17 | 3 | 20 | 4 | - | 47 |

*Peningkatan Kualitas*

Secara bertahap Pusat Bahasa berusaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

*Pendidikan Formal*

Pusat Bahasa bekerja sama dengan ILDEP memberikan beasiswa kepada tenaga Pusat Bahasa termasuk Balai Penelitian Bahasa untuk mengikuti pendidikan formal pada tingkat pascasarjana.

Hasil yang dapat dicapai selama 1988--1992 adalah seperti tampak pada tabel berikut.

PENDIDIKAN PASCASARJANA

| No. | Instansi | Program | | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| | | S2 | S3 | |
| 1. | Pusat Bahasa | 5 | 5 | |
| 2. | Balai Penelitian Bahasa | 5 | 2 | |
| 3. | Perguruan Tinggi | 3 | 15 | |

Sejak tahun 1993 beasiswa pendidikan S2 dan S3 dibiayai sendiri oleh anggaran rutin Pusat Bahasa. Hasil yang diperoleh seperti terlihat pada tabel berikut.

PENDIDIKAN S2

| No. | Instansi | Yang sudah Selesai | Yang sedang Mengikuti Pendidikan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusat Bahasa | 22 | 8 | |
| 2 | Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta | 3 | 6 | |
| 3 | Balai Penelitian Bahasa Denpasar | 6 | 5 | |
| 4 | Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang | 4 | 1 | |

## PENDIDIKAN S3

| No. | Instansi | Yang sudah Selesai | Yang sedang Mengikuti Pendidikan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pusat Bahasa | 7 | 1 | |
| 2 | Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta | 1 | - | |
| 3 | Balai Penelitian Bahasa Denpasar | - | - | |
| 4 | Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang | - | 1 | |

*Pendidikan Nonformal*

Kerja Sama Pusat Bahasa dengan ILDEP telah melaksanakan pendidikan lanjutan melalui program ILDEP I dan II pada tahun 1974--1997. Kegiatan dan hasilnya terlihat pada tabel di bawah ini

### PENATARAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN KERJA SAMA DENGAN ILDEP

| No. | Jenis Penataran | Tahap I | | Tahap II | | Tahap III | | Tahap IV | | Tahap V | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahuh | Peserta | Tahuh | Peserta | Tahuh | Peserta | Tahuh | Peserta | Tahuh | Peserta | |
| 1. | Leksikografi | 1974 | 30 | 1975 | 20 | 1975 | 15 | 1976 | 15 | 1977 | 5 | 16 orang telah menyelesaikan program doktor |
| 2. | Sosiolinguistik | 1975 | 30 | 1976 | 20 | 1976 | 15 | 1977 | 15 | 1978 | 5 | |
| 3. | Dialektologi | 1976 | 30 | 1977 | 20 | 1977 | 15 | 1978 | 15 | 1979 | 5 | |
| 4. | Penerjemahan | 1977 | 30 | 1978 | 20 | 1978 | 15 | 1979 | 15 | 1980 | 5 | |
| 5. | Sastra | 1978 | 30 | 1979 | 20 | 1979 | 15 | 1980 | 15 | 1981 | 5 | |
| 6. | Morfologi Sintaksis | 1979 | 30 | 1980 | 20 | 1980 | 15 | 1981 | 15 | 1982 | 5 | |
| 7. | Linguistik Historis Komparatif | 1980 | 30 | 1981 | 20 | 1981 | 15 | 1982 | 15 | 1983 | 5 | |

PENATARAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
PASCA ILDEP

| No. | Jenis Penataran | Tahap I | | Tahap II | | Tahap III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun | Peserta | Tahun | Peserta | Tahun | Peserta |
| 1. | Linguistik Umum I | 1981 | 30 | 1982 | 30 | 1982 | 15 |
| 2. | Linguistik Umum II | 1982 | 30 | 1983 | 30 | 1983 | 17 |
| 3. | Sastra Angkatan I | 1983 | 30 | 1984 | 30 | 1984 | 17 |
| 4. | Linguistik Umum III (Leksikografi) | 1984 | 30 | 1985 | 30 | 1985 | 30 |
| 5. | Sastra Angkatan II | 1985 | 30 | 1986 | 30 | - | - |
| 6. | Penyuntingan:<br>a. Angkatan I dan II<br>b. Angkatan III dan IV | <br>1982<br>1984 | <br>30<br>40 | <br>1983<br>1985 | <br>40<br>30 | <br>-<br>- | <br>-<br>- |
| 7. | Penyuluhan:<br>Angkatan I, II, III | 1987 | 30 | 1988 | 30 | 1989 | 30 |

*Partisipasi dalam Pertemuan Kebahasaan/Kesastraan*

Di samping pendidikan dan pelatihan, Pusat Bahasa juga memberikan kesempatan kepada karyawannya turut serta dalam berbagai pertemuan kebahasaan dan kesastraan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Melalui kegiatan ini diharapkan para karyawan dapat memperoleh tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kemampuan dan keahliannya dalam rangka peningkatan kualitas tenaga Pusat Bahasa pada umumnya.

# 3

# KEGIATAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

## a. Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan sebagai upaya untuk: (1) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia yang memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia modern dalam berbagai aspek, seperti aspek politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan; (2) melestarikan bahasa dan sastra daerah sebagai warisan budaya bangsa serta memanfaatkannya sebagai sumber dalam pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Untuk kegiatan penelitian bahasa dan sastra tersebut, beberapa langkah kebijakan ditetapkan, antara lain kebijakan dalam: (1) meningkatkan usaha penelitian berbagai aspek bahasa untuk keperluan pembakuannya; (2) meningkatkan usaha penelitian karya-karya sastra Indonesia; (3) meningkatkan usaha inventarisasi bahasa daerah dengan mengutamakan bahasa-bahasa yang terancam punah; dan (4) meningkatkan usaha penyusunan tata bahasa dan kamus bahasa daerah. Untuk melaksanakan kegiatan ini, Pusat Bahasa bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun pemerintah. Penelitian dilakukan terhadap semua aspek bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

### *Bahasa dan Sastra Indonesia*

Penelitian bahasa dan sastra Indonesia yang dilaksanakan Pusat Bahasa semasa kurun waktu antara tahun 1977 hingga tahun 1998

berjumlah 655 topik, yang terdiri atas 472 aspek penelitian kebahasaan dan 182 topik penelitian kesastraan. Materi penelitian meliputi berbagai topik kebahasaan dan kesastraan Indonesia, antara lain, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia, tata bahasa, pengajaran sastra Indonesia, dan apresiasi sastra. Data mengenai penelitian bahasa dan sastra Indonesia itu dapat ditemukan, antara lain, pada *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1975--1993.*

*Hasil kegiatan penelitian kebahasaan*

### *Bahasa dan Sastra Daerah*

Penelitian bahasa dan sastra daerah pada umumnya dilaksanakan oleh tenaga peneliti daerah di bawah koordinasi Pusat Bahasa. Selama kurun waktu 1975--1998 telah diteliti sebanyak 241 bahasa daerah (dialek) di wilayah Indonesia yang meliputi 1.647 topik penelitian bahasa dan sastra, yang terdiri atas penelitian sebanyak 1.183 topik, dan penelitian sastra sebanyak 464 topik.

## b. Penyusunan dan Pembakuan

Kegiatan penyusunan bahan kebahasaan meliputi pembuatan naskah: (1) pedoman kebahasaan seperti ejaan dan istilah; (2) pembakuan, seperti kamus dan tata bahasa; (3) bahan penyuluhan bahasa; (4) acuan kebahasaan, seperti bibliografi kebahasaan, dan (5) buku sastra Indonesia dan daerah. Selama kurun waktu 1975--1997 tercatat lebih kurang 379 judul karya penyusunan dan pembakuan telah diterbitkan, yang terdiri atas 7 judul kamus ekabahasa, 104 judul kamus dwibahasa (bahasa Indonesia-bahasa daerah dan sebaliknya), 117 judul kamus bidang ilmu, 27 judul daftar istilah komprehensif, 29 judul tata bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa daerah), 17 judul bahan penyuluhan, 33 judul buku pedoman/panduan, 1 judul tesaurus, 2 judul buku pintar bahasa dan sastra, 1 judul ensiklopedi sastra, 1 judul sejarah sastra, dan 42 judul buku informasi kepustakaan bahasa dan sastra.

*Hasil kegiatan penyusunan dan pembakuan*

### c. Penerjemahan

Kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra juga dilaksanakan melalui upaya penerjemahan atas buku dan artikel kebahasaan dan kesastraan. Kegiatan itu bertujuan, antara lain, memperkaya khazanah terbitan keilmuan dalam bidang bahasa dan sastra, serta meningkatkan kualitas tenaga kebahasaan dan kesastraan melalui bacaan yang berupa hasil terjemahan tersebut.

Pusat Bahasa melaksanakan kegiatan penerjemahan dengan penekanan pada buku ilmiah berbahasa lain, seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. Kegiatan penerjemahan, selain dilaksanakan oleh Pusat Bahasa sendiri, juga dilakukan atas kerja sama dengan Proyek ILDEP II, Universitas Leiden, Belanda.

*Lokakarya penerjemahan film dan televisi*
*Jakarta, 31 Juli 1996*

Dalam upaya penerjemahan itu, Pusat Bahasa telah menerbitkan hasil terjemahan sebanyak 67 judul buku, termasuk hasil terjemahan Proyek ILDEP.

**d. Pertemuan**

Pertemuan merupakan sarana yang disediakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bagi kelompok masyarakat pakar bahasa dan sastra serta pakar bidang lain, untuk memperoleh masukan yang berupa aspirasi dan gagasan bagi pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya, serta bahasa dan sastra daerah pada umumnya. Masukan tersebut pada gilirannya dapat dimanfaatkan Pusat Bahasa dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan semua aspek kebahasaan nasional. Pertemuan tidak hanya membahas masalah kebahasaan nasional, tetapi juga membahas masalah yang menyangkut bahasa di negara-negara serumpun dan bahasa-bahasa Asia pada umumnya.

*Seminar Meningkatkan Mutu Sulih Suara,*
*24 Juni 1996*

Kegiatan pertemuan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, lokakarya, konferensi, atau kongres, baik dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional. Pusat Bahasa menyelengg-

arakan kegiatan pertemuan bekerja sama dengan organisasi dan instansi lain atau dilaksanakan sendiri. Selama kurun waktu 1975--1997 telah dilaksanakan sebanyak 115 pertemuan, yang terdiri atas 112 pertemuan tingkat lokal dan nasional, dan 3 pertemuan tingkat internasional. Pertemuan tingkat nasional yang patut dicatat adalah *Praseminar/Seminar Politik Bahasa Nasional* (1975) dan *Kongres Bahasa Indonesia* (1978, 1983, 1988, 1993) sedangkan pertemuan tingkat internasional adalah *ASANAL III* (1975), *ASANAL V* (1980), dan *TICAL* (1981).

*Kongres Bahasa*

Dalam upaya merumuskan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra, terutama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan kongres bahasa yang membahas berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan. Kongres bahasa Indonesia yang pernah dilaksanakan oleh Pusat Bahasa merupakan kelanjutan dari kongres-kongres sebelumnya, yaitu Kongres Bahasa Indonesia I (1938) dan Kongres Bahasa Indonesia II (1954).

Selama kurun waktu tahun 1975--1997, Pusat Bahasa telah menyelenggarakan lima kongres bahasa Indonesia, yakni Kongres Bahasa Indonesia III (1978), Kongres Bahasa Indonesia IV (1983), Kongres Bahasa Indonesia V (1988), dan Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).

**Kongres Bahasa Indonesia I**

Solo, 25--27 Juni 1938

Kongres Bahasa Indonesia I diselenggarakan dengan tujuan mencari pedoman bagi para pemakai bahasa, mengatur bahasa, dan mengusahakan agar bahasa Indonesia dapat tersebar lebih luas karena pada waktu itu diperoleh gambaran umum bahwa bahasa Indonesia dianggap belum teratur. Pencetus gagasan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia I adalah wartawan harian *Soeara Oemoem*, Surabaya, Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo.

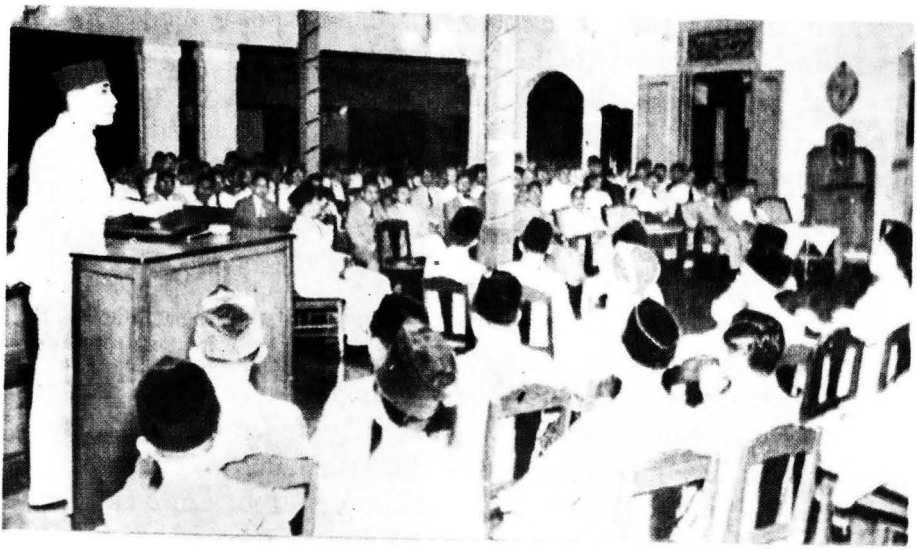

*Suasana Sidang Kongres Bahasa Indonesia I,*
*Solo, 25--28 Juni 1938*

Dalam kongres tersebut tampil berbicara, antara lain, Sanusi Pane, Ki Hadjar Dewantara, H.B. Perdi, Mr. Amir Sjarifuddin, Mr. Muh. Yamin, Soekardjo Wirjopranoto, St. Takdir Alisjahbana, K. St. Pamoentjak, dan M. Tabrani. Susunan panitia kongres adalah sebagai berikut.

| | | |
|---|---|---|
| Ketua Komite | : | Soedardjo Tjokrosisworo |
| Sekretaris/Penulis | : | Sumanang |
| Pembantu/Komisaris | : | Albert Manumpak Sipahutar |
| Ketua Kehormatan Komite | : | Prof. Dr. Husein Djajadiningrat |
| Ketua | : | Prof. Dr. Poerbatjaraka |
| Anggota | : | Mr. Amir Syarifuddin; Katja Sungkana Sumanang; Mr. Muhammad Syah |

**Panitia Penerimaan**

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Soedarjo Tjokrosisworo |
| Wakil Ketua | : | Suhari Kusumodirdjo |
| Penulis | : | Syamsu Haryohudoyo; Karkono Partosentono (Karkono Kamadjaja); Darmastowo Darmosoegondo |
| Bendahara | : | Syamsu Hadiwijoto, Tarido Soeropradoto |
| Anggota | : | Soetedjo Wirjowasono; Doetodilogo; Soeradi Sastrokarjono; Asnawi Hadisiswojo; Soerono; Sadono Dibiosaroyo |

**Kongres Bahasa Indonesia II**

Medan, 28 Oktober--2 November 1954

Kongres Bahasa Indonesia II, sebagai kelanjutan dari Kongres Bahasa Indonesia I, diselenggarakan di Medan, dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden I, Ir. Soekarno. Kongres tersebut diprakarsai dan dilaksanakan oleh Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

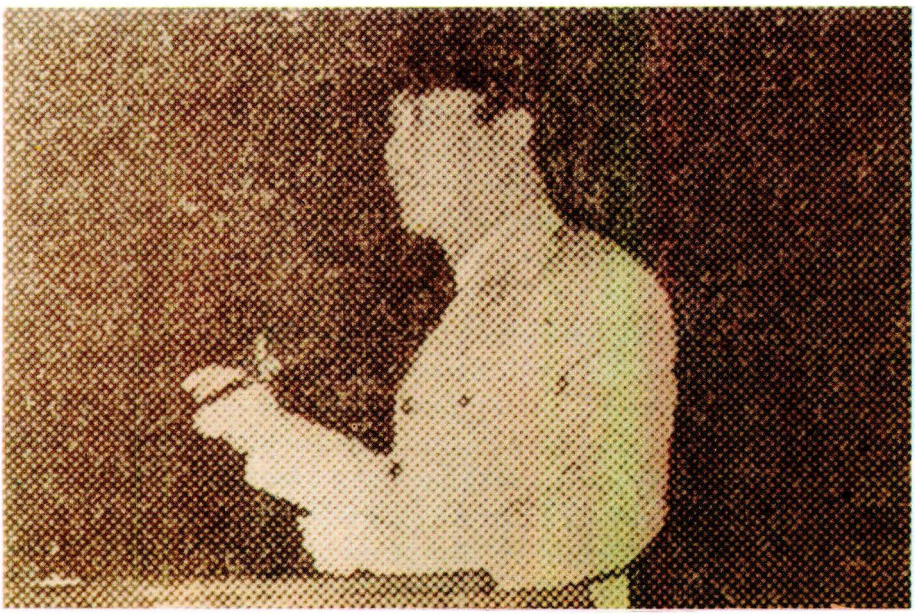

*Pidato Presiden Soekarno pada*
*Upacara Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia II,*
*Medan, 28 Oktober 1954*

Peserta kongres tercatat 302 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, tercatat pula peserta dari Tanah Semenanjung, Belanda, Prancis, dan India. Kongres dibagi atas kelompok berikut: (1) Seksi A: Tata Bahasa dan Ejaan; (2) Seksi B: Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan; (3) Seksi C: Bahasa Indonesia dalam Kuliah dan Pengetahuan serta Kamus Etimologi Indonesia; (4) Seksi D: Bahasa Indonesia dalam Film, dalam Pergaulan, dan dalam Prosa dan Puisi; (5) Seksi E: Bahasa Indonesia dalam Pers. Panitia Penyelenggara terdiri atas:

Ketua : Sudarsana
Wakil Ketua : Slamet Muljana
Panitera I : Mangatas Napitupulu
Panitera II : Drs. W.J.B.F. Toody
Panitera III : Nur St. Iskandar
Anggota : Pudjowijatno; Amir Hamzah Nasution; La Side

**Kongres Bahasa Indonesia III**

Jakarta, 28 Oktober-3 November 1978

Kongres Bahasa Indonesia III diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Kongres bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional (sesuai dengan isi dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928) maupun sebagai bahasa negara (sesuai dengan Bab V, Pasal 36, UUD 1945).

Kongres membahas masalah kebahasaan yang meliputi (a) fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan sarana perhubungan antardaerah dan antarbudaya di Indonesia; (b) fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemerintahan dan ketahanan nasional, sebagai unsur pendidikan dan pengajaran, sebagai sarana pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagai sarana komunikasi; serta (c) pembinaan dan pengembangan bahasa daerah; yang terangkum dalam 49 makalah.

Keputusan kongres berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut yang berkaitan dengan: (1) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan kebudayaan, keagamaan, sosial, politik, dan ketahanan nasional; (2) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang pendidikan; (3) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang komunikasi; (4) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang kesenian; (5) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang linguistik; (6) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Peserta Kongres Bahasa Indonesia III dalam salah satu acara diskusi*

Kongres diikuti oleh 419 orang peserta, termasuk beberapa peserta dari luar negeri. Panitia Penyelenggara terdiri atas:
Ketua : Amran Halim
Sekretaris : Maman Sumantri

**Kongres Bahasa Indonesia IV**
Jakarta, 21--26 November 1983

Kongres Bahasa Indonesia IV bertujuan memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kongres tersebut membahas masalah bahasa dan sastra dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional serta kaitannya dengan komunikasi massa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

*Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia IV*
*oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof.Dr. Nugroho Notosusanto*
*tanggal 21 November 1983*

Kongres diikuti oleh 485 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan peserta luar negeri. Jumlah makalah yang disajikan sebanyak 52 buah. Kongres mengambil keputusan yang

berupa kesimpulan dan usul tindak lanjut dalam hubungan dengan masalah-masalah di bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa yang dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional.
Penyelenggaraan kongres dilakukan oleh panitia berikut:
Ketua : Prof. Dr. Amran Halim,
Wakil Ketua : A. Latief, M.A.
Sekretaris : 1. Maman Sumantri; 2. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta; 3. Ny. S. Wahyudin

**Kongres Bahasa Indonesia V**
Jakarta, 28 Oktober--3 November 1988

Kongres Bahasa Indonesia V diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 60 tahun Sumpah Pemuda dan bertujuan memantapkan bahasa Indonesia sehubungan dengan perannya untuk memperlancar usaha pencerdasan bangsa, sebagai jembatan tercapainya kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Tema yang dipilih untuk kongres tersebut adalah "Menjunjung Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dalam Konteks Pembangunan Nasional", dengan subtema (a) "Peningkatan Mutu dan Peran Bahasa Indonesia Memperlancar Usaha Pencerdasan Bangsa"; (b) "Bahasa Indonesia Merupakan Sarana Pemantapan Pembangunan Ketahanan Nasional"; (c) "Kemampuan Berbahasa Indonesia Merupakan Jembatan Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata".

Kongres diikuti oleh 819 orang peserta yang terdiri atas pakar dan peminat bahasa dan sastra dari berbagai instansi, organisasi profesi, dan perseorangan dari dalam dan luar negeri. Kongres membahas 73 makalah. Putusan kongres berupa kesimpulan umum dan usul tindak lanjutnya, yang meliputi bidang bahasa (17 butir), bidang sastra (10 butir), bidang pengajaran bahasa (8 butir), dan bidang pengajaran sastra (6 butir).
Panitia Penyelenggara terdiri atas:
1) Ketua : Prof. Dr. Anton M. Moeliono
2) Wakil Ketua : Drs. Bastomi Ervan
3) Sekretaris : Drs. Hasjmi Dini
4) Wakil Sekretaris : Drs. Nunus Supardi

*Presiden Soeharto menyampaikan pidato pembukaan Kongres Bahasa Indonesia V, 28 Oktober 1988, di Istana Negara*

**Kongres Bahasa Indonesia VI**

Jakarta, 28 Oktober--2 November 1993

Kongres Bahasa Indonesia VI diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta, dan diikuti oleh 770 peserta dari seluruh Indonesia dan 52 peserta dari luar negeri (Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Hongkong, India, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Singapura). Pokok-pokok masalah yang dibahas adalah (a) Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa (11 judul), (b) Pengembangan Bahasa dan Sastra (8 judul), (c) Pembinaan Bahasa dan Sastra (8 judul), (d) Pengajaran Bahasa dan Sastra (2 judul), dan (e) Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri (5 judul).

Kongres mengambil putusan yang dibagi dalam dua bagian. Bagian Umum terdiri atas delapan putusan. Bagian Khusus terdiri atas

lima masalah kebahasaan: (a) Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa (14 putusan); (b) Pengembangan Bahasa dan Sastra (12 putusan); (c) Pembinaan Bahasa dan Sastra (15 putusan); (d) Pengajaran Bahasa dan Sastra (7 putusan); dan (e) Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri (6 putusan).

*Suasana diskusi pada salah satu sidang kelompok Kongres Bahasa Indonesia VI, 1993*

Kongres dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang tersusun sebagai berikut.

Ketua : Dr. Hasan Alwi
Wakil : Sdr. A. Latief, M.A.
Tim Teknis : Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana (Koordinator)
Drs. Lukman Ali, Panuti Sudjiman, Ph.D., Dr. Sapardi Djoko Damono, Drs. Taya Paembonan, Irvan Masduki, S.H., Dr. S. Effendi, dan Drs. Sunaryo (Anggota)

**e. Pemasyarakatan/Penyuluhan**

Pemasyarakatan/penyuluhan kebahasaan, sebagai sarana pembinaan kebahasaan, dilaksanakan dengan tujuan (1) menumbuhkan dan membina sikap bahasa yang positif; (2) meningkatkan kegairahan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar; dan (3) meningkatkan mutu dan disiplin penggunaan bahasa Indonesia.

Sasaran penyuluhan kebahasaan adalah pesuluh yang terdiri atas (1) masyarakat pemakai bahasa pada umumnya, (2) karyawan instansi pemerintah dan swasta, (31) pembina bahasa yang terdiri atas guru dan ahli bahasa.

Keluasan sasaran kegiatan penyuluhan ini mengharuskan Pusat Bahasa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi maupun organisasi profesi di seluruh Indonesia, demi pencapaian tujuan yang digariskan dalam kebijakan kebahasaan. Kerja sama itu dilakukan, antara lain, dengan pemerintah daerah, kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi kebahasaan dan kesastraan, instansi perbankan, departemen di luar Departemen Pendidikan dan Kebu-dayaan, lembaga nondepartemen, dan sekolah.

Kegiatan penyuluhan sebenarnya sudah dimulai tahun 1972, menjelang peresmian pemakaian *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Namun, kegiatan itu baru terorganisasi dan terencana dengan baik sesudah tahun 1975.

Hingga saat ini hampir tidak terbilang jumlah kegiatan dan sasaran penyuluhan itu karena makin meningkatnya permintaan, kunjungan, dan kerja sama yang berkaitan dengan penyuluhan kebahasaan. Peningkatan frekuensi kegiatan itu terjadi, terutama sejak awal penyelenggaraan Bulan Bahasa pada tahun 1980.

*Penyuluhan Langsung*

Penyuluhan langsung adalah penyuluhan yang disampaikan secara tatap muka dengan masyarakat pesuluh secara langsung dalam berbagai kesempatan, baik di Pusat Bahasa maupun di instansi lain.

*Permintaan dan Kunjungan*

Pusat Bahasa memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat atau instansi yang mengajukan permintaan atau berkunjung langsung ke Pusat Bahasa. Sejak tahun 1984 jumlah permintaan dan kunjungan lehih kurang 875 kali pada lebih kurang 290 instansi, yang terdiri atas sekolah, instansi peme-rintah, instansi swasta, dan perguruan tinggi. Rincian nama sekolah, instansi, dan perguruan tinggi itu dapat disimak, antara lain, dalam *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1975--1993.*

*Penyuluhan Bahasa Indonesia*

*Penyuluhan atas Dasar Kerja Sama*

Kerja sama penyuluhan adalah upaya pembinaan kebahasaan yang dilaksanakan atas kesepakatan bersama antara Pusat Bahasa dan instansi atau pemerintah daerah tertentu. Secara aktif kerja sama telah terbina dengan beberapa pihak semenjak tahun 1975. Yang patut dicatat adalah kerja sama dengan TVRI, RRI, pemerintah daerah,

instansi nondepartemen, instansi sekolah, perguruan tinggi, dan dengan kantor-kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

*Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah*

Kerja sama pembinaan bahasa Indonesia dengan berbagai pemerintah daerah dilaksanakan, antara lain, dalam hal (a) penertiban pemakaian bahasa dalam papan nama, papan reklame, dan rambu lalu lintas, (b) peningkatan kemampuan berbahasa pejabat dan karyawan Pemda, dan (c) peningkatan kemampuan mengajar bahasa Indonesia para guru sekolah dasar.

*Kerja Sama dengan Instansi Lain*

Kerja sama penyuluhan kebahasaan dibina dengan berbagal instansi, baik instansi dalam lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun instansi non-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan penyuluhan kebahasaan yang dilaksanakan pada instansi-instansi tersebut merupakan wujud kerja sama untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pejabat dan karyawan, terutama kemampuan bahasa yang bertalian dengan administrasi perkantoran. Pada lain pihak, kerja sama dibina dengan perguruan tinggi dan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang, antara lain, bertujuan mencetak kader-kader penyuluh bahasa di seluruh Indonesia. Kerja sama itu mulai dirintis pada tahun 1975. Hingga akhir Maret 1997 telah disiarkan, lebih kurang, sebanyak 1.900 siaran melalui TVRI dan RRI. Rincian sebagian pokok bahasan yang disiarkan TVRI dan RRI dapat disimak dalam *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1975--1993.*

*Penyuluhan Tak Langsung*

Penyuluhan tak langsung adalah penyuluhan yang disampaikan melalui media, seperti surat, telepon, dan terbitan.

*Penyuluhan Melalui Surat dan Telepon*

Penyuluhan melalui surat dan telepon merupakan kegiatan penyuluhan yang bersifat pasif. Penyuluhan diberikan melalui surat dan telepon sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui kedua media komunikasi itu. Jumlah pertanyaan kebahasaan yang diterima Pusat Bahasa setiap tahun rata-rata adalah 600 pertanyaan. Kumpulan jawaban surat mengenai masalah kebahasaan itu dihimpun dalam buku petunjuk penyuluhan yang berjudul (1) *Masalah Bahasa yang Patut Anda Ketahui I*, (2) *Masalah Bahasa yang Patut Anda Ketahui II*, dan "Masalah Bahasa yang Patut Anda Ketahui III".

Pentingnya peranan Pusat Bahasa sebagal satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa disadari oleh Perum Telekomunikasi. Oleh karena itu, sejak tahun 1987, instansi itu mencantumkan nomor telepon Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 4896558 dan 4706287, pada halaman nomor telepon penting pada Buku Petunjuk Telepon.

*Penyuluhan Melalui Terbitan*

Upaya penyuluhan kebahasaan dilakukan juga melalui cara penyebarluasan terbitan lepas seperti *Lembar Komunikasi*, sebuah terbitan berbentuk lembar lepas yang terbit dua belas nomor setahun. Terbitan itu dibagikan kepada peminat bahasa dan sastra pada umumnya, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh kegiatan penyuluhan. *Lembar Komunikasi* secara kumulatif diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul *Petunjuk Praktis Berbahasa Indonesia* (1989, 1990, 1991).

Terbitan lain yang juga merupakan sarana penyuluhan adalah berbagai pedoman kebahasaan, seperti *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Terbitan sejenis itu dapat ditemukan dan dibeli di toko-toko buku yang ada. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* juga merupakan salah satu rujukan terpenting untuk meningkatkan kemampuan kebahasaan, terutama dalam penguasaan kosakata.

## f. Penerbitan

Penerbitan merupakan kegiatan Pusat Bahasa yang berkaitan dengan upaya pendokumentasian hasil kegiatan dan pelestarian warisan budaya bangsa yang berupa bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Sasaran kegiatan adalah semua naskah hasil penelitian dan penyusunan yang dianggap layak terbit berdasarkan penilaian para pakar bahasa dan sastra. Selain itu, sebagai upaya penyebaran informasi mengenai perkembangan kebahasaan yang sedang terjadi, Pusat Bahasa menerbitkan, secara berkala, *Bahasa dan Sastra, Lembar Komunikasi*, dan buletin kepustakaan *Informasi Pustaka Kebahasaan.* Selain itu, untuk melengkapi bahan penyuluhan kebahasaan, Pusat Bahasa juga menerbitkan buku-buku acuan dalam terbitan berseri dengan judul *Seri Penyuluhan.*

*Hasil Terbitan Pusat Bahasa*

*Bahasa dan Sastra*

Majalah *Bahasa dan Sastra* ini mulai diterbitkan pada tahun 1975, bersamaan dengan terbitnya majalah *Pengajaran Bahasa dan Sastra* (sekarang majalah ini tidak terbit). Frekuensi terbit majalah ini adalah tiga bulanan. Artikel muatan dalam majalah ini meliputi bidang linguistik dan linguistik terapan serta sastra dan sastra terapan.

*Lembar Komunikasi*

Terbitan berbentuk lembaran lepas *(leaflet)* yang dicetak sebanyak dua belas nomor setiap tahun. Kandungan isi lembaran ini meliputi berbagai masalah kebahasaan yang merupakan petunjuk praktis bagi pemakai bahasa pada umumnya. Lembaran ini disusun dan disediakan bagi masyarakat umum yang berminat. Secara kumulatif lembaran ini dihimpun dalam buku petunjuk praktis kebahasaan *Petunjuk Praktis Berbahasa Indonesia.*

*Informasi Pustaka Kebahasaan*

Buletin ini diterbitkan untuk melengkapi informasi kebahasaan lain dengan informasi khusus tentang kepustakaan kebahasaan mutakhir yang dimiliki oleh Perpustakaan Pusat Bahasa. Buletin ini diterbitkan empat kali setahun dan disediakan secara terbatas bagi perpustakaan kebahasaan dan masyarakat peneliti kebahasaan yang berminat.

*Seri Penyuluhan Kebahasaan*

Terbitan ini termasuk ke dalam golongan terbitan tidak berkala meskipun memiliki nomor seri dalam setiap penerbitannya. Penyusunan naskah dilakukan berdasarkan keperluan dalam kegiatan penyuluhan. Beberapa judul yang dapat disebutkan, antara lain, *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disenpumakan; Pedoman Surat-Menyurat; Pedoman Tata Istilah;* dan berbagai bahan penyuluhan.

**g. Bulan Bahasa dan Sastra**

Setiap bulan Oktober, sejak tahun 1980, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyelenggarakan **Bulan Bahasa** dalam rangka

memperingati Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda. Kegiatan Bulan Bahasa merupakan rangkaian acara kebahasaan dan kesastraan, selama satu bulan, yang bertujuan meningkatkan pemasyarakatan bahasa dan apresiasi sastra di Indonesia. Sasaran kegiatan adalah para peminat bahasa dan sastra, guru, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Keluasan cakupan kegiatan yang juga meliputi kegiatan kesastraan, menyebabkan berubahnya nama kegiatan itu menjadi **Bulan Bahasa dan Sastra** mulai tahun 1989.

*Cerdas Cermat Bulan Bahasa*

Beberapa mata acara tetap dalam kegiatan **Bulan Bahasa dan Sastra** adalah (a) kegiatan Kebahasaan yang meliputi (1) Pertemuan Kebahasaan, (2) Lomba Kebahasaan, (3) Penyuluhan, (4) Penerbitan, (5) Pintu Terbuka Pusat Bahasa, (6) Cerdas Cermat Kebahasaan; (b) kegiatan kesastraan yang meliputi (1) Diskusi Sastra di Kalangan Siswa SMA, (2) Cepat Tepat Sastra Tingkat SMA, (3) Pertemuan Sastrawan dengan Siswa SMA, (4) Festival Pementasan Sastra, (5) Pameran Sastra, (6) Apresiasi Sastra melalui Radio dan Televisi.

## h. Pemberian Penghargaan

Salah satu di antara kegiatan Pusat Bahasa adalah (1) melakukan penilaian terhadap perilaku dan sikap berbahasa anggota masyarakat serta memberikan penghargaan kepada tokoh kebahasaan dan kesastraan yang berjasa dan (2) memberikan pengakuan atas hasil karya dan prestasi anggota masyarakat di bidang bahasa dan sastra dengan cara menerbitkan surat-surat ketetapan dan keputusan yang sesuai. Beberapa penghargaan yang pernah diberikan oleh Pemerintah, melalui Pusat Bahasa antara lain sebagai berikut.

### *Anggota Masyarakat*

Penghargaan kebahasaan diberikan kepada tokoh-tokoh anutan masyarakat dari berbagai kalangan, yang berdasarkan penilaian juri ditetapkan sebagai tokoh yang peduli terhadap bahasa Indonesia serta menggunakannya secara baik dan benar dalam penampilan sehari-hari. Tokoh yang memperoleh penghargaan itu, antara lain, Rudy Hartono (olahragawan), Hasan Ashari Oramahi (penyiar), dan Mark Sungkar (insan perfilman).

### *Tokoh Kebahasaan*

Penghargaan yang diberikan kepada tokoh kebahasaan pada umumnya didasarkan atas jasa dan prestasi seorang tokoh, terutama atas jasa dan prestasinya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Selain itu, penghargaan diberikan atas jasa dan peran sertanya dalam pengembangan peristilahan pada Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia. Penerima penghargaan sebagai tokoh kebahasaan, antara lain, Sutan Muhammad Zain, W.J.S. Poerwadarminta, Soewojo Wojowasito, Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Dr. Sri Sukesi Adiwimarta, Dr. Mien A. Rifai, Dr. Liek Wilardjo, dan Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka. Data mengenai penerima peng-hargaan terdapat, antara lain, dalam *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1975--1993.*

*Tokoh Kesastraan/Sastrawan*

Penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada tokoh kesastraan/sastrawan pada umumnya berdasarkan penilaian atas prestasi karya. Penilaian itu diberikan oleh suatu badan atau organisasi yang mempunyai otoritas dalam menilai karya sastra, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

*Tingkat Nasional*

Sejak tahun 1989, Pusat Bahasa memberikan penghargaan kepada penulis sastra terhaik dengan tujuan untuk merangsang kegiatan menulis kreatif, baik dalam prosa, puisi maupun drama. Kegiatan pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas menulis, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas. Selama periode 1989--1997 tercatat sebanyak dua puluh sastrawan yang meraih penghargaan kesastraan yang diberikan Pusat Bahasa. Peraih penghargaan itu adalah Danarto, Ahmad Tohari, D. Zawawi Imron, Beny Setia, Wisran Hadi, Saini K.M., Darman Moenir, Edijushanan, Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi A.G., Kuntowijoyo, N. Riantiarno, Seno Gumira Ajidarma, F. Rahardi, Satyagraha Hoerip, Afrizal Malna, Piek Ardijanto Soeprijadi, Rusli Marzuki Saria, Titis Basino P.I., dan Wing Kardjo.

*Tingkat Internasional*

Hadiah Sastra ASEAN *(S.E.A. Write Award)* diberikan setiap tahun, sejak tahun 1978, oleh Yayasan Hadiah Sastra ASEAN yang berpusat di Bangkok. Hadiah itu diberikan kepada sastrawan atas dasar kreasi karya sastra yang dinilai oleh tim juri yang terdiri atas tokoh-tokoh budaya dan sastra yang mewakili negara-negara ASEAN. Pusat Bahasa, sebagai unit organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, dalam hal ini berperan sebagai sponsor utama yang membentuk panitia yang memiliki kewenangan dalam menentukan calon pemenang dari Indonesia.

Sejumlah sastrawan yang pernah menerima penghargaan *S.E.A. Write Award,* antara lain Iwan Simatupang, Sutardji Calzoum Bachri, Putu Wijaya, Goenawan Mohamad, Marianne Katoppo, Y.B.

Mangunwijaya, Budi Darma, Abdul Hadi Wiji Muthari, Sapardi Djoko Damono, Umar Kayam, Danarto, Arifin C. Noer, Gerson Poyk, Subagio Sastrowardoyo, A.A. Navis, Ramadhan K.H., Taufiq Ismail, Ahmad Tohari, W.S. Rendra, Seno Gumira Ajidarma, dan N. Riantiarno.

# 4

# KERJA SAMA

Pusat Bahasa sangat menyadari bahwa tugas yang dibebankan kepadanya sangat berat sehingga tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Hal itu disebabkan oleh berbagai keterbatasan, baik karena status kelembagaan maupun karena jumlah dan mutu tenaga yang belum memadai. Untuk mengatasi hal itu, Pusat Bahasa melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan dan dipandang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Kerja sama itu dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra. Kerja sama itu dilakukan, baik dengan lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri.

## a. Kerja Sama Dalam Negeri

Kerja sama dalam negeri dilakukan baik dengan lembaga di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pemerintah yang lain maupun dengan pihak swasta. Kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

### *Departemen Penerangan*

Kerja sama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) sudah sejak lama dilakukan. Kerja sama itu direalisasikan dalam bentuk siaran pembinaan bahasa Indonesia dengan frekuensi satu kali dalam seminggu. Selain itu, melalui

RRI dilakukan juga siar- embinaan bahasa Indonesia melalui rubrik *Aku Cinta Bahasa Indonesia (ACBI)* dengan frekuensi dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan hari Rabu.

*Pemerintah Daerah*

Kerja sama dengan pemerintah daerah dirintis mulai dari kerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang penandatanganan Piagam Kerja Samanya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1989. Kerja sama itu mendorong terbitnya berbagai putusan dan instruksi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai ketentuan pemakaian bahasa pada papan nama, papan reklame, dan rambu lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Hal itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan citra keindonesiaan di wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Kerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta ini akhirnya melahirkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1992, tanggal 13 Januari 1992.

*Pemancangan imbauan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar*

Kerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta ditindaklanjuti dengan melakukan pendekatan dengan Departemen Dalam Negeri. Pendekatan itu melahirkan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 yang memuat instruksi kepada seluruh Gubernur/Kepala Daerah dan jajarannya sampai ke tingkat kecamatan untuk melaksanakan pembinaan bahasa Indonesia di wilayah masing-masing. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri itu, Pusat Bahasa dapat melakukan kerja sama kebahasaan dengan 26 gubernur/kepala daerah yang lain. Pada dasarnya, kerja sama dengan pemerintah daerah itu dilaksanakan dalam hal (1) penertiban pemakaian bahasa pada papan nama, papan reklame dan petunjuk serta rambu lalu lintas, (b) peningkatan kemampuan berbahasa pejabat dan karyawan di lingkungan Pemda, dan (c) pemberian bantuan kepada Pusat Bahasa dalam pendirian Balai Penelitian Bahasa di daerah. Secara berurutan penandatanganan Piagam Kerja Sama dengan pemerintah daerah itu adalah sebagai berikut.

| | | |
|---|---|---|
| (1) | DKI Jakarta | 18 Februari 1989 |
| (2) | Sumatera Barat | 25 September 1993 |
| (3) | Sulawesi Utara | 29 September 1993 |
| (4) | Sumatera Utara | 7 Oktober 1993 |
| (5) | Sulawesi Selatan | 14 Oktober 1993 |
| (6) | Jawa Timur | 20 Desember 1993 |
| (7) | D.I. Aceh | 11 Januari 1994 |
| (8) | Kalimantan Selatan | 31 Januari 1994 |
| (9) | Sulawesi Tengah | 3 Februari 1994 |
| (10) | D.I. Yogyakarta | 3 Juni 1994 |
| (11) | Jawa Barat | 20 Juni 1994 |
| (12) | Nusa Tenggara Barat | 28 Juni 1994 |
| (13) | Jawa Tengah | 30 Juni 1994 |
| (14) | Sumatera Selatan | 13 September 1994 |
| (15) | Lampung | 18 Oktober 1994 |
| (16) | Riau | 15 Desember 1994 |
| (17) | Kalimantan Tengah | 11 Januari 1995 |
| (18) | Jambi | 6 Juli 1995 |
| (19) | Sulawesi Tenggara | 24 Juli 1995 |

| | | |
|---|---|---|
| (20) | Nusa Tenggara Timur | 4 September 1995 |
| (21) | Kalimantan Timur | 11 September 1995 |
| (22) | Bali | 24 Oktober 1995 |
| (23) | Maluku | 20 November 1995 |
| (24) | Bengkulu | 18 Juli 1996 |
| (25) | Klaimantan Barat | 23 Mei 1996 |
| (26) | Timor Timur | 10 Maret 1997 |
| (27) | Irian Jaya | 24 Februari 1997 |

*Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional*

Penandatanganan piagam kerja sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) di Jakarta pada tanggal 7 November 1989. Kerja sama itu bertujuan meningkatkan pemasyarakatan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pemerintah secara umum.

*Universitas Indonesia*

Kerja sama dilaksanakan dengan Fakultas Sastra dalam bentuk (a) penyelenggaraan pertemuan kebahasaan, dan (b) peningkatan mutu tenaga teknis Pusat Bahasa melalui pendidikan formal.

*Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) H.B. Jassin*

Pusat Bahasa bekerja sama dengan PDS H.B. Jassin dalam bentuk bantuan dana yang diberikan oleh Pusat Bahasa untuk pengelolaan Pusat Dokumentasi itu.

*Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)*

Kerja sama dengan DKJ dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan bersama pertemuan kebahasaan dan kesastraan.

*Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT)*

Pusat Bahasa dan BPPT bekerja sama dalam menggarap istilah komputer.

*PT Elnusa Infomedia Nusantara*

Kerja sama dilaksanakan berupa bantuan tenaga Pusat Bahasa dalam penyusunan istilah untuk lembar kuning pada *Buku Petunjuk Telepon* dan konsultan kebahasaan.

*Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*

Bersama BPHN, Pusat Bahasa melaksanakan penyusunan *Kamus Hukum Pidana.*

*Departemen Perindustrian*

Kerja sama dilaksanakan berupa kegiatan penyusunan *Standar Industri Indonesia* (SII) dalam peristilahan bidang perindustrian.

*Departemen Perhubungan*

Kerja sama dilakukan dalam bentuk kegiatan penyusunan *Kamus Hidrometeorologi* dan *Kamus Meteorologi Perhubungan.*

*Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi*

Bersama lembaga ini, Pusat Bahasa melaksanakan kegiatan penyusunan *Kamus Istilah Pariwisata.* Instansi ini telah dipecah menjadi tiga lembaga, yaitu Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya, PT Pos Indonesia, dan PT Telkom Indonesia. Saat ini tetap dilakukan kerja sama dengan ketiganya, terutama dalam bidang peristilahan.

*Departemen Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi*

Kerja sama terjadi dalam bentuk pengupayaan pembakuan istilah untuk SII bidang tambang, minyak, dan gas bumi.

*Perusahaan Umum Listrik Negara*

Kerja sama dilaksanakan dalam bentuk penyusunan istilah kelistrikan.

*Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)*

Kerja sama dengan Menpora terjalin sejak ditetapkannya bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa pada tahun 1980. Penyelenggaraan

kegiatan Bulan Bahasa merupakan subkegiatan Peringatan Sumpah Pemuda/Hari Pemuda yang berlangsung sebulan penuh selama bulan Oktober.

*Organisasi Profesi Kebahasaan dan Kesastraan*

Kerja sama dengan Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), dan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan berbagai pertemuan kebahasaan dan kesastraan serta pemasyarakatan bahasa Indonesia.

*Seminar Nasional Bahasa dan Sastra*

*Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia*

Kerja sama dengan instansi pendidikan tinggi ini meliputi berbagai kegiatan, antara lain (a) penelitian kebahasaan Indonesia dan daerah, (b) penyelenggaraan kegiatan kebahasaan, seperti pertemuan dan Bulan Bahasa, (c) pembinaan tenaga peneliti/pengajar kebahasaan,

penyuluh, dan (d) penyusunan daftar dan kamus istilah dalam Panitia Kerja Sama Kebahasaan (Pakersa).

Secara khusus, kerja sama dengan Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) dilakukan dalam rangka komputerisasi kegiatan pemetaan bahasa daerah di Indonesia. Piagam kerja sama ditanda-tangani pada tanggal 5 September 1995.

*Organisasi Pengusaha*

Kerja sama dengan organisasi pengusaha, antara lain, dijalin dengan *Real Estat Indonesia* (REI), *Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia* (P3I), dan *Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia* (PHRI). Kerja sama dengan REI--penandatanganan Piagam Kerja Sama dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995--bertujuan menertibkan nama kompleks perumahan yang dibangun oleh anggota REI. Nama kompleks perumahan yang menggunakan bahasa asing diubah menjadi nama yang berbahasa Indonesia. Kerja sama dengan P3I bertujuan menertibkan pemakaian bahasa dalam dunia periklanan baik iklan di media massa cetak dan elektronik maupun iklan di papan-papan reklame atau luar ruang. Kerja sama dengan PHRI bertujuan menertibkan bahasa di lingkungan hotel dan restoran.

*Perusahaan Swasta*

Kerja sama dengan perusahaan swasta telah dilakukan, antara lain, dengan Bank LIPPO. Kerja sama ini bertujuan untuk menertibkan pemakaian bahasa di lingkungan perusahaan tersebut.

*Berbagai Instansi dan Perseorangan*

Kerja sama dilaksanakan atas dasar permintaan berupa tenaga penyuluh bahasa dan tenaga teknis kebahasaan lain sebagai penyuluh, penilai, atau konsultan bahasa. Kerja sama dengan perseorangan dilakukan dalam hubungan dengan upaya pengembangan bahasa, antara lain, dalam pengembangan kosakata dan istilah, pengembangan bahasa dalam pemrograman perangkat lunak komputer, seperti perangkat lunak untuk kegiatan pemetaan bahasa daerah di Indonesia.

## b. Kerja Sama Luar Negeri

*Negeri Belanda*

Dengan negeri ini, yang diwakili oleh Universitas Kerajaan di Leiden, telah terjalin kerja sama yang terwujud dalam suatu proyek bersama, yaitu *Proyek Pengembangan Ilmu Bahasa Indonesia.* Selama kurun waktu tahun 1975 hingga 1991 telah dilaksanakan dua penandatanganan proyek kerja sama, yaitu *Proyek ILDEP I* (1977--1985) dan *Proyek ILDEP II* (1988--1994).

Baik *Proyek ILDEP I* maupun *Proyek ILDEP II* mempunyai tujuan, antara lain (a) memperkuat infrastruktur pelaksanaan garis besar kebahasaan Indonesia, baik di bidang ketenagaan maupun di bidang perlengkapan; (b) melaksanakan pertukaran tenaga ahli, pemberian beasiswa, dan keperluan kebahasaan lain yang dianggap perlu.

Program yang dikembangkan meliputi kegiatan (a) pendidikan pascasarjana, (b) pembentukan pangkalan data kepustakaan kebahasaan, (c) pembentukan pangkalan data perkamusan, (d) penataran tenaga profesional dalam rangka pendirian balai bahasa, dan (e) pengembangan kepustakaan kebahasaan melalui upaya penerjemahan dan penerbitan.

*Malaysia dan Brunei Darussalam*

Pusat Bahasa, mewakili Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, mewakili Pemerintah Malaysia, membentuk *Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia* (MBIM) pada tahun 1972. Tujuan majelis, antara lain, mengupayakan adanya titik temu di antara kedua bahasa dalam hal peristilahan. Upaya tersebut ditunjang oleh pertemuan rutin, yang dikenal dengan sebutan *Persidangan Majelis,* diselenggarakan dua kali setahun secara bergiliran di kedua negara.

Kerja sama kebahasaan antara kedua bangsa serumpun itu kemudian meluas setelah Brunei Darussalam secara resmi diterima sebagai anggota majelis pada tahun 1987, dan Singapura diterima sebagai pemerhati. Nama majelis sejak saat itu berubah menjadi *Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia* (MABBIM).

Majelis itu hingga saat ini telah melaksanakan persidangan sebanyak 38 kali dan berhasil mengolah istilah dalam 104 bidang ilmu. Jumlah istilah yang dihasilkan, lebih kurang sebanyak 200.000 istilah. Selain itu, persidangan majelis juga membahas empat seri kamus ilmu dasar, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi.

*Sidang Pakar MABBIM*

Sejak tanggal 12 Agustus 1996, Majelis ini bersepakat untuk membentuk satu wadah yang khusus menangani masalah kesastraan yang diberi nama *Majelis Sastra Asia Tenggara* (Mastera). Secara sengaja majelis ini menggunakan nama geografi *Asia Tenggara* dengan harapan dapat menjadi ajang kerja sama bagi masyarakat sastra di kawasan itu, tidak hanya terbatas pada negara anggota MABBIM. Sesuai dengan namanya, Mastera memusatkan perhatian pada masalah kesastraan, seperti peningkatan mutu karya sastra, penyelarasan kegiatan penelitian sastra, perluasan kesempatan penciptaan sastra, dan ikut serta dalam penyebaran penggunaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai alat komunikasi di kawasan Asi Tenggara.

*SEAMEO-Regional Language Centre (RELC), Singapura*

Kerja sama kebahasaan antara Pusat Bahasa dan *RELC* dilaksanakan dengan tujuan (a) peningkatan mutu dan kemampuan tenaga pengajar bahasa Inggris di SLTA dan perguruan tinggi; (b) penyebarluasan dan pertukaran terbitan, dan (c) penerjemahan.

Duduk sebagai anggota *Governing Board*, mewakili Indonesia, antara lain, Prof. Dr. Amran Halim (1975--1984), Prof. Dr. Anton M. Moeliono (1984--1989), Prof. Dr. Retmono (1989--1996), dan Prof. Dr. Nuril Huda (1997--sekarang).

*Pusat Kebudayaan Prancis*

Kerja sama kebahasaan dengan instansi ini berbentuk bantuan tenaga ahli dalam bidang pengajaran bahasa Prancis.

*Ford Foundation*

Dalam kerja sama ini *Ford Foundation* menyediakan bantuan dana untuk pengembangan profesionalisme tenaga kebahasaan di lingkungan Pusat Bahasa. Bantuan itu telah dimanfaatkan, antara lain, (a) pemberian beasiswa untuk belajar di luar negeri, (b) peningkatan mutu tenaga teknis, (c) keser-taan dalam pertemuan kebahasaan di kawasan Asia Tenggara, (d) pengadaan buku dan bahan pustaka lain dalam bidang kebahasaan, dan (e) pengundangan pakar kebahasaan Amerika Serikat untuk kepentingan penataran kebahasaan.

*Summer Institute of Linguistics (SIL)*

Kerja sama dengan *SIL* terlaksana dalam bentuk penyelenggaraan ceramah dan seminar di Pusat Bahasa. Kerja sama juga terjadi dalam bentuk kegiatan "tukar-menukar" terbitan.

*Goethe Institut (Pusat Kebudayaan Jerman)*

Jalinan kerja sama antara Pusat Bahasa dengan *Goethe Institut* terjadi dalam bentuk (a) penyelenggaraan simposium penerjemahan (9--10 Desember 1985), (b) penyelenggaraan simposium bahasa keilmuan (15--16 September 1986), (c) bantuan tenaga ahli kebahasaan

Jerman sebagai konsultan dan pembimbing akademi untuk peneliti Pusat Bahasa, dan (d) pemberian beasiswa ke Jerman.

*British Caouncil*

Kerja sama dengan *British Council* terjadi dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa kepada tenaga teknis, terutama tenaga teknis bidang susastra.

*School of Oriental and African Studies (SOAS)*

Kerja sama antara SOAS dan Pusat Bahasa terlaksana dalam bentuk pemberian fasilitas pendidikan serta penelitian kebahasaan dan kesastraan untuk tenaga teknis dan tenaga peneliti Pusat Bahasa, terutama tenaga peneliti bidang susastra. Selain itu, kerja sama juga berupa pemberian bantuan tenaga ahli kesastraan, antara lain, dalam kegiatan penyusunan buku sejarah sastra Indonesia modern.

*Unesco*

Kerja sama dengan *Unesco* dilaksanakan dalam bentuk penerbitan *Kamus Hidrologi* dan Kamus Hidrogeologi.

# BAGIAN KETIGA
# PANDANGAN TOKOH

# 1

# PELESTARIAN BAHASA DAERAH

**Edi Sedyawati**
Direktur Jenderal Kebudayaan

*Fungsi Bahasa Daerah di Indonesia*

Untuk Indonesia masa kini, yaitu Indonesia yang mewujud ke dalam kesatuan bangsa Indonesia yang merdeka dan membentuk negara Republik Indonesia, bahasa daerah mempunyai peranan yang khas. Keseluruhan bahasa daerah, yaitu bahasa-bahasa dari berbagai suku bangsa Indonesia, di satu di sisi mempunyai peranan yang berkelanjutan dari masa lalu sebagai pemberi jatidiri suku bangsa yang bersangkutan, dan sisi lain mempu. yai peranan baru sebagai sumber khazanah dan sumber gagasan (konsep) untuk memperkaya bahasa kesatuan nasional, bahasa Indonesia.

Aktualisasi fungsi tersebut sudah tentu memerlukan berbagai sarana, baik berupa struktur-struktur dalam tata masyarakat yang memungkinkan dijalankan, maupun berupa program-program yang memberikan arah dan mutu bagi aktualisasi fungsi itu. Keberadaan

lembaga-lembaga pembina, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun oleh kalangan swasta, seperti yang bergerak di bidang pendidikan, pengkajian, ataupun pelestarian adat-istiadat, merupakan sarana struktural yang diperlukan untuk aktualisasi fungsi bahasa daerah, sedangkan program-program pada bidang-bidang yang sama diperlukan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran dan mengarah ke mutu hasil kerja yang tinggi.

Program pengkajian, misalnya, perlu secara sistematis diarahkan kepada pengadaan data dasar untuk pengetahuan bahasa-bahasa daerah (daftar kata, kamus dua arah, fonologi, morfologi, sintaksis, contoh-contoh teks) dan kepada pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahasa tersebut, misalnya berkenaan dengan simbol dan gaya bahasa, serta masalah-masalah kebahasaan yang terkait dengan struktur dan hubungan-hubungan sosial. Program pendidikan perlu memberikan kedudukan yang jelas dari pengajaran bahasa daerah, baik di sekolah-sekolah umum maupun di sekolah-sekolah khusus, serta baik sebagai bahasa ibu maupun sebagai bahasa kedua. Adapun program pelestarian adat-istiadat yang terkait dengan bahasa daerah sangat tergantung pada eksistensi bahasa daerah itu masing-masing.

*Eksistensi Bahasa Daerah*

Dapat dikatakan bahwa suatu bahasa daerah akan tetap hidup selama ada fungsi-fungsi yang dilayaninya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Di antara fungsinya yang paling dasar adalah sebagai sarana komunikasi. Dalam hal ini perlu disimak fungsi komunikasi ini dalam dua arena yang berbeda, yaitu arena domestik dan arena publik. Secara umum dapat diamati bahwa dalam arena domestik bahasa daerah ini kurang lebih mantap penggunaannya jika keluarga yang bersangkutan seluruhnya berasal dari suku bangsa yang sama, dan keluarga tersebut tinggal dari suku bangsa yang sama pula. Dalam komuniti seperti itu, biasanya bahasa daerah banyak pula digunakan di arena publik, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam konteks upacara resmi.

Fungsi seremonial dari bahasa daerah ternyata merupakan faktor penting pula untuk memperkuat eksistensi bahasa tersebut. Ketetapan

untuk menggunakan bahasa daerah dalam upacara-upacara adat tertentu, lebih-lebih yang terkait dengan daur hidup, membuat khalayak tetap dapat mendengar penggunaan bahasa tersebut dari waktu ke waktu. Masalahnya di sini adalah bagaimana membuat tingkat pemahamannya dari generasi ke generasi tidak merosot.

Landasan eksistensi bahasa daerah yang lebih kokoh lagi dapat diharapkan muncul dari fungsinya sebagai sarana ekspresi seni. Bidang seni yang paling menentukan adalah sastra, yang substansinya adalah bahasa. Namun, bisa saja terjadi bahwa eksistensi sastra daerah itu sendiri sebenarnya ditopang oleh minat orang orang yang lebih besar kepada seni musik dan seni teater dalam arti luas. Musik memberikan peluang kepada sastra yang dinyanyikan, sedangkan teater memberikan peluang kepada sastra yang dimainkan. Pesona pentas dan musik itulah yang sering kali membawa kepada kebutuhan untuk juga memahami sastra secara lebih daripada hanya sepintas lalu.

*Batas-batas Budaya yang Bergerak*

Budaya (termasuk di dalamnya bahasa) adalah milik masyarakat. Dari masa ke masa kita melihat orang-orang berpindah tempat, baik sebagai fungsi dari proses "menjadikan Indonesia" maupun sebagai akibat dari perubahan-perubahan terencana yang diprogramkan oleh negara. Dalam proses meng-Indonesia itu terdapat kenyataan masa kini bahwa orang melihat Indonesia sebagai suatu keseluruhan lapangan kerja, sebagai keseluruhan sumber belajar, serta juga sebagai keseluruhan daerah pelayanan. Oleh karena itulah, orang-orang Indonesia yang belajar ataupun bekerja, pada Pemerintah maupun swasta, dapat berpindah-pindah tempat, melintasi perbatasan daerah asal kesukuannya.

Di antara "perubahan terencana" yang diprogramkan oleh negara dapat disebut, misalnya transmigrasi dan pembuatan jalan-jalan raya serta pengembangan sistem transportasi lain yang semuanya itu mempermudah orang bepergian dari satu tempat ke tempat lain, khususnya di dalam negeri sendiri. Sebagai akibat dari pergaulan antarsuku bangsa yang semakin mesra dan semakin tinggi frekuensinya, kini perkawinan antarsuku bangsa sudah tidak dirasakan lagi sebagai

sesuatu yang asing atau perlu dijadikan sumber gunjingan. Ada kesan bahwa keluarga yang terjadi dari perkawinan campuran cenderung memilih bahasa Indonesia untuk komunikasi domestik; dorongan untuk penggunaan salah satu bahasa daerah hanya didapat jika komuniti setempat masih intensif menggunakan bahasa daerah tersebut.

Dinamika sosial dan mobilitas penduduk itu membuat batas-batas budaya selalu dapat bergeser. Sosok budaya itu sendiri, baik pada masing-masing kebudayaan suku bangsa maupun pada kebudayaan nasional Indonesia, senantiasa berubah mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi. Namun, bagaimana pun perubahan itu, biasanya ada sesuatu atau sejumlah ciri dominan yang selalu bertahan dan menjadi penanda kebudayaan yang bersangkutan, walaupun telah mengalami transformasi sebagai akibat dari pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan lain.

*Pengajaran Bahasa Daerah*

Di samping pengajaran bahasa daerah sebagai *bahasa ibu,* kini sudah amat mendesak untuk diupayakan pula secara sistematis pengajaran bahasa daerah sebagai *bahasa kedua.* Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dalam sistem persekolahan kita secara normatif telah ditetapkan untuk murid sekolah dasar kelas satu sampai dengan tiga. Selanjutnya, di dalam komuniti-komuniti yang kurang lebih homogen, bahasa daerah itu dapat diperdalam dengan memasukkannya sebagai mata pelajaran tersendiri, dan dimasukkan sebagai bagian dari "muatan lokal" yang dialokasikan di dalam kurikulum yang sekarang berlaku. Namun pelaksanaan norma itu pun belum sepenuhnya memadai, khususnya dalam kemerataan mutunya antar daerah.

Adapun pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua, yang juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari muatan lokal, amat diperlukan bagi komuniti-komuniti yang tidak terlalu homogen, seperti misalnya di daerah perkotaan, atau di kawasan-kawasan di mana tinggal bersama penduduk dari berbagai asal kesukuan. Di sini, dengan penyediaan pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua itu,

murid yang bukan penutur asli dapat belajar bahasa setempat dengan lebih nyaman, tanpa tekanan dari ketidakkenalan.

Langkah terpenting yang harus segera diambil adalah penetapan sasaran kajian yang lebih luas (bandingkan dengan fakta terdapatnya lebih dari 300 bahasa daerah di Indonesia) dengan pengerahan daya keahlian yang lebih besar. Ini Berarti tantangan bagi para ahli bahasa, di lembaga mana pun ia berada. Dalam hal ini Pusat Bahasa harus mengambil peranan sebagai koordinator dan pengarah program makronya. Setelah pengkajian menyusul tindakan yang amat penting untuk memungkinkan bahasa daerah diajarkan secara bertanggungjawab, yaitu penyusunan bahan ajar, sekaligus ke dalam jenjang-jenjang kompetensi.

Penawaran mata pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Kedua kiranya terutama paling tepat untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi. Mempelajari bahasa daerah di tempat asal bahasa yang bersangkutan dapat berarti menguasai sarana untuk dapat memahami budaya setempat secara lebih utuh sehingga dapat terjadi saling menghargai secara lebih mendalam. Pada tingkat kesiapan yang lebih lanjut dapat pula ditawarkan lebih dari satu bahasa daerah di sebuah sekolah, seorang murid dapat memilih atau mengambil semuanya. Pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua itu dapat ditujukan pada murid-murid yang bukan penutur asli, maupun murid-murid yang merupakan anak dari penutur asli, tetapi penguasaan bahasa daerahnya itu tidak lagi mantap. Pada tingkat kesiapan yang mana pun, pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua harus dilihat dalam fungsinya sebagai sarana integrasi bangsa, yaitu khususnya integrasi melalui saling menghargai dan saling mempelajari.

# 2

## VISI HIMPUNAN PEMBINA BAHASA INDONESIA (HPBI) TERHADAP PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

**Andi Mappi Sammeng**
Ketua Umum Himpunan Pembina Bahasa Indonesia

Butir ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, yang berbunyi "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia" merupakan langkah pertama yang menentukan di dalam perumusan garis haluan mengenai bahasa nasional kita. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV, pasal 36, yang menyatakan bahwa "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia", merupakan dasar hukum yang kuat dan resmi bagi pemakaian bahasa Indonesia bukan saja sebagai bahasa perhubungan pada tingkat nasional, tetapi juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di samping itu, politik bahasa nasional (yang dihasilkan oleh Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1972) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa resmi dan bahasa negara juga dijadikan pijakan dalam merumuskan garis haluan bahasa nasional. Pernyataan politik dan dasar hukum tersebut merupakan dasar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam berbagai bidang yang cukup luas: sebagai bahasa pendidikan, sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa pemerintahan, bahasa hukum, dan sebagainya.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan terus-menerus yang mencakup dua kegiatan besar, yakni pembinaan dan pengembangan bahasa. Pembinaan bahasa ditujukan kepada peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia atau upaya mempengaruhi penutur sehingga pemakaian bahasanya menggunakan kaidah, sedangkan pengembangan ditujukan kepada penyempurnaan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara.

Peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui (1) penyediaan berbagai sarana, seperti buku yang dapat memberikan panduan bagi masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia, (2) penyediaan tenaga penyuluh, dan (3) penyediaan tenaga penerjemah yang handal (dari bahasa Indonesia ke bahasa Asing atau sebaliknya. Penyediaan tenaga penerjemah ini sangat penting karena era globalisasi informasi yang berkembang dengan cepat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa kita. Dalam percaturan global itu HPBI memandang bahwa bahasa Indonesia harus bisa memainkan peranannya. Tidak hanya di dalam kawasan regional, tetapi juga di kawasan internasional. Dengan demikian, HPBI menyarankan bahwa di dalam pertemuan-pertemuan resmi kenegaraan, baik nasional maupun internasional, perutusan dari Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, untuk memperlancar dalam berkomunikasi, perlu disediakan tenaga penerjemah yang handal yang dapat menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya.

Era globalisasi informasi juga berpengaruh terhadap persepsi, wawasan dan sikap masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kesadaran dan kecintaan berbahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan identitas nasional. Mengingat perubahan tersebut terjadi secara berkelanjutan maka upaya pembinaan bahasa pun perlu dilakukan secara berkelanjutan pula.

HPBI memandang bahwa upaya pembinaan bahasa nasional tersebut dapat bersifat jangka panjang, menengah maupun pendek. Pembinaan jangka panjang dilakukan melalui dua jalur, yaitu sekolah dan masyarakat. Pembinaan itu bertujuan untuk memberi kesadaran

dan kecintaan pada masyarakat serta memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Dalam rangka membangun sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yang antara lain ditandai oleh kemahiran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam jalur sekolah perlu dikembangkan teori pengajaran bahasa Indonesia yang dapat dipakai sebagai landasan penyusunan metode pengajaran bahasa Indonesia yang menggairahkan dan menarik minat peserta didik. Pengajaran bahasa juga harus dapat menjawab persoalan kurangnya penguasaan kosakata dan keterampilan berbahasa Indonesia para siswa, sebagaimana sering dikeluhkan.

Pembinaan bahasa nasional dalam jangka menengah dan pendek dilakukan terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan kemampuan bahasa Indonesia yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping itu, hal yang juga perlu dilakukan ialah meluruskan persepsi negatif sebagian warga masyarakat tentang bahasa Indonesia. Persepsi negatif tentang potensi bahasa Indonesia ini terjadi seiring dengan makin menggejalanya penggunaan bahasa asing dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam dasawarsa terakhir ini, misalnya, kita melihat gejala maraknya penggunaan bahasa Inggris di dunia bisnis. Hampir menjadi anggapan umum bahwa bisnis yang tepercaya adalah bisnis yang dikomunikasikan dengan bahasa asing. Nama produk, merek dagang, perusahaan, lokasi, gedung, jenis usaha, semua dinyatakan dalam bahasa asing. Melalui program jangka pendek, HPBI telah menyoroti dan memberi pengarahan terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada media massa, papan nama, kain rentang, papan petunjuk jalan, dan papan reklame.

Sementara itu, dalam program jangka menengah, HPBI mengadakan peningkatan dan perluasan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, instansi pemerintah pusat dan daerah, insan pers, penerbit, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan semua organisasi kemasyarakatan atau politik dalam rangka mewujudkan cita-cita pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

# 3

# TUNTUTAN KESETARAAN

**Bambang Kaswanti Purwo**
Ketua Umum Masyarakat Linguisti Indonesia (MLI)

Pada masa-masa awal setelah proklamasi kemerdekaan RI--sebelum lahirnya Pusat Bahasa--pada banyak tempat dapat dijumpai papan bertuliskan "Gunakanlah Bahasa Indonesia". Imbauan ini dirasakan perlu waktu itu supaya orang mulai membiasakan diri menggunakan bahasa nasional dan tidak lagi memakai bahasa Belanda dalam percakapan sehari-hari. Pada masa orde baru selama beberapa dekade terakhir ini--setelah Pusat Bahasa lahir--imbauan berganti menjadi "Pakailah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar", dan belakangan ini diperbarui menjadi "Berbahasa Indonesialah dengan Baik dan Benar". Imbauan ini dilandasi oleh keinginan agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang memiliki sistem yang lebih mantap: bahasa baku. Seiring dengan itu, para penuturnya pun diharapkan mau dan mampu menguasai penggunaan bahasa baku itu.

Sudah hampir dua puluh lima tahun Pusat Bahasa bergigih memasyarakatkan imbauan itu, melakukan berlaksa-laksa penyuluhan

ke berbagai penjuru. Buku tata bahasa baku sudah terbit sampai edisi kedua dan tak lama lagi akan lahir edisi ketiganya. Kamus besar sudah sampai pada edisi kedua pula. Akan tetapi, jika direfleksikan: sudah berhasilkah usaha itu? Dari perencana bahasa, juga penyuluh bahasa, tidak jarang terdengar keluhan, misalnya, di banyak gerbang setiap kali menyambut hari kemerdekaan RI, masih banyak dijumpai penulisan secara salah: "Dirgahayu HUT RI ke ..." Belum lagi kesalahan penulisan istilah, penulisan ejaan, tanda baca, dan yang lain lagi.

Jika usaha itu dikatakan "belum berhasil", apa kiranya langkah yang dapat menjadi alternatif lain? Pendekatan "penyuluhan", apalagi yang bernada "instruktif", sudah saatnya ditinggalkan, pada era reformasi ini.

Bersamaan dengan itu pula imbauan yang lahir pada masa orde baru itu pun janganlah dipakai lagi.

Ada dua alasan mengapa imbauan itu perlu ditinggalkan. Pertama, telah terjadi perbedaan tafsiran mengenai arti "bahasa yang baik dan benar". Khalayak menganggap bahwa "bahasa yang baik dan benar" identik dengan "bahasa baku", padahal menurut perencana dan penyuluh bahasa, "baik" dan "benar" merupakan dua hal yang terpisah (TBBI, edisi kedua, 1993:22).

(1) Berapakan Ibu mau menjual bayam ini? [tidak baik, benar]
(2) Berapa nih, Bu, bayemnya? [baik, tidak benar]

Kalimat (1) adalah ragam baku, tetapi itu bahasa yang "tidak baik dan benar. Kalimat (2) adalah ragam tak baku, dan itu dapat disebut sebagai bahasa yang "baik dan tidak benar". Akan tetapi, apa jawabannya jika ditanyakan kepada guru yang mengajar bahasa Indonesia di sekolah: mana kalimat yang merupakan bahasa yang "baik dan benar"? Mereka akan mengatakan kalimat (1). Kalimat (2) adalah contoh kebalikannya.

Hal kedua yang merupakan persoalan ialah pengertian "benar" dan "tidak benar". Pengertian "benar" dan "tidak benar"--menurut Pusat Bahasa--yang terdapat pada contoh (1) dan (2) berbeda dengan yang terdapat pada contoh (3) dan (4).

(3) dididik [benar]
(4) di didik [tidak benar]

Pengertian "benar" dan "tidak benar" pada (1) dan (2) merupakan tipe-tipe kalimat, yang masing-masing memiliki koteksnya sendiri-sendiri: yang pertama konteks formal dan yang kedua konteks informal. Adapun pengertian "benar" dan "tidak benar" pada (3) dan (4) merupakan contoh kasus yang mengikuti atau tidak diikuti kaidah baku (atau yang dibakukan).

Kecampuradukan pengertian ini, sekalipun selama ini belum tentu disadari sebagai sesuatu yang campur aduk, membingungkan para pemakai bahasa Indonesia, termasuk para pengajarnya, terutama di peringkat pendidikan dasar dan menengah. Suasana kebingungan dan pembingungan ini sudah barang tentu tidak merupakan daya dukung positif bagi "misi baik" yang dicanangkan sekitar dua puluh lima tahun yang lalu oleh Pusat Bahasa.

Keadaan diperumit lagi oleh apa yang tersirat dari penamaan "benar" dan "tidak benar" pada contoh (1) dan (2). Untuk contoh (3) dan (4) hal itu tidak menjadi masalah karena berkenaan dengan "penguasaan bahasa": tidak ada sangkut pautnya dengan konteks pemakaian. Namun, untuk contoh (1) dan 2), penamaan itu menyiratkan bahwa pengertian "benar"--oleh Pusat Bahasa--hanya diberlakukan untuk kalimat yang menyandang sebutan "baku". Kalimat (2), yang dijumpai pada konteks informal, tidak "layak" memperoleh sebutan "benar". Sekalipun benar-benar dipakai dan dijumpai sebagai bahasa yang hidup.

Jadi, meskipun kalimat seperti pada (1)--dalam perbincangan linguistik--dapat disebut "ragam tinggi" dan kalimat seperti pada (2) "ragam rendah", itu hanyalah istilah atau penamaan saja. Kalimat seperti pada (2) tidak perlu "direndahkan" sebagai kalimat yang tidak pernah dapat disebut sebagai kalimat yang "benar". Istilah "benar" dan "tidak benar" dapat tetap dipakai pada contoh (3) dan (4) karena tidak ada sangkut-pautnya dengan ragam formal dan informal, tetapi janganlah lagi pada contoh (1) dan (2).

Kalimat tipe (2) dan kalimat tipe (1) sama-sama merupakan bahasa yang "hidup". Perbedaannya hanyalah terletak pada konteks pemakaiannya. Keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling "menidakkan" (*complementary*), saling melengkapi, dan tidak dapat saling menggantikan. Oleh karena itu, keduanya layak memperoleh perlakuan yang setara. Kalau yang satu dilimpahi banyak perhatian (banyak diteliti, dibuatkan buku tata bahasanya, kamusnya) yang satu juga samalah perhatiannya. Tidak ada pilih kasih, tidak ada anak mas dan anak tiri.

# 4

# PUSAT BAHASA DI MATA HISKI

**Mursal Esten**
Ketua Umum Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski)

Di mata Hiski (Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa) lebih dari sekadar *mitra*, Pusat Bahasa amat berperan membina dan mengembangkan profesi para sarjana kesusastraan di seluruh Indonesia.

Hampir seluruh sarjana kesusastraan di Indonesia berurusan dengan Pusat Bahasa. Mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pusat Bahasa. Mereka ikut sebagai peserta (penatar dan petatar) di dalam penataran-penataran yang dirancang oleh Pusat Bahasa. Kehadiran Hiski sebagai organisasi profesi diprakarsai oleh para alumni penataran sastra Pusat Bahasa itu. Sejumlah doktor sastra di Indonesia lahir melalui program (kerja sama) Pusat Bahasa. Sebutlah, misalnya, nama-nama Fachruddin Ambo Enre, Suripan Sadi Hutomo, Rachmat Djoko Pradopo, Okke F. Zaimar, Edwar Djamaris, Nani Tuloli, Nafron Hasjim, Faruk HT,

Mursal Esten, Sri Rahayu Prihatmi, dan sejumlah master sastra di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Dari segi itu, peran Pusat Bahasa memanglah amat luar biasa. Akan tetapi, dibandingkan dengan perannya di dalam bidang kebahasaan, peran Pusat Bahasa dalam bidang kesastraan dirasakan masih perlu ditingkatkan. Di dalam bidang kebahasaan Pusat Bahasa telah melahirkan karya-karya yang monumental, seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia,* konsep tentang *EYD, pedoman penyusunan peristilahan, istilah-istilah Indonesia berbagai bidang ilmu, Politik Bahasa Nasional,* dan lain-lain. Dalam bidang sastra dapat dikatakan belum ada karya-karya monumental yang dihasilkan Pusat Bahasa.

Saya tidak tahu persis penyebabnya. Apakah karena di Pusat Bahasa tidak ada orang yang memiliki kewibawaan (akademis) sekaliber *Prof. Dr. Anton M. Moeliono* atau *Prof. Dr. Amran Halim* di bidang sastra? Kedua pakar bahasa itu telah memberi warna yang amat dominan terhadap kiprah Pusat Bahasa dan telah melahirkan karya-karya monumental dalam bidang bahasa. Akan tetapi, dalam bidang sastra?

Apakah kendala itu menyangkut ruang lingkup tugas? Bahwa Pusat Bahasa hanya menitikberatkan tugas dan perannya dalam bidang bahasa saja? Agaknya, bukan. Selama ini Pusat Bahasa juga telah melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak dalam bidang sastra. Akan tetapi, belum begitu berarti, belum bersifat monumental.

Di tengah-tengah kehidupan sastra Indonesia yang memprihatinkan, seyogianya Pusat Bahasa ikut peduli. Keprihatinan yang terjadi di dalam *wilayah penikmat* (sastra), *wilayah penciptaan,* dan *wilayah teori dan kritik* haruslah mendapat perhatian Pusat Bahasa.

Pusat bahasa diharapkan mengambil prakarsa untuk menyiapkan *buku-buku kritik apresiatif* terhadap beberapa karya-karya sastra Indonesia yang penting seperti *Belenggu, Atheis, Jalan Tak Ada Ujung, Robohnya Surau Kami, Pengakuan Pariyem, Sri Sumarah dan Bawuk, Warisan,* ataupun *Saman.* Pusat Bahasa memprakarsai untuk melanjutkan *antologi cerpen* sebagaimana yang telah dirintis oleh Satyagraha Hoerip dulu. Di samping memberi penghargaan kepada sastrawan

(dengan hadiah yang memadai) setiap kali kongres (5 tahun sekali) Pusat Bahasa juga dapat menyelenggarakan *Sayembara Penulisan Roman* dengan hadiah 10 atau 20 juta rupiah.

Di dalam bidang teori dan kritik sastra perlu dirumuskan suatu bentuk teori dan kritik sastra yang relevan. Perlu dicari dan dirumuskan suatu *poetica* sastra Indonesia ataupun Melayu. Pusat Bahasa dan Dewan Bahasa dan Pustaka dapat memprakarsai suatu pertemuan ilmiah dengan mengundang para pakar sastra dari kedua bangsa serumpun.

Untuk membina dan mengembangkan sastra Indonesia, terutama yang menyangkut tiga wilayah sastra (penikmat, pencipta, serta teori dan kritik), diperlukan suatu *politik sastra nasional* yang akan menjadi acuan bagi setiap kebijakan dan usaha. Kongres Bahasa Indonesia VII mudah-mudahan dapat memberikan rekomendasi terhadap pentingnya suatu politik sastra nasional.

Semuanya itu tentulah tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pusat Bahasa. Keterbatasan, baik dalam jumlah kewibawaan akademis, yang dimiliki Pusat Bahasa, memerlukan pihak-pihak lain untuk melaksanakan program-program dan hasil karya yang monumental dalam bidang sastra. Salah satu pihak tersebut adalah Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia yang secara historis juga merupakan produk dari Pusat Bahasa.

Dengan demikian, di mata Hiski, Pusat bahasa tidak hanya mitra, tetapi juga adalah *harapan*. Di mata Hiski, Pusat Bahasa bukanlah hanya sebuah lembaga teknis tentang kebahasaan, tetapi adalah sebuah lembaga kebudayaan yang berperan terhadap nilai-nilai budaya bagi kelangsungan hidup bangsa. Hiski yakin, Pusat bahasa mempunyai kemampuan untuk menjadi gantungan harapan yang demikian.

# 5

# PERAN PUSAT BAHASA DALAM PEMBINAAN PERISTILAHAN ILMU DAN TEKNOLOGI INDONESIA

**Mien A. Rifai**
*Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, Jakarta*

Ketika memodernkan bahasa Indonesia melalui penyempurnaan sistem ejaannya pada awal tahun 1970-an, kebijakan penting lain yang bersamaan digariskan juga oleh Lembaga Bahasa Nasional--yang kemudian dijelmakan menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa--adalah membina peristilahan keilmuannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada saat diterbitkannya *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* pada tahun 1975, diterbitkan pula *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jarang orang mengetahui bahwa kedua pedoman mahapenting tersebut merupakan contoh nyata hasil sinergi kegiatan kerja sama sekumpulan pakar bahasa dan pakar ilmu dan teknologi. Seandainya kedua kelompok pakar tadi bekerja sendiri-sendiri, pastilah tidak mungkin dalam waktu yang relatif pendek akan dapat dibuahkan perangkat panduan yang begitu komprehensif cakupannya, amat luas dampaknya, serta bervisi sangat jauh ke depan.

Keberhasilan gemilang ini merupakan kredit bagi jajaran pimpinan Pusat Bahasa selama ini karena dengan sabar tetepi gigih serta bertaat asas mereka terus membuka peluang untuk mempertemukan secara fisik kedua kelompok pakar--yang karena hakikat dan fitrah bidang kespesialisasiannya sering kali bersilang pendapat--untuk mempersatukan pandangan yang berbeda. Menarik untuk dicatat kerajinan seorang pakar fisika dalam mengumpulkan sinonim kata-kata 'terlupakan' untuk dijadikan contoh dalam pedoman ejaan yang sedang digarap, atau kesungguhan seorang pakar intonasi mencoba memahami konsep biologi yang sulit agar bisa memberikan pertimbangan kebahasaan dalam mencarikan padanan istilah yang berkaitan dengan kehidupan sel hewan. Agaknya memang akan sulit diulang atau ditemukan tolok bandingannya pola kebersamaan dalam bekerja tanpa pamrih sejemput ilmuwan berlatar belakang berbagai disiplin ilmu, yang dengan hanya bermodalkan kecintaannya pada bahasa Indonesia telah berjaya meletakkan landasan yang kokoh untuk mencendekiakan bahasa bangsanya itu. Kepedulian dan *commitment* mereka akan bahasa Indonesia yang baik dan benar telah membuahkan hasil bermanfaat yang secara nyata dapat dijadikan titik tolak untuk memajukan bahasa dan dengan demikian untuk meningkatkan harkat bangsanya.

Sebagai akibatnya dalam tiga dasawarsa terakhir ini pembakuan bahasa keilmuan menunjukkan kemajuan yang sangat mencolok dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena selain peristilahan ilmu-ilmu dasar (biologi, fisika, kimia dan matematika) yang diprioritaskan penanganannya, telah digarap pula puluhan bidang lain yang dianggap penting, mulai dari pertanian sampai akuntansi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sekarang telah tersusun suatu senarai berisikan hampir 150.000 istilah ilmiah yang secara nyata memperkaya kosakata Bahasa Indonesia. Pekerjaan raksasa ini telah melibatkan ratusan pakar bermacam bidang ilmu yang bekerja di pelbagai instansi pemerintah dan swasta, yang dengan penuh ketekunan dipandu dan dibantu oleh pakar-pakar dari Pusat Bahasa. Seperangkat demi seperangkat senarai tadi yang sudah tuntas penggarapannya--terutama sesudah dicapai kesepakatan serantau

dengan pihak Malaysia dan Brunei Darussalam melalui kegiatan Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia (MABBIM)--lalu diterbitkan untuk diperkenalkan kepada masyarakat.

Sekalipun perangkat istilah yang dihasilkan sudah mengalami penilikan dan penyaringan berlapis yang sangat ketat, pembakuan istilah tadi tetap berada di tangan para pemakai bahasa di lapangan, khususnya para ilmuwan yang aktif melakukan penelitian dan giat menulis, menerbitkan serta menyebarluaskan hasil kegiatan kecendekiaannya. Pemakaian luas suatu istilah yang ditawarkan Pusat Bahasa menentukan keberterimaan dan dengan demikian pembakuan istilah bersangkutan. Istilah seperti *plasma nutfah* sebagai padanan istilah asing *germplasm* cepat dapat diterima masyarakat pemakai secara luas. Pada pihak lain, istilah *sintasan* untuk mengindonesiakan *survive* masih jarang dipakai orang, karena konsep *survive* sendiri memang tidak begitu sering dipergunakan orang dalam pembicaraan dan pembahasan sehari-hari. Sebaliknya istilah *hasil guna* dan *daya guna*, atau *mangkus* dan *sangkil*, ternyata kurang laku karena sulit dipahami maksudnya dan menimbulkan keragu-raguan, sehingga masyarakat pemakai lebih menyukai bentuk serapannya yaitu *efektif* dan *efisien*.

Berkat tersedianya perangkat peristilahan yang jumlahnya mencukupi tadi, dapatlah dimengerti jika tulisan ilmiah tentang bidang ilmu dan teknologi yang tercanggih pun kini sudah dapat dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan medium Bahasa Indonesia. Jumlah tesis magister, disertasi doktor, atau hasil penelitian dalam berkala ilmiah yang mengupas ilmu serba muskil seperti rekayasa genetika atau telematika, semakin hari semakin meningkat. Penggalakan tidak langsung ke arah ini terjadi karena untuk keperluan promosi karir seseorang, nilai kredit karya ilmiah berbahasa Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan karya yang ditulis dalam bahasa asing. Sejarah memang masih harus membuktikan apakah hasil karya keilmuan dalam Bahasa Indonesia tadi akan dapat mengangkat harkat ilmuwan penulisnya dalam kancah internasional. Satu hal sudah pasti: karya ilmuwan Indonesia sekaliber Sartono Kartodirjo atau Taufik Abdullah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia sudah sering diacu oleh ilmuwan asing dalam penelitian ilmiah terkait yang dilakukan mereka. Memang

ternyata bahwa karya yang bermutu akan selalu dicari untuk diacu oleh orang sejagat dengan tidak mempedulikan medium bahasa yang dipergunakannya.

Keberhasilan pembinaan istilah ilmiah Bahasa Indonesia ini memang belum sempurna sebab pemasyarakatan kosakata teknis yang begitu banyak tadi masih sering dirasakan kalangan pemakai kurang lancar jalannya. Senarai dan kamus yang sudah dirampungkan tidak mudah didapatkan di toko buku, karena kebijakan umum yang berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerbitan kurang mendukungnya. Sedikitnya tiras penerbitan senarai dan kamus tadi, serta mahalnya harga jual buku, ternyata ikut mengurangi kepesatan penggunaan istilah ilmiah yang dibentuk secara bersusah payah oleh Pusat Bahasa bersama mitra kerjanya. Akan tetapi, karena hanya bersifat teknis, masalah ini mungkin mudah untuk mengatasinya. Sekalipuin demikian, tidak mapannya budaya membeli buku di kalangan kaum terpelajar Indonesia--antara lain karena mahalnya harga buku di pasaran--merupakan masalah tersendiri yang juga harus segera dipecahkan.

Hambatan lain yang lebih sulit penyelesaiannya adalah tidak sempurnanya penguasaan kemampuan berbahasa yang baik dan benar di kalangan peneliti Indonesia. Selain itu, ketaatasasan dan kedisiplinan mereka dalam menggunakan peristilahan juga tidak begitu kokoh, dan keadaan ini diperburuk oleh kuatnya tradisi yang menumbuhkan 'dialek' setempat karena kuatnya pengaruh almamater atau kondisi lingkungan kerja lainnya. Semua keadaan ini menyebabkan rendahnya kualitas karya ilmiah yang diterbitkan peneliti Indonesia sehingga kurang bergaung dampaknya dalam kancah nasional apalagi di forum internasional. Persoalan ini semakin diperberat oleh rendahnya kuantitas karya ilmiah yang diterbitkan secara mapan oleh mereka sehingga juga merupakan penghalang upaya mempercepat pemasyarakatan istilah tadi. Bermacam ragam kendala ini bersifat seperti lingkaran setan, yang pada akhirnya tidak menjadikan senarai dan kamus istilah ilmiah sebagai komoditas yang mutlak diperlukan para ilmuwan pelaku ilmu dan teknologi untuk

dapat mempertahankan kedudukan pangkat ataupun status sosial mereka di masyarakat.

Dengan sendirinya tidak semua masalah seputar pembinaan istilah ilmiah itu menjadi tanggung jawab Pusat Bahasa semata-mata. Semua warga negara Indonesia berkepentingan untuk memodernkan dan mencendekiakan Bahasa Indonesia, sehingga mereka berkewajiban untuk ikut bahu-membahu bersama dengan Pusat Bahasa memajukan bahasa nasional kita itu. Keproaktifan semua pihak memang dituntut agar hasil gemilang yang sudah diraih berkat kegiatan Pusat Bahasa selama ini tidak luntur begitu saja oleh gangguan riak yang kalau tidak diwaspadai berpotensi untuk membengkak dan tumbuh menjadi gelombang yang berbahaya bagi perkembangan Bahasa Indonesia selanjutnya. Dalam jangka panjang, sebagai pemilik bahasa pusaka ini kita harus bertekad untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dunia, atau paling tidak salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

# 6

# PUSAT BAHASA: KENANGAN DAN HARAPAN

Taufik Abdullah

Rasanya saya pernah mengenal sebuah peribahasa lama yang menyatakan--kalau boleh memakai bahasa yang berilmiah-ilmiah--bahwa sudut pandangan kita menentukan bentuk realitas objektif yang kita hadapi. Jadi, realitas sering dilihat secara subjektif. Barangkali peribahasa itu berbunyi "lain tempat berdiri, lain yang tampak". Tetapi, barangkali juga bukan begitu bunyinya. Menyesal juga saya dengan kelupaan saya ini. Saya merasa kehilangan sebuah hiasan dalam proses wacana. Kehilangan saya rasakan--kalau dibolehkan sekali lagi bergaya yang meninggi-ninggi--sebagai contoh sederhana dari "kerugian kultural" dalam proses perubahan. Bukankah ini ucapan yang meninggi-ninggi? Meskipun begitu, saya berharap mudah-mudahan nanti saya dapat menemukan kembali apa yang saya rasakan sebagai kehilangan ini.

Dengan mengatakan ini saya tanpa sengaja telah menyampaikan sebuah harapan pada Pusat Bahasa. Bagaimanakah dalam usaha "pengayaan" (atau *enrichment*, kalau mengikuti kebiasaan saya yang kurang terpuji dalam memakai bahasa) perbendaharaan kultural

bahasa, ingatan terhadap sesuatu yang telah dimiliki tidak hilang begitu saja? Dengan sengaja saya mengatakan "ingatan", bukan "pemakaian". Saya sadar bagaimanapun juga pilihan kosakata, ragam, dan gaya bahasa dalam proses dialog tidak hanya tergantung pada perubahan sosial dan kultural dan kebiasaan pribadi, tetapi juga pada kesadaran waktu atau sebut saja, waktu sosial.

Mengapa saya berpanjang-panjang, padahal saya cuma ingin mengatakan bahwa saya hanya akan berbicara tentang Pusat Bahasa dari sudut tempat saya berdiri? Tetapi, sudahlah, bukankah tidak selalu terlalu mudah untuk membedakan mana yang esensial dan mana pula yang aksidental dalam proses dialog? Mula-mula Pusat Bahasa hanya tampil di hadapan saya sebagai pembuat istilah" atau, barangkali lebih tepat, "penerjemah istilah" ilmiah. Manfaat kerjanya saya rasakan sekian puluh tahun yang lalu ketika saya yang tidak pernah sempat belajar bahasa Belanda (maklumlah saya "anak Kiblik yang revolusioner ", menurut ungkapan awal tahun 1950-an) menjadi mahasiswa yang harus membaca literatur yang berbahasa kolonial itu. Selanjutnya, bagi saya Pusat Bahasa adalah "ejaan yang disempurnakan", "pemeran TV tentang berbahasa yang baik dan benar", "penyelenggara Kongres Bahasa", "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Dan, terlebih lagi--bahkan kini terasa lebih dari yang lain-lain--bagi saya Pusat Bahasa adalah penerbit naskah-naskah lama, yang telah ditranskripsikan ke huruf Latin atau, bahkan, diterjemahkan, ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun kadang-kadang saya menggerutu juga pada "kepelitan" Pusat Bahasa untuk sekadarnya memberitahukan kepada saya, sang pembaca, tentang berbagai keterangan yang elementer mengenai naskah yang diterbitkan itu--tentang tahun penulisan, versi yang dipakai, pengarang atau penyalin, dan sebagainya--tetapi jasa penerbitan ini bagi kerja keilmuan saya tak ternilai artinya. Melalui naskah-naskah yang telah mengalami "pemudahan" yang sangat hebat ini saya seakan-akan untuk alam pikiran dan "ingatan sejarah" dari berbagai tradisi kita yang hidup-dua-tiga abad yang lalu. Bagaimanakah kalau sekiranya saya sendiri yang harus mencari dan berhadapan langsung dengan naskah yang belum dicetak, ditranskripsikan, atau balum diterjemahkan?

Di samping itu, bagi saya Pusat Bahasa adalah pula *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* yang saya rasakan sebagai enggan bersahabat dengan saya, bahkan seakan-akan mengumumkan "perang terbuka" kepada saya. Buku ini, seperti saya katakan dalam sumbangan saya yang dimuat sebagai "epilog" dalam *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996), menjadikan saya sebagai "orang luar", yang tak berhak mengetahui, jangankan ikut bicara, masalah "orang dalam". Pendeknya saya seakan-akan mera-sakan "cinta yang ditolak". Tata bahasa telah menjadi wilayah yang bersifat esoteris. Tetapi, biarlah, tata bahasa memang bukan cangkir kopi saya. Dan lagi, bukankah kekecewaan adalah irama dari kehidupan? Namun begitu, saya teringat pada dua kejadian yang menarik dalam "biografi" Pusat Bahasa.

Kejadian pertama berkaitan dengan almarhum Prof. Sutan Takdir Alisjahbana. Siapakah yang akan dapat membantah bahwa Pak Takdir (atau STA) adalah salah seorang "pejuang bahasa" yang paling terkemuka? Penulis novel, redaksi Balai Pustaka, penerbit dan editor majalah Poedjangga Baroe, anggota Komisi Istilah, penulis *Tata Bahasa Indonesia*, yang sekian lama dipakai di sekolah-sekolah, dan entah apa lagi. Dengan latar belakang seperti ini, bukankah aneh juga terasa ketika beberapa tahun yang lalu (1986) ia dengan lantang mengusulkan agar Pusat Bahasa dibubarkan saja? Karena aneh, terbersit juga sebuah pertanyaan. Apakah ia bersungguh-sungguh dengan usulnya ini?

Barangkali tidak. Sebagai seorang ahli hukum ia tentu tahu juga bahwa sebuah lembaga kenegaraan tidak mungkin dibubarkan hanya karena kejengkelan yang dilontarkan seseorang, betapapun mungkin terhormatnya ia dalam masyarakat. Kalau usul itu datang dari Presiden atau Menteri, tentu saja masalahnya berbeda. Namun, serius atau tidak Pusat Bahasa--entah sengaja, entah bukan--seakan-akan tertantang untuk mengadakan serangan balik. Inilah kejadian kedua. Berkat *lobby* yang kelihatannya cukup canggih dari para pentolan dan mantan pentolan Pusat Bahasa, Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) pun tampil dengan usul agar status Pusat Bahasa dinaikkan ke tingkat lembaga nondepartemental. Jadi, terlepas dari departemen P dan K dan menjadi setingkat dengan status LIPI, BPPT, dan sejenisnya.

Maka, sebuah "panitia nasional"--atau apapun mungkin nama resmi-nya--dibentuk untuk memperjuangkan peningkatan status ini. Tampak-tampaknya ini bukan sekadar impian, tetapi sebuah usul yang benar-benar ingin diperjuangkan. Hanya saja, siapa pun juga yang tahu sekadarnya tentang sistem kenegaraan dan proses pengambilan keputusan, telah sejak awal memperkirakan bahwa perjuangan yang penuh semangat itu akan sia-sia belaka. Setelah sekian lama waktu berjalan memang ternyata juga bahwa perjuangan itu telah "layu sebelum berkembang.

Kedua kejadian ini hanya meninggalkan kenangan dan catatan saya, tetapi tidak mengubah apa-apa. Situasi "sebelum" dan "sesudah" tak memperlihatkan perbedaan yang berarti. Sebaiknya kita menganggap saja dua kejadian itu sebagai sebuah proses dialog dari dua pandangan yang sama-sama mencintai bahasa nasional. Usul STA yang berapi-api itu tak lebih dari pantulan kejengkelannya pada Pusat Bahasa. Secara khusus ia dongkol dengan istilah dan kata baru yang diperkenalkan Pusat Bahasa dan usul kongres bahasa adalah pantulan dari kekesalan mengapa "bahasa yang baik dan benar" masih juga belum merupakan realitas dalam proses komunikasi.

Usul STA tampaknya lebih dari sekadar kejengkelan saja sebab lama sebelum usul yang "radikal" itu dilontarkan ia juga telah mengecam strategi kebahasaan yang ditempuh Pusat Bahasa dalam berhadapan dengan dinamika dari masyarakat pemakai bahasa. Kalau ini yang menjadi masalah tampaknya ia tidak sendirian. Bahkan pada suatu saat, di peralihan dekade ketujuh abad ke-20, ketika ejaan baru akan diperkenalkan, siapakah yang tidak menyatakan "perang terbuka" pada Pusat Bahasa?

Apakah sesungguhnya yang menjadi masalah? Memang benar bahasa Indonesia bukanlah bahasa primordial, tetapi bahasa yang dengan sengaja dibina untuk menjadi bahasa nasional yang modern, kaya, dan tertata dengan baik. Akan tetapi, bukankah justru karena itu masyarakat bangsa beranggapan bahwa bahasa ini adalah juga milik mereka? Bukankah mereka adalah juga bagian dari proses pembentukan dan perwujudan bangsa? Kalau demikian, mereka--sang pemakai dan pecinta bahasa--merasa mempunyai hak untuk berbicara

tentang ke mana dan bagaimana sebaiknya bahasa ini dibina. Jika saja rentetan kejadian di sekitar "ejaan baru" diingat kembali, barangkali akan tampak bahwa yang menjadi masalah sesungguhnya bukanlah terutama soal perlu atau tidaknya perbaikan ejaan, bahkan juga bukan pula tentang corak perbaikan yang diperkenalkan. Keberatan umum yang utama ialah gaya hegemonik yang sengaja ataupun bukan yang ditampakkan oleh para pembina dan pengembang bahasa. Semakin para ahli bahasa memperagakan keahlian, semakin berkembanglah sinisme dan semakin jauhlah hasrat pembinaan tercapai. Tampaknya pembinaan bahasa--bahasa sebagai komunikasi simbolik yang menjadikan pertukaran pesan dapat berjalan lancar--dalam konteks yang hegemonik kurang sesuai.

Bahasa memang tak mudah dilepaskan dari sistem kekuasaan. Bahkan boleh dikatakan bahwa kekuasaan memerlukan perangkat bahasa untuk memperkuat legitimasi dan dominasinya terhadap masyarakat. Kebiasaan memakai kosakata yang "keras" (*violent words*) dan gaya serba hiperbol dari rezim Demokrasi Terpimpin atau euphemisme dan kramanisasi (dan sankritisasi simbol) dari rezim Orde Baru adalah contoh dari strategi penguatan paradigma politik dan legitimasi kekuasaan dengan memakaikan mekanisme bahasa. Akan tetapi, justru karena kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat antara kekuasaan yang hegemonik dengan pemakaian bahasa inilah kecenderungan hegemoni, yang bertolak dari kekuasaan, yang dipakaikan dalam usaha membina bahasa itulah sinisme bahkan oposisi terhadap pembinaan bahasa tak terelakkan. Jadi, jika saja pemahaman atas kecenderungan sosial ini diperhatikan, Kongres Bahasa tidak akan sampai pada usul peningkatan dan penambahan kekuasaan "demi pembinaan bahasa".

Sistem otoritas dalam bidang pengetahuan bahasa nasional tidak bisa disamakan dengan sistem otoritas dalam kedokteran, teknik, atau bahkan ekonomi sekalipun. Bahasa bukan sesuatu yang objektif yang "ada di sana" (*something out there*), tetapi adalah sesuatu yang subjektif yang merupakan bagian dari kesadaran. Sistem otoritas dalam kebahasaan adalah sesungguhnya pantulan dari kewibawaan yang

diberikan dengan persetujuan oleh pemakai bahasa, bukan sesuatu yang dapat menuntut pengakuan, apalagi kepatuhan.

Memang bahasa tidak boleh dibiarkan berjalan atau berlari tanpa arah. Anarki dalam pemakaian bahasa bukan saja akan menimbulkan kegalauan kultural, tetapi mungkin pula mengubah masyarakat-bangsa menjadi sekian banyak tumpukan "komunitas orang asing", tanpa jalinan komunikasi yang bermakna. Kejernihan bahasa dan terjalinnya komunikasi simbolik yang rapi adalah landasan yang kuat bagi terjaganya integrasi sosial dan nasional. Oleh karena itulah peranan Pusat Bahasa sangat penting. Oleh sebab itu, pulalah Pusat Bahasa harus mempunyai "strategi sosial", bukan hanya "kebijakan bahasa".

Barangkali dengan ini saya telah "berkhotbah kepada orang yang telah yakin" atau berbicara tentang hal yang sejak lama telah diketahui. Boleh jadi, demikianlah halnya. Hanya saja komposisi keahlian dari Pusat Bahasa belum membayangkan pengetahuan yang elementer ini. Saya tahu, dalam usaha merumuskan istilah-istilah teknis, Pusat Bahasa memakai tenaga ahli dari disiplin yang diperlukan, tetapi usaha pengembangan pemakaian "bahasa yang baik dan benar" memerlukan strategi sosial-kultural yang tepat dan teliti. Perubahan structural yang terjadi dengan cepat dan membanjirnya segala macam corak informasi mau tak mau memberi dampak yang mendalam pada segala aspek pemakaian bahasa. Baiklah saya tak perlu berbicara tentang tantangan masa depan, dengan segala cirinya, sebab ini akan membawa kita kepada masalah lain yang lebih kompleks. Walaupun begitu, kesimpulannya jelas. Bukankah sudah waktunya juga Pusat Bahasa merekrut staf yang tetap dari disiplin ilmu sosial? Tersedianya tenaga ahli ilmu sosial yang berkualitas dan sensitif semakin mendesak dalam usaha Pusat Bahasa untuk merencanakan strategi sosial kebahasaan.

# 7

# PUSAT BAHASA: PENILAIAN DAN HARAPAN

**Zainuddin Taha**
FPBS IKIP/Program Pascasarjana Unhas Ujung Pandang

Tanggal 28 Oktober 1998 nanti, Sumpah Pemuda genap berusia 70 tahun. Peringatan peristiwa penting dan bersejarah itu di tengah era reformasi dewasa ini membuat kita semakin kagum atas jasa pemuda yang memprakarsai lahirnya ikrar yang intinya *satu tanah air, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan*. Dalam butir-butir sumpah itu terbayang di hadapan kita keagungan visi persatuan yang menyemangati perjuangan para pemuda generasi prakemerdekaan itu. Untuk "persatuan Indonesia", mereka rela berkorban dan mengebelakangkan kepentingan golongan, suku, dan bahasa daerah mereka masing-masing. Kekaguman atas semangat persatuan itu kita wujudkan dengan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sejak Sumpah Pemuda diikrarkan, bahasa Indonesia telah menjalani perkembangan yang menakjubkan di berbagai sektor kehidupan. Di semua sektor, kosakata mengalami peningkatan yang cepat. Istilah dan kosakata baru bahasa Indonesia terus bertambah sehingga makin

menambah kemampuannya untuk menjadi wahana komunikasi pengungkapan pikiran dan pendapat pada semua bidang kehidupan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia telah membuktikan keandalannya menjadi pemersatu seluruh bangsa Indonesia dan dalam menyampaikan konsep-konsep pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengaruh dan gengsi bahasa Indonesia di mancanegara juga makin meningkat yang ditandai oleh makin besarnya minat bangsa-bangsa lain dalam mempelajarinya. Dewasa ini bahasa Indonesia telah diajarkan di 29 negara, malahan ada negara yang menjadikannya sebagai bahasa asing utama.

Bahasa Indonesia yang terus mengalami kemajuan itu, perlu terus-menerus dibina dan dikembangkan sehingga bangsa Indonesia benar-benar akan memiliki alat komunikasi yang canggih sesuai dengan keperluan pemakainya. Dalam kaitan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa itu, tidak sedikit prestasi yang telah dihasilkan oleh Pusat Bahasa.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/0 Tahun 1975 yang diubah dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 0222g/0/1980 ini diberi tugas untuk menentukan dan merencanakan kebijakan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Tugas itu dilaksanakan oleh Pusat Bahasa melalui upaya pengembangan jaringan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan lain di dalam dan di luar negeri, baik pemerintah maupun swasta. Berkat kerja sama itu pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Nusantara mengalami kemajuan yang berarti.

Berdasarkan catatan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sampai tahun 1993 telah diteliti 241 bahasa daerah, telah diolah lebih kurang 190.000 istilah berbagai bidang ilmu, telah disusun dan diterbitkan 4 seri kamus ilmu dasar, 5 judul kamus bahasa Indonesia, 54 kamus bahasa daerah, lebih kurang 75 judul kamus dan daftar istilah, 67 judul pedoman kebahasaan dan lebih dari 80 judul buku sastra. Selain itu, telah disusun dan diterbitkan pula *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Dalam

hal peningkatan kemampuan penggunaan bahasa secara baik dan benar dan pembentukan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, Pusat Bahasa juga melaksanakan penataran dan penyuluhan bahasa Indonesia kepada berbagai lapisan masyarakat.

Di samping prestasi yang membanggakan di atas, Pusat Bahasa kini masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan tugas yang tidak ringan. Walaupun jumlah pemakai bahasa Indonesia terus meningkat dengan mengesankan, Sensus Penduduk 1990 masih mencatat adanya sekitar 17% dari jumlah penduduk yang belum paham bahasa Indonesia. Di antara mereka yang mengaku dapat berbahasa Indonesia itu, tidak sedikit jumlahnya yang belum mampu menggunakannya secara baik dan benar. Bahkan, pengalaman kita sehari-hari memperlihatkan masih banyak perilaku pemakai bahasa yang kurang mencerminkan sikap bangga dan setia terhadap bahasa Indonesia.

Ejaan, lafal, kosakata, istilah, dan tata bahasa bahasa Indonesia masih mengandung kelemahan sebagai bahasa baku dan bahasa modern. Inventarisasi, kodifikasi, dan penelitian bahasa daerah banyak yang belum terlaksana disebabkan terbatasnya dana dan kurangnya tenaga terampil kebahasaan yang dimiliki. Di Indonesia bagian timur saja, masih terdapat puluhan, bahkan ratusan bahasa daerah yang belum pernah ditangani, baik mengenai inventarisasi dan kodifikasi strukturnya maupun dalam penelitian dimensi sosial budayanya.

Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia bertujuan terciptanya keadaan kebahasaan yang mantap, di mana bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing masing-masing menjalankan fungsi sesuai kedudukannya. Pemantapan fungsi bahasa tersebut dalam masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan pesat dewasa ini memerlukan perhatian yang besar dari kita semua. Perubahan cepat lingkungan kebahasaan, perkembangan teknologi komunikasi yang makin canggih, dan persaingan antarnegara dalam era kesejagatan membuat situasi kontak bahasa menjadi fenomena sehari-hari yang tak terelakkan. Kontak bahasa yang makin intensif itu mau atau tidak mau akan mempengaruhi ekologi setiap bahasa, yang pada gilirannya akan turut mempengaruhi pula sikap serta kebanggaan terhadap bahasanya masing-masing. Keadaan seperti itu

dengan sendirinya menuntut adanya garis haluan kebahasaan yang jelas dan terarah. Itulah sebabnya, Pusat Bahasa perlu terus-menerus mengkaji dan menelaah garis haluan dan politik bahasa nasional yang ada untuk disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dalam memasuki abad ke-21, Pusat Bahasa diharapkan dapat makin meningkatkan kerja samanya dengan lembaga-lembaga pendidikan, badan dan instansi pemerintah dan swasta, penerbit, dan media massa terutama untuk meneruskan program yang berkaitan dengan pemantapan kajian linguistik, tata bahasa, pembakuan aspek-aspek bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan penyebarluasan hasil-hasil kajian dan pembakuan tersebut ke seluruh lapisan masyarakat yang memerlukannya. Pusat Bahasa juga diharapkan terus melakukan pengkajian dan penilaian terhadap keadaan penggunaan bahasa di pelbagai bidang untuk mengetahui keadaan dan masalah penggunaan bahasa yang sebenarnya, mengkaji dan membentuk berbagai model laras bahasa yang sesuai dengan keperluan masyarakat modern untuk keperluan pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dirgahayu Pusat Bahasa dalam memasuki abad ke-21.

# 8

# PUSAT BAHASA DI SELA-SELA BELANTARA MASALAH SASTRA INDONESIA

**Taufik Ismail**

Mungkin dari semak-semak persoalan dalam sastra Indonesia, tidak akan keliru bila dikatakan bahwa yang paling banyak disebut orang adalah merosotnya minat masyarakat membaca karya sastra[1] dan pertandanya sudah jelas, yaitu rendahnya tiras buku sastra[2]. Kuantifikasinya dapatlah dicari pada berbagai publikasi. Penyebabnya tentu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Orang kurang terangsang, atau tidak diajak tertarik membaca karena sepinya ulasan dan kritik sastra di surat kabar dan majalah[3] serta tidak adanya acara sastra dan pembicaraan buku sastra di media elektronik[4]. Tidak mustahil pula, atau juga sangat mungkin, karena mutu karya sastra itu sendiri susut[5] sehingga para pecinta lama, terutama yang menguasai bahasa asing, berpaling dari karya sastra bangsa sendiri. Sangat sedikitnya diadakan sayembara-sayembara sastra [6] dengan hadiah yang layak juga mengurangi kemungkinan sastrawan mempertinggi fre-

kuensi penulisan yang akan memungkinkan dia mempertinggi kualitas karyanya pula.

Kemerosotan mutu ini barangkali makin *anjlok* karena anemisna ide atau tema berikut penggarapannya di dalam karya-karya sastra kita [7], sunyi dan lesunya lalu-lintas pikiran di antara kalangan sastra, yaitu pengarang, kritikus, dosen, guru, penerbit, dan pembaca itu sendiri [8], berupa seminar, simposium, diskusi panel dan sejenisnya.

Kecurigaan besar orang adalah bahwa sastrawan itu sendiri kurang membaca. Memasuki kehidupan dan menghayati denyut nadi bangsa, ya, tetapi berenang di danau khazanah literatur dunia, kurang. Penguasaan bahasa asing terbatas, bahkan untuk sastrawan yang lahir dan dibesarkan di ibukota, tidak pula menguasai satu pun bahasa daerah, yang semestinya akan memperkaya perbendaharaan batin dan kosakatanya. Sastrawan kita kurang terdedah atau kurang exposed pada pergaulan sastra-tetangga apalagi sastra-dunia, terutama dalam bacaan dan juga kontak serta pertemuan (9). Dalam pergaulan luar itu terasa benar lemahnya sastrawan Indonesia dalam berorganisasi [10].

Bepergian ke luar negeri masih tetap luks bagi mayoritas sastrawan Indonesia, apalagi di tahun 1998 ini dia dicekal dengan satu juta rupiah uang fiskal. Dari sisi pandang orang luar, maka sedikit sekali dikenal sastra Indonesia di manca negara melalui terjemahan bahasa asing[11].

Sebuah ilustrasi kuantitatif yang sedih: institusi yang aktif menerjemah karya sastra pilihan untuk dibaca orang luar cuma satu, yaitu Yayasan Lontar. Di negara jiran kita, paling tidak ada empat buah. Jadi, ditarik dari perbandingan penduduk, mestinya Indonesia punya 40 institusi yang semacam Yayasan Lontar itu. Tetapi kita punya cuma satu. Sangat sedih.

Sekarang mari kita menoleh ke institusi pendidikan tinggi kita. Susah dan seret untuk menarik minat studi sastra Indonesia di perguruan tinggi [12], yang juga terdapat di seluruh negara berkembang belum bertanding sudah kalah 7-0 dengan minat studi ilmu eksakta/sains dan ekonomi 1 sosial. Jadi, tidak mengherankan bila tampak kurang pula perhatian pada karya sastra Melayu klasik, sastra daerah klasik, dan karya sastra daerah kontemporer [13], yang padahal

kesemuanya ini modal pokok kita dalam memperkaya wawasan sastra Indonesia mutakhir.

Anemi minat ini jadi penyebab utama kurang menaiknya jumlah pengulas dan kritikus sastra[14], dan juga seretnya pertambahan S-3 ilmu sastra dibandingkan dengan S-3 ilmu eksakta 1 sains dan ilmu ekonomi 1 sosial[15]. Ada sebuah universitas negeri yang baru sesudah lebih sedikit 30 tahun baru punya seorang dosen sastra dengan kualifikasi S-3.

Apabila di fakultas-fakultas eksakta tak sedikit S-3-nya berumur kepala 3, muda, segar dengan daya lenting yang tinggi, S-3 anyar humaniora banyak betul berumur sejengkal dari masa pensiun atau malah sudah lewat, tetap terhormat tetapi ibarat mobil di zaman onderdil susah, di jalan tol ilmu pengetahuan biasanya tidak berani melesat kencang di jalur sebelah kanan. Mereka melaju di jalur kiri secara rutin dan *safe-safe* saja 35 kilometer satu jamnya.

Di masyarakat masih saja sastra mendapat salah-beban, yaitu dianggap bertugas mengubah ketimpangan sosial-politik[16], mengambil-alih kerja pengambil keputusan. Salah beban ini berkelanjutan pula pada fenomena masih adanya pelarangan karya sastra [17], tetapi barangkali ada harapan mulai akan berubah selepas prahara Mei 1998 ini.

Di kalangan calon pengarang, terutama di daerah, masih dirasakan lambatnya proses desentralisasi kegiatan sastra[18], walaupun sebenarnya bila dibandingkan suasananya dengan 10 tahun yang lalu, sentralisasi itu sudah lebih mengendor. Frekuensi kegiatan sastra di luar Jakarta, juga penerbitan karya sastra terutama puisi dalam tiras terbatas, meluas di berbagai kota.

Jarangnya penghargaan pada karya sastra dan sastrawannya[19], masih dirasakan terus, terutama di zaman ketika prestasi olahraga jauh lebih dihargai karena memang dapat dijual pada penaja yang berkepentingan menjajakan produknya di media massa elektronik. Karya sastra, tidak beruntung dapat masuk ke dalam mekanisme ekonomi semacam ini. Dengan sendirinya sastrawan tak dapat pula disetarakan perolehan rezekinya dengan petenis, pebulutangkis dan pengangkat besi yang memenangkan pertandingan di bidangnya. Di

luar penajaan semacam di olahraga ini, karya sastra dan sastrawan tidak pula dihargai dengan layak oleh masyarakat dan pemerintah.

Fenomena berkelanjutan yang membandel adalah cuma satunya majalah bulanan sastra[20] di Indonesia, yaitu *Horison*, yang ketika karangan ini ditulis berusia 32 tahun. Sekitar dua dasawarsa di tahun 50-an dan 60-an, kita melihat publikasi majalah sastra dan seni sekitar 5-6 judulnya. Di Mesir hari ini, terdapat 12 majalah bulanan puisi, cerpen, drama dan tinjauan buku. Ditarik dari perbandingan jumlah penduduk Mesir dan Indonesia, maka seharusnya Indonesia punya 42 majalah bulanan sastra semacam Horison. Empat puluh dua, sepantasnya. Tetapi kita cuma punya satu. Betul-betul sedih.

Ada juga hal yang membesarkan hati, yaitu bahwa Horison kini punya sisipan *Kakilangit*, untuk bacaan pelajar SMU, Pesantren, Madrasah Aliyah dan Sekolah Kejuruan. Dengan demikian, Horison melakukan penetrasi ke sekolah-sekolah itu di seluruh Indonesia, kini sudah memasuki tahun kedua. Fenomena ini belum pernah dahulu dialami oleh majalah *Kisah*, *Prosa*, *Cerpen*, dan *Sastra*.

Penyakit kronis yang kita idap sebagai bangsa adalah rabun membaca dan lumpuh menulis, dan epidemi ini etiologinya terdapat dalam tercecernya pengajaran sastra dan mengarang di sekolah[21]. Budaya membaca buku, yang di seluruh dunia dimulai melalui keharusan membaca karya sastra di sekolah, terabaikan di tingkat SLA kita sejak 1950.

Bila di negara-negara lain siswa membaca antara 6 sampai 30 buku sastra selama 3-4 tahun di SLA (membaca taraat, diuji, menulis ulasan), di negeri kita siswa kita membaca 0 (nol) buku. Di sini mereka menghafal ringkasan novel, dan membaca 2-3 puisi penyair terkemuka.

Bila di negara-negara lain mengarang bukan saja diwajibkan di kelas bahasa, tetapi juga di kelas sejarah, geografi dan ekonomi, maka di Indonesia itu cuma urusan kelas bahasa. Di tempat-tempat lain di sekolah menu mengarang sekali seminggu, diberikan pada guru, diperiksa, diberi angka ditambah catatan guru, dikembalikan kepada murid dan yang bagus dibicarakan di kelas. Di negeri kita mengarang dilakukan sekali sebulan atau dua bulan atau tiga bulan atau empat

bulan, diberikan pada guru, diberi angka, tidak dikembalikan kepada murid dan tidak dibicarakan di kelas. Ini sudah berlangsung 48 tahun lamanya. Sebagai bangsa kita lumpuh menulis.

Tamat perguruan tinggi bukan jaminan mampu menulis. Orang yang mampu menulis sedikit. Jumlah wartawan dan sastrawan makin sedikit lagi. Jumlah sastrawan seluruh Indonesia, pantasnya cuma untuk sebuah negeri seluas Jawa Timur, jumlahnya memalukan untuk bangsa sebesar 200 juta.

Di negeri kita, di dalam kurikulum dominasi pengaruh kelompok linguis sudah lama keterlaluan: sampai mau jadi mahasiswa murid masih dipaksa harus menghafal penggunaan awalan, sisipan dan akhiran juga, yang seharusnya sudah cukup dibereskan di SD dan SMP. Di SLA negara-negara lain, di kelas 2 dan 3 tata bahasa tidak diajarkan lagi, bahkan ada yang mulai kelas 1. Mereka dilatih *membaca, membaca, membaca* dan *menulis, menulis, menulis.*

Kini adalah titik balik bagi kita untuk membuat langkah baru memperbaiki yang terlalaikan selama ini bagi siswa-siswa kita, yaitu membaca dan menulis, dua butir pertama dari delapan kompetensi dasar pendidikan dan kebudayaan itu.

Memasuki abad atau milenium baru yang sudah demikian menghampir di hadapan kita ini, di semak-semak belantara 21 butir masalah sastra yang dibentangkan di atas, Pusat Bahasa sebagai institusi terkemuka di bidang pengembangan bahasa dan sastra ikut bertanggung jawab membereskannya. Tetapi ini kerja dan juga tanggung jawab bersama. Sastrawan, fakultas sastra, kritikus, guru, organisasi profesi, pencinta sastra, penerbit, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, media massa, semua terlibat di dalamnya.

Pada suatu saat kelak semak-semak ini, selepas dirambah dan dibudidayakan, apalagi kalau bukan bunga bermekaran dan buah ranum bergelantungan yang sama kita harapkan.***

## DAFTAR PUSTAKA


Halim, Amran (Ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional 1.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

---------. 1976. *Politik Bahasa Nasional 2.* Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Effendi. S. 1979. *Pembinaan Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

*Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.* 1993.

*Sosok, Pokok, Tokoh: Dua Dasawarsa Kerja Sama Kebahasaan.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Sumantri, Maman. *et. al. Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa


PERPUSTAKAAN KEPALA PUSAT BAHASA